

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2021



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021;
- b. bahwa dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Jngka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;

13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 56 tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2021 KABUPATEN MUSI RAWAS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021

BAB VI PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

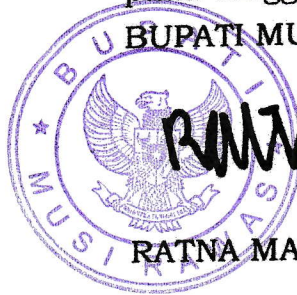
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 07 September 2021

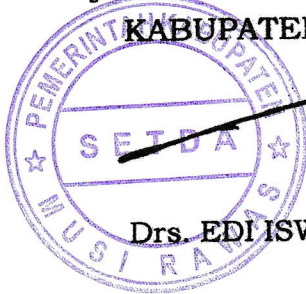
BUPATI MUSI RAWAS,



Ratna Machmud
RATNA MACHMUD

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 07 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Edi Iswanto
Drs. EDI ISWANTO, M.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR 25

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala segala karunia dan kekuatan-Nya kita dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2021.

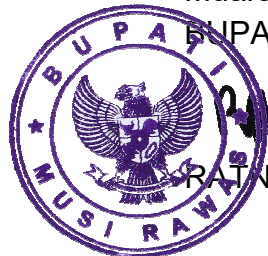
Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021, disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2001-2025 dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKP tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Sesuai fungsinya dokumen Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Oleh karena itu perannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran RAPBD-P Kabupaten Musi Rawas tahun 2021. Untuk selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Musi Rawas harus mempedomani serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program dan kegiatan hingga pelaksanaannya.

Pada kesempatan ini juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021.

Muara Beliti, 07 September 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



RATNA MACHMUD

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i-ii
DAFTAR TABEL	iii-viii
DAFTAR GRAFIK	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum	I.3
1.3. Maksud Dan Tujuan	I.6
1.3.1 Maksud.....	I.6
1.3.2 Tujuan	I.6
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan.....	I.7
1.5. Gambaran Perekonomian Daerah.....	I.8
1.6. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I.10
BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2021	II.1
2.1. Pengantar	II.1
2.2. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Berdasarkan OPD	II.1
2.3. Evaluasi Terhadap Pendanaan Penanganan Covid-19	II.173
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1. Kondisi Ekonomi Daerah	III.1
3.2. Kerangka Keuangan Daerah.....	III.7
3.2.1 Pendapatan daerah	III.7
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah	III.8
3.2.3 Pembiayaan Daerah	III.11
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021	IV.1
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV.1
4.2. Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV.3
4.3. Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021	IV.7
4.3.1 Telaah Terhadap RKP 2021	IV.8
4.3.2 Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan	

	Tahun 2021	IV.9
4.3.3	Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas	IV.9
4.3.4	Telaah Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya	IV.13
4.3.5	Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Musi Rawas	IV.14
4.3.6	Telaah Terhadap Isi Strategis.....	IV.16
4.4.	Prioritas, Sasaran, Arah Kebijakan, Program Prioritas Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV.17
4.5.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas.....	IV.40
4.6.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2021	IV.44
4.7.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	IV. 88
4.8	Strategis Pendukung Tujuan Pembangunan.....	IV.89
4.8.1	Strategis Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19	IV.89
4.8.2	Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs	IV.90
4.8.3	Strategi untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)	IV.94
4.8.4	Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM	IV.96
BAB V	PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021	V.1
5.1	Perubahan Rencana Pendanaan Daerah	V.1
5.2	Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan	V.21
BAB VI	PENUTUP	VI.1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	I.9
Tabel 2.1	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan	II.2
Tabel 2.2	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan	II.6
Tabel 2.3	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RS. Dr. Sobirin...	II.11
Tabel 2.4	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas PU Bina Marga	II.12
Tabel 2.5	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan.....	II.28
Tabel 2.6	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II.42
Tabel 2.7	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Sat. Pol PP	II.46
Tabel 2.8	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial.....	II.48
Tabel 2.9	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.....	II.52
Tabel 2.10	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II.55
Tabel 2.11	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan	II.58
Tabel 2.12	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Lingkungan Hidup	II.61
Tabel 2.13	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II.65
Tabel 2.14	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	II.68
Tabel 2.15	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II.71
Tabel 2.16	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan	II.74
Tabel 2.17Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	II.76
Tabel 2.18	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM.....	II.80
Tabel 2.19	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ...	II.83
Tabel 2.20	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga.....	II.86

Tabel 2.21	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	II.89
Tabel 2.22	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	II.91
Tabel 2.23	.Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perikanan	II.94
Tabel 2.24	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan	II.98
Tabel 2.25	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan.....	II.100
Tabel 2.26	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	II.103
Tabel 2.27	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Mura.....	II.106
Tabel 2.28	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Mura.....	II.107
Tabel 2.29	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Protokol Setda Kab. Mura	II.108
Tabel 2.30	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Organisasi Setda Kab. Mura	II.109
Tabel 2.31	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan rakyat Setda Kab. Mura	II.109
Tabel 2.32	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Perencanaan Keuangan Setda Kab. Mura	II.110
Tabel 2.33	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Hukum Setda Kab. Mura	II.111
Tabel 2.34	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Mura	II.111
Tabel 2.35	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Mura.....	II.112
Tabel 2.36	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Umum Setda Kab. Mura	II.112
Tabel 2.37	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Mura	II.114
Tabel 2.38	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....	II.115
Tabel 2.39	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan.....	II.120
Tabel 2.40	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.....	II.124
Tabel 2.41	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	II.128
Tabel 2.42 Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Inspektorat	II.131

Tabel 2.43	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II.134
Tabel 2.44	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II.137
Tabel 2.45	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Daerah	II.140
Tabel 2.46	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan STL Ulu Terawas.....	II.141
Tabel 2.47	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Selangit.....	II.144
Tabel 2.48	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sumber Harta.....	II. 147
Tabel 2.49	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tugumulyo	II.149
Tabel 2.50	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Purwodadi.....	II.152
Tabel 2.51	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Beliti.....	II.154
Tabel 2.52	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	II.156
Tabel 2.53	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Jayaloka.....	II. 158
Tabel 2.54	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Sukakarya.....	II.159
Tabel 2.55	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Kelingi.....	II. 161
Tabel 2.56	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tuah Negeri	II.163
Tabel 2.57	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Lakitan	II.165
Tabel 2.58	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Megang Sakti.....	II.167
Tabel 2.59	Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan BTS Ulu	II.169
Tabel 3.1	PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB = 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (milyar rupiah) dan Target 2021.....	III.3
Tabel 3.2	Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021	III.7
Tabel 3.3	Struktur Perubahan Belanja Daerah	III.10
Tabel 3.4	Struktur Pembiayaan Daerah.....	III.11

Tabel 4.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.2
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.....	IV.2
Tabel 4.3	Tema dan Tematik Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	IV.6
Tabel 4.4	Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2021 dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan Tema Pembangunan Musi rawas Tahun 2021	IV.7
Tabel 4.5	Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV.17
Tabel 4.6	Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	IV.17
Tabel 4.7	Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah....	IV.19
Tabel 4.8	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	IV.26
Tabel 4.9	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	IV.26
Tabel 4.10	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.26
Tabel 4.11	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.28
Tabel 4.12	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.28
Tabel 4.13	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.28
Tabel 4.14	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.29
Tabel 4.15	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.29
Tabel 4.16	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.29
Tabel 4.17	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.30
Tabel 4.18	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.32
Tabel 4.19	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.32
Tabel 4.20	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.32

Tabel 4.21	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.33
Tabel 4.22	Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.33
Tabel 4.23	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.35
Tabel 4.24	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.35
Tabel 4.25	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.36
Tabel 4.26	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 20212	IV.36
Tabel 4.27	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.36
Tabel 4.28	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.37
Tabel 4.29	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.39
Tabel 4.30	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.39
Tabel 4.31	Kegiatan Prioritas dan Targe Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas tahun 2021	IV.39
Tabel 4.32	Keterkaitan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Dengan Prioritas Daerah RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	IV.41
Tabel 4.33	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2021 Dengan Prioritas Nasional 2021	IV.44
Tabel 4.34	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Memperkuat Ketahanan Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	IV.46
Tabel 4.35	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Pemerataan.....	IV.58
Tabel 4.36	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	IV.61
Tabel 4.37	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan....	IV.68
Tabel 4.38	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Layanan Dasar.....	IV.74

Tabel 4.39	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.....	IV.80
Tabel 4.40	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Memperkuat Stabilitas, Polhukhankam dan Tranfortasi Pelayanan Publik	IV.83
Tabel 4.41	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2021 dengan Prioritas Provinsi 2021	IV.88
Tabel 4.42	Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Dalam Merespon Program SDGs	IV.93
Tabel 4.43	Dukungan Prioritas Terhadap Pengarustamaan Gender..	IV.95
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Perubahan RKPD Tahun 2021	V.2
Tabel 5.2	Rencana Alokasi Pendanaan Untuk penanganan Covid-19 Perubahan RKPD TAHUN 2021	V.3
Tabel 5.3	Rencana Perubahan Pagu Indikatif Untuk Tiap Prioritas Pembangunan Tahun 2021.....	V.21
Tabel 5.4	Rekapitulasi Perubahan Belanja Per Perangkat Daerah Tahun 2021	V.24

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas	III.1
Grafik 3.2	Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	III.2
Grafik 3.3	Perkembangan Inflasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021.....	III.4
Grafik 3.4	Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021	III.5
Grafik 3.5	Perubahan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.....	III.5
Grafik 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021	III.6

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas	IV.15

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah yang dituangkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dengan jangka waktu perencanaan tertentu. Dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2020 telah terjadi bencana non alam akibat penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di seluruh dunia termasuk melanda seluruh wilayah Indonesia. Pandemi Covid-19 ini melumpuhkan sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui beberapa kebijakan baik yang bersifat pencegahan, penanganan kesehatan, dan penjaminan pengaman sosial maupun ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang telah melanda menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan sampai dengan satu semester pada tahun perencanaan atau tahun berjalan (2021) ini telah ditemukan berbagai kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2021, dimana beberapa poin yang ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran, dan penghapusan kegiatan;
4. Kegiatan baru yang harus ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah; serta
5. Percepatan pencapaian target pembangunan daerah, provinsi maupun nasional Tahun 2021 yang berdampak pada perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah disertai perubahan anggaran untuk mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi bagi pencapaian target pembangunan provinsi, maupun nasional Tahun 2021.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD;

Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 perlu dilakukan perubahan, guna menampung seluruh perubahan dalam pendapatan,

belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran, yang terjadi baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pngganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Dan Eavaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021;
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2020 Nomor 10)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor Tahun 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Musi Rawas.
23. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor Tahun 56 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas. Perubahan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahapan perubahan di tahun 2021.

Perubahan RKPD Tahun 2021 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai semester 1(satu), dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2021.

2. Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2021. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

- a. Diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada.
- b. Diperolehnya perubahan atas program dan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Musi Rawas tahun 2021

- c. Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Musi Rawas.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2021) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
4. Adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara yang serta pasal 25 ayat (2) UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD, termasuk Perubahan RAPBD Tahun 2021.
5. Adanya Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 021 Untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya, yang berdampak terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan harus dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020

1.5. Gambaran Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan kembali tumbuh positif pada kuartal II-2021. Hal ini dipengaruhi membaiknya performa sejumlah komoditas ekspor unggulan daerah itu. Kondisi tersebut bisa terus terjaga apabila kondisi pandemi di Sumsel dapat terkendali. Walaupun pada kuartal I-2021 (Januari-Maret 2021) pertumbuhan ekonomi di Sumsel masih berkontraksi 0,40 persen, pada kuartal II (April-Juni) pertumbuhan ekonomi Sumsel dapat lepas dari kontraksi dengan bertumbuh positif pada 5,71 persen (*year on year*). Kondisi ini dipengaruhi membaiknya performa sejumlah komoditas unggulan Sumsel, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 19,40 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,21 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,75 persen.

Secara struktur ekonomi Provinsi Sumatera Selatan triwulan II-2021 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 19,67 persen; diikuti Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,26 persen serta Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,46 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut mencapai 54,40 persen terhadap total PDRB Sumatera Selatan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total ekspor Sumsel pada April 2021 mencapai 18,48 miliar dollar AS, meningkat dari periode yang sama tahun lalu 12,16 miliar dollar AS. Sektor penyumbang ekspor terbesar Sumsel adalah industri pengolahan (14,92 miliar dollar AS), pertambangan dan lainnya (2,27 miliar dollar AS), serta sektor migas (0,96 miliar dollar AS).

Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juli 2021 mengalami Deflasi sebesar 0,06 persen, Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan Juli 2021 sebesar 0,76 persen. Sementara Inflasi Tahunan "Year on Year" (Juli 2021 terhadap Juli 2020) sebesar 1,46 persen. Komoditas dominan yang menyebabkan terjadinya deflasi bulan Juli 2021 di Sumatera Selatan, antara

lain: daging ayam ras, beras, jeruk, dan telur ayam ras, yang mengalami penurunan harga dibandingkan dengan rata-rata harga bulan Juni 2021.

Sementara itu, tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas tidak bisa terlepas dari tantangan dan prospek global, nasional, provinsi dan Kabupaten Musi Rawas sendiri. Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional dan global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah secara makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 diprediksikan dalam kondisi cukup stabil walaupun dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian perekonomian akibat pandemi virus covid 19. Hanya saja pada kuartal III-2021 kemungkinan pertumbuhan ekonomi Musi Rawas diprediksi kembali melambat meskipun angkanya tetap positif seiring dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 di Musi Rawas. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Kabupaten Musi Rawas di proyeksikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021

No	Uraian	Target Tahun 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	
	a. Range	5,11 % - 6,01 %
	b. Moderat	5,60 %
2	Ekonomi Kabupaten Musi Rawas	
	a. Produk Domestik Bruto	22.430,93
3	Tingkat Inflasi	3,5-4,0
4	Kemiskinan	11,36
5	Tingkat Pengangguran	1,37%
6	Indeks Pembangunan Manusia	67,60

Sumber : Bappeda (Data diolah), Tahun 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar **5 - 6** persen untuk Tahun 2021 ditengah wabah pandemi Covid 19. PDRB akan dipacu di Tahun 2021 hingga mencapai 22.430,93 (milyar). Perbaikan ekonomi Musi Rawas pada tahun 2021 juga didorong oleh membaiknya ekonomi global dan berkurangnya ketidakpastian ekonomi. Selain itu, harga komoditas juga diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan pulihnya permintaan dunia. Diketahui, Kabupaten Musi Rawas

merupakan kabupaten yang perekonomiannya masih mengandalkan komoditas pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan, yakni padi, ikan air tawar, karet, kelapa sawit dan gas bumi. Dari kelompok pengeluaran lainnya, konsumsi rumah tangga atau domestik diperkirakan mulai pulih ditopang oleh peningkatan pendapatan masyarakat pasca meredanya penyebaran pandemi Covid-19.

Secara sektoral, sektor primer diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Untuk sektor sekunder dan sektor tersier diperkirakan juga masih akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian kabupaten Musi Rawas. Dari sisi permintaan, konsumsi pemerintah yang lebih ekspansif dan investasi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat yang dilandasi oleh perkiraan investasi swasta relatif stabil serta konsumsi pemerintah juga akan menguat sejalan dengan adanya kenaikan target pendapatan daerah dan peningkatan belanja dari APBD maupun APBN diperkirakan menjadi komponen-komponen yang akan membantu mempertahankan kinerja perekonomian Kabupaten Musi Rawas tetap stabil.

Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada Tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas ditargetkan akan berada pada angka 11,36 persen. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada Tahun 2021, TPT akan berada pada kisaran 1,4 -1,0 persen.

1.6. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- f. penutup

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2021

2.1. Pengantar

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi hasil RKPD tahun 2021 Kabupaten Musi Rawas sampai dengan Semester I Tahun 2021 dilakukan melalui analisa capaian Kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rerata indikator kegiatan. Rerata indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada bulan Juni program kegiatan tahun 2021 pada tiap OPD dengan capaian yang harus dicapai pada bulan Juni tahun 2021 dalam satuan persentase atau dengan notasi sebagai berikut: ***Rerata indikator capaian= (Nilai yang dicapai bulan Juni 2021 / target bulan Juni 2021) x 100%***.

Nilai dari hasil perhitungan di setiap indikator kegiatan menjadi Nilai dari Kegiatan (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian). Selanjutnya nilai dari setiap program, pada akhirnya juga menjadi nilai dari setiap OPD (Rerata indikator kinerja maupun Rerata Indikator capaian).

2.2 Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Berdasarkan OPD

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2021 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas selengkapnya tersaji pada uraian berikut:

1. Dinas Pendidikan

Tabel 2.1
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Pendidikan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	270.110.364.062	167.236.514.338	61,91	25,12
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.349.100	8.549.100	22	58,33
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.161.200	-	0,00	28,57
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.692.600	8.549.100	22,09	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.228.750	-	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	27.915.850	-	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.577.100	-	0,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.773.600	-	0,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	263.460.939.317	165.040.846.972	62,64	55,88
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	263.230.129.317	164.965.486.972	62,67	64,29
Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	179.181.000	75.360.000	42,06	33,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	51.629.000	-	0,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175.000.000	-	0	83,33
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	175.000.000	-	0,00	83,33
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.195.000	-	0	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	-	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	69.195.000	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.079.445	30.519.310	128,99	22,91
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.500.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.000.000	-	0,00	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.499.445	6.791.310	59,06	25,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	11.703.000	46,81	30,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	52.000.000	12.025.000	23,13	23,13
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	315.080.000	-	0,00	19,23
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	520.160.000	92.200.000	25	90,91
Pengadaan Mebel	150.000.000	-	0,00	100,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	370.160.000	92.200.000	24,91	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.488.159.000	1.902.882.296	102	33,61
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.000.000	4.310.000	21,55	33,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.959.000	48.172.296	37,35	25,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.339.200.000	1.850.400.000	42,64	33,88
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.482.200	130.997.350	68	42,86
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.672.500	38.002.000	45,42	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	404.240.500	92.995.350	23,00	63,64
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	-	0,00	33,33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.569.200	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	122.332.206.450	28.705.628.682	23	22,78
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	79.980.298.200	18.849.854.382	78	25,09
Penambahan Ruang Kelas Baru	5.206.766.651	-	0,00	0,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	250.989.000	-	0,00	0,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	278.236.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	18.168.764.100	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	548.244.000	-	0,00	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	245.792.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	2.619.148.400	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.961.514.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	2.155.652.349	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebel Sekolah	468.750.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.935.000.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Siswa	2.767.000.000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	37.111.674.000	18.124.409.072	48,84	55,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	94.141.000	-	0,00	0,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	831.898.600	-	0,00	0,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3.448.700.000	570.700.000	16,55	26,47
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	603.972.000		0,00	100,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.222.680.950	154.745.310	12,66	20,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	15.375.200	-	0,00	0,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	45.999.950	-	0,00	0,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	33.654.657.400	6.673.124.300	40	0,07
Penambahan Ruang Kelas Baru	1.500.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	7.206.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1.269.000.000	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.518.061.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebel Sekolah	468.750.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.075.998.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan Siswa	1.233.000.000			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	16.628.942.400	6.673.124.300	40,13	50,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	89.749.750	-	0,00	0,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	370.210.200	-	0,00	0,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	242.423.600	-	0,00	0,00
Pembinaan Kelembagaan dan	40.022.400	-	0,00	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Manajemen Sekolah				
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	12.500.050	-	0,00	0,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.984.286.550	2.335.500.000	47	31,62
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	519.103.950	-	0,00	0,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	348.631.550	-	0,00	0,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	63.108.500	-	0,00	0,00
Pengadaan Perlengkapan PAUD	320.000.000	-	0,00	0,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	249.966.700	-	0,00	0,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	565.870.950	-	0,00	0,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.917.604.900	2.335.500.000	47,49	50,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.712.964.300	847.150.000	50	41,67
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.695.500.000	847.150.000	49,96	50,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.464.300	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	113.388.500	-	0	0,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100.000.000	-	0	0,00
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	-	0,00	0,00
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	50.000.000	-	0,00	0,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	13.388.500	-	0	0,00
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	13.388.500	-	0,00	0,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	46.594.000	-	0	0,00
Pemetaan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	46.594.000	-	0	0,00
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	46.594.000	-	0,00	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	14.987.000	-	0	0,00
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	14.987.000	-	0	0,00
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	14.987.000	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	14.613.000	-	0	0,00
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.613.000	-	0	0,00
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.613.000	-	0,00	0,00
JUMLAH	392.632.153.012	195.911.623.710	49,90	47,90

2. Dinas Kesehatan

Tabel 2.2
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	175.696.500	71.476.100	40,68	41,60
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.277.100	14.457.100	34,20	45,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	38.560.100	17.060.100	44,24	48,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	38.560.100	17.060.100	44,24	40,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	27.906.350	11.206.350	40,16	40,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	28.392.850	11.692.450	41,18	35,00
Administrasi Perangkat Daerah	68.859.015.316	31.814.656.545	46,20	46,00
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	68.553.003.316	31.706.406.545	46,25	55,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	306.012.000	108.250.000	35,37	37,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.250.900	107.168.383	24,91	28,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.748.500	18.748.500	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.236.100	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.265.350	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	4.250.000	28	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	360.000.950	84.169.883	23,38	40,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.000.000	-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.000.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.065.694.449	1.715.794.844	28,29	38,33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.049	120.327.544	40,11	48,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.761.694.400	1.595.467.300	27,69	40,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	320.360.000	29.486.850	9,20	9,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.000.000	29.486.850	16,20	18,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.360.000	-	-	-
Peningkatan Pelayanan BLUD	18.990.064.338	4.143.894.743	21,82	45,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.990.064.338	4.143.894.743	21,82	60,00
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	68.774.493.460	-	-	-
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	30.642.045.000	-	-	-
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	360.000.000	-	-	-
Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.574.500.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	650.000.000	-	-	-
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.231.926.000	-	-	-
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26.629.352.460	-	-	-
Pengadaan Obat, Vaksin	3.540.954.000	-	-	-
Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.961.616.000	-	-	-
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	184.100.000	-	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.725.681.870	9.214.797.256	15,43	11,44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.000.000	-	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.000.000	-	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	144.165.000	235.000	0,16	2,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.000.000	-	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000	1.090.000	10,90	12,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.000.000	15.000.000	100	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.000.000	15.000.000	100	100,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.000.000	-	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.500.000	-	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	22.500.000	-	-	-
Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	14.897.205.350	1.621.719.564	11	12,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.496.656.000	-	-	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.250.000	5.270.000	20,08	25,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	216.966.000	1.675.200	0,77	2,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	378.179.000	14.688.800	3,88	6,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	26.250.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	272.199.500	-	-	-
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	203.357.820	10.700.000	5,26	5,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	531.177.500	14.135.000	2,66	-
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.210.797.700	7.327.933.700	31,57	-
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	40.000.000	3.300.000	8,25	10,00
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.250.000.000	13.740.000	0,61	2,00
Operasional Pelayanan Puskesmas	13.328.062.000	-	-	-
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	380.000.000	170.309.992	44,82	-
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.136.416.000	-	-	-
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.187.929.000	11.242.200	0,95	4,00
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	187.929.000	11.242.200	5,98	8,00
Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1.000.000.000	-	-	-
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	7.112.751.720	2.187.378.574	30,75	15,00
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.000.000	2.200.000	11,00	13,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	7.092.751.720	2.185.178.574	30,81	32,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	334.700.000	64.680.400	19,32	22,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	334.700.000	64.680.400	19,32	22,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh	101.377.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
Industri Rumah Tangga				
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	101.377.000	-	-	-
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	95.607.000	-	-	-
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	95.607.000	-	-	-
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	124.650.000	-	-	-
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	124.650.000	-	-	-
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.735.000	9.801.000	41,29	45,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	23.735.000	9.801.000	41	45,00
TOTAL	232.972.006.553	49.370.376.895	21,19	16,97

3. Rs. Dr. Sobirin

Tabel 2.3
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan RS. Dr. Sobirin

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	35.806.430.810	14.705.672.881	41,06	41,06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.104.400	-	-	-
Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	99.104.400	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.086.226.410	13.305.732.785	42,80	42,80
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.963.496.410	13.305.732.785	42,97	42,97
Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	122.730.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.621.100.000	1.399.940.096	30,30	30,30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.222.600.000	615.190.096	27,68	27,68
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.398.500.000	784.750.000	32,72	32,72
Program Pemerintah Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	18.551.669.000	119.977.800	0,65	0,65
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	4.784.550.000	-	-	-
Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.784.550.000	-	-	-
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.767.119.000	119.977.800	0,87	0,87
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi Bencana	11.067.119.000	-	-	-
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.700.000.000	119.977.800	4,44	4,44
JUMLAH	54.358.099.810	14.825.650.681	27,27	27,27
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52.250.000.000	25.507.488.313	48,82	48,82
Peningkatan Pelayanan Blud	52.250.000.000	25.507.488.313	48,82	48,82

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	52.250.000.000	25.507.488.313	48,82	48,82

4. Dinas PU Bina Marga

Tabel 2.4
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas PU Bina Marga

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	160.543.180.210	33.334.270.611	20,76	-
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.556.842.710	2.757.719.436	32,23	32,23
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	281.930.100	101.367.500,00	35,95	35,95
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	12.767.400	25,53	25,53
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.987.400	2.992.500,00	49,98	49,98
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.089.100	3.843.900,00	63,13	63,13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.723.500	2.556.000,00	54,11	54,11
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000	3.375.000,00	75,00	75,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.200.000	-	-	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.500.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	45.000.100	45.000.100	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	908.000	908.000,00	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.571.500	4.571.500,00	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.820.600	3.820.600,00	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.500.000	7.500.000,00	100,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.200.000	10.200.000,00	100,00	100,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.400.000	7.400.000,00	100,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.600.000	10.600.000,00	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	45.100.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.095.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.809.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.671.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.275.000	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.250.000	-	-	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.400.000	-	-	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.600.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	45.130.000	43.600.000	96,61	97,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.813.000	1.813.000,00	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.135.500	7.135.500,00	100,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.501.500	6.501.500,00	100,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.680.000	10.150.000,00	86,90	86,90
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.400.000	7.400.000,00	100,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.600.000	10.600.000,00	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	46.700.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.697.100	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.264.900	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.668.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.760.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.750.000	-	-	-
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.400.000	-	-	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.100.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.119.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.941.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.664.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.275.000	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.213.112.610	2.232.450.102	42,82	45,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.863.112.610	2.147.050.102	44,15	40,89
Belanja Gaji Pokok PNS	2.713.169.835	1.267.551.740,00	46,72	50,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	313.769.708	143.808.804,00	45,83	50,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	235.487.200	100.170.000,00	42,54	50,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	96.630.000	12.100.000,00	12,52	2,00
Tunjangan Fungsional umum	0	29.375.000,00	-	-
Belanja Tunjangan Beras PNS	202.196.640	90.090.480,00	44,56	48,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.679.533	1.587.668,00	27,95	20,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	198.194	19.710,00	9,94	1,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.287.000.000	502.346.700,00	39,03	20,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	8.981.500	-	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	350.000.000	85.400.000	24,40	42,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	191.520.000	63.840.000,00	33,33	30,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	149.850.000	21.560.000,00	14,39	12,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	930.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	7.200.000	-	-	-
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	500.000	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	-	-	0
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.960.300	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.298.700	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.481.000	-	-	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.350.000	-	-	
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.150.000	-	-	
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.500.000	-	-	
Belanja Sewa Peralatan Umum	3.000.000	-	-	
Belanja Modal Mebel	7.500.000	-	-	
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	168.000.000	-	-	
Belanja Bimbingan Teknis	5.500.000	-	-	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.260.000	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	583.500.000	143.139.386	24,53	25,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.500.000	4.690.000	19,96	20,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	23.500.000	4.690.000,00	19,96	20,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.000	4.800.000	12,00	10,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	40.000.000	4.800.000,00	12,00	10,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.000.000	29.994.300	25,00	80,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.638.500	4.909.100,00	25,00	20,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.226.000	9.303.700,00	24,99	20,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.485.500	15.120.500,00	25,00	20,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.650.000	661.000,00	24,94	20,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	5.550.000	22,20	20,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	25.000.000	5.550.000,00	22,20	20,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000	98.105.086	26,16	20,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	455.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	374.545.000	98.105.086,00	26,19	20,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	630.500.000	0	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengadaan Mebel	60.500.000	-	-	0
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.420.000	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	393.500	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	186.500	-	-	
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.000.000	-	-	
Belanja Modal Mebel	42.500.000	-	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	147.000.000	0	-	-
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	19.000.000	-	-	
Belanja Modal Alat Pendingin	72.500.000	-	-	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	55.500.000	-	-	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	423.000.000	0	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	393.500	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	334.500	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	138.000	-	-	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.034.000	-	-	
Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	13.800.000	-	-	
Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	2.100.000	-	-	
Belanja Modal Takaran Lainnya	3.600.000	-	-	
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	35.000.000	-	-	
Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	53.100.000	-	-	
Belanja Modal Alat Laboratorium Pasir	3.000.000	-	-	
Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	100.500.000	-	-	
Belanja Modal Personal Computer	125.000.000	-	-	
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	46.000.000	-	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	704.800.000	207.095.865	29,38	87,27
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	29.406.165	29,41	60,00
Belanja Tagihan Air	9.504.000	3.049.620,00	32,09	30,00
Belanja Tagihan Listrik	84.496.000	24.821.052,00	29,38	30,00
speedy	6.000.000	1.535.493,00	25,59	25,59
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	5.809.700	19,37	30,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	23.250.000	5.809.700,00	24,99	30,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	6.750.000	-	-	
Penyediaan Jasa Pelayanan	574.800.000	171.880.000	29,90	95,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Umum Kantor				
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	160.000	-	-	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	377.000.000	121.000.000,00	32,10	35,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	152.640.000	42.880.000,00	28,09	30,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	-	-	-	
Belanja Jasa Tenaga Supir	24.000.000	8.000.000,00	33,33	30,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	21.000.000	-	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.000.000	73.666.583	8,74	16,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000	22.079.941	22,08	45,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.149.000	12.167.146,00	75,34	90,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	41.301.000	-	-	
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.550.000	9.912.795,00	23,30	30,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	19.787.592	28,27	85,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.820.000	1.255.042,00	18,40	20,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	29.600.000	3.382.550,00	11,43	15,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.580.000	15.150.000,00	45,12	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	175.000.000	23.799.050	13,60	15,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.920.000	4.078.800,00	24,11	20,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.303.000	2.623.000,00	79,41	90,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	117.525.000	12.597.250,00	10,72	10,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	48.000	-	-	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	94.000	-	-	

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	37.110.000	4.500.000,00	12,13	12,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.000.000	8.000.000	25,00	25,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	32.000.000	8.000.000,00	25,00	25,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.000.000	0	-	-
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.000.000	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.500.000	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.500.000	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000	0	-	-
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	300.000.000	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	0	-	-
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	150.000.000	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	151.986.337.500	30.576.551.175	20,12	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	151.986.337.500	30.576.551.175	20,12	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2.196.339.500	16.771.500	0,76	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.185.500	1.591.800	49,97	50,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.695.500	1.847.200	49,99	50,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.075.000	1.537.500	50,00	56,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	990.000	495.000	50,00	56,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.500.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.000.000	1.300.000	10,00	10,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Jembatan Kabupaten	580.525.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jembatan Multifungsi	340.158.500	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	210.000.000	10.000.000,00	4,76	4,76
Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	1.210.000	-	-	-
Belanja Modal Alat Ukur Universal	12.000.000	-	-	-
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15.000.000	-	-	-
Masterplan Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Musi Rawas	1.000.000.000	-	-	-
Pengelolaan Leger Jalan	507.820.000	0	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	699.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.389.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.016.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	240.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	495.000	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.180.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	6.500.000	-	-	-
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	40.000.000	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	348.000.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000	-	-	-
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	80.000.000	-	-	-
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	160.061.400	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	332.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.274.400	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.050.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	165.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.240.000	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	150.000.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000	-	-	-
Pembangunan Jalan	4.470.580.000	1.005.550.000	22,49	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.631.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.575.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.038.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.155.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.380.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.300.000	-	-	-
Belanja Modal Jalan Kabupaten	999.000.000	299.700.000	30,00	20,00
Pembangunan Jalan Lubuk Pandan - Semeteh (Karya Bakti TNI)	999.000.000	299.700.000,00	30,00	30,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	3.409.500.000	705.850.000,00	20,70	20,00
Pembangunan Jalan Desa Q.1 Tambah Asri (TMMD)	1.000.000.000	-	-	-
Pembangunan Jalan Desa Sungai Naik - Desa Pangkalan Tarum	1.113.750.000	-	-	-
Pembangunan Jalan Poros Desa Tambangan	552.750.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Lingkar Desa Pedang	743.000.000	705.850.000,00	95,00	100,00
Pelebaran Jalan Menuju Standar	6.724.545.000	1.191.600.000	17,72	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.032.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.186.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.022.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	660.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.920.000	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	198.825.000	-	-	-
Jasa Konsultasi Pengawasan Pelebaran Menuju Standar	198.825.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	39.900.000	-	-	-
Belanja Modal Jalan Kabupaten	6.472.000.000	1.191.600.000	18,41	
Peningkatan Kapasitas Jalan B.Srikaton - C. Nawangsasi - M.Siitiharjo (K.012)	2.500.000.000	-	-	38,54
Peningkatan Kapasitas Jalan G1.Mataram - L. Sidoharjo (K.016)	1.984.000.000	-	-	60,18
Peningkatan Kapasitas Jalan Selangit-Batu Gane- Napal Melintang (K.071)	1.988.000.000	1.191.600.000,00	59,94	24,71
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	81.922.361.500	15.814.750.000	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	41.630.072.000	7.907.375.000	18,99	32,18
Survei Kondisi Jalan Zona 1 (DAK Reguler)	332.282.500	-	-	-
Survei Kondisi Jalan Zona 2 (DAK Reguler)	300.000.000	-	-	58,77
Survei Kondisi Jalan Zona 3 (DAK Reguler)	350.000.000	-	-	4,93
Survei Kondisi Jembatan (DAK Reguler)	355.500.000	-	-	65,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	922.500.000	226.375.000	24,54	0,20
Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Gunung Kembang Lama (DAK Afirmasi)	922.500.000	226.375.000,00	24,54	0,20
Belanja Modal Jalan Kabupaten	36.012.289.500	7.016.000.000	19,48	40,97
Peningkatan Struktur Jalan Simpang Temuan Jaya - Simpang Jene (K.172) (DAK Reguler)	24.900.000.000	4.817.000.000,00	19,35	6,00
Peningkatan Struktur Jalan Spg Jayaloka - Marga Tani (K. 161) (DAK Reguler)	2.712.289.500	538.000.000,00	19,84	93,08
Peningkatan Struktur Jalan Trans Cekar - SP. 9 Bangun Jaya (K.063) (DAK Reguler)	8.400.000.000	1.661.000.000,00	19,77	23,90
Belanja Modal Jalan Lainnya	3.357.500.000	665.000.000	19,81	0,10
Peningkatan Jalan Sembatu Jaya - Jene (DAK Afirmasi)	3.357.500.000	665.000.000,00	19,81	0,10
Rekonstruksi Jalan	40.491.251.800	2.954.885.000	7,30	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.555.800	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.638.700	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.110.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.290.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.470.000	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	283.965.000	0	-	-
Jasa Konsultasi Pengawasan Rekonstruksi Jalan	283.965.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	157.435.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Jalan Kabupaten	19.316.286.800	2.954.885.000	15,30	
Peningkatan Jalan Ciptodadi 1-Sukarena (K.095)	947.000.000	284.100.000,00	30,00	-
Peningkatan Jalan Dalam Kecamatan Muara Beliti (Komplek Perkantoran & Komplek Perumahan, Akses Menuju Stadion)	600.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Giriyo - Sungai Bunut	7.500.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Megang Sakti - Dangku (K.045)	1.644.386.800	-	-	-
Peningkatan Jalan Ngestiboga 2 - Tambangan	877.500.000	263.250.000,00	30,00	-
Peningkatan Jalan Simpang Binjai - Binjai (K.096)	932.500.000	396.312.500,00	42,50	100,00
Peningkatan Jalan Simpang Giriyo - Ngestiboga 2 - Tambangan (K.084/K.082)	944.700.000	283.410.000,00	30,00	38,46
Peningkatan Jalan Simp Sadu - Sadu (K.106)	955.500.000	286.650.000,00	30,00	-
Peningkatan Jalan SP.1 Pelita Jaya - Lubuk Pandan (K.143)	741.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan SP.3 Mekar Sari - SP.2 Karya Mulya - Sukamerindu (K.057/K.062)	1.466.000.000	696.350.000,00	47,50	-
Peningkatan Jalan Sp 5 Tegal Sari - Muara Megang (K.054)	501.600.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Sri Rahayu - Sukadana (K.067)	498.600.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Sukowono - Ngestikarya (K.087)	1.340.000.000	744.812.500,00	55,58	28,46
Peningkatan Jalan Tugu sempurna - Marga sakti (K.134)	367.500.000	-	-	-
Belanja Modal Jalan Desa	15.106.050.000	0	-	-
Peningkatan Jalan Akses Pesantren dan Pasar Desa Sumber Rejo	738.750.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Air Satan	1.107.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Babat (Dusun 5)	364.800.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Beliti Jaya	663.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Bumi Rejo	292.500.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Karya Mukti	366.600.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa L. Sidoharjo (Dusun V)	369.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Lubuk Muda	663.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Margoyoso	477.750.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Ngestiboga I	1.938.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Pelita Jaya	965.700.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Petrans Jaya	663.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Prabumulih	368.550.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
I				
Peningkatan Jalan Desa Sadar Karya	221.400.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Semangus Baru (Perkampungan Suku Anak Dalam)	739.500.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa SP.7 Kotabaru	555.750.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa SP.8 Trijaya	555.750.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Sri Mulyo	277.500.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Sukarami Jaya Dusun I	371.250.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Sumber Sari	374.400.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Sungai Pinang (Koral)	1.111.500.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Sungai Pinang (Rigid)	1.113.750.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Temuan Jaya	366.600.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Kelurahan Pasar Muara Beliti	441.000.000	-	-	-
Belanja Modal Jalan Lainnya	5.553.450.000	0	-	
Peningkatan Jalan Desa Muara Kati Baru I	882.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Desa Sungai Pinang - Desa Semeteh	1.863.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Gedung DPR Musi Rawas	735.750.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Kelurahan B. Srikaton	891.000.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Kelurahan SP.9 Bangun Jaya	331.500.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Kelurahan Sumber Harta	277.200.000	-	-	-
Peningkatan Jalan Poros Desa Ciptodadi 2	573.000.000	-	-	2,00
Pemeliharaan Berkala Jalan	11.338.684.000	3.680.210.000	32,46	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.495.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.947.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.082.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.475.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	203.084.000	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	190.784.000	0	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Rutin Jalan	190.784.000	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	11.027.600.000	3.680.210.000	33,37	-
Pemeliharaan Jalan Bamasco - Dangku (K.049)	948.000.000	284.400.000,00	30,00	50,00
Pemeliharaan Jalan G.1 Mataram - G.2 Dwijaya - Q.2 Wonorejo(K.018)	799.900.000	-	-	-
Pemeliharaan Jalan Jajaran Baru I - Muara Megang (K.066)	944.700.000	771.970.000,00	81,72	-
Pemeliharaan Jalan Marga Tunggal - Giriyoso - Sungai Bunut (K.079)(K.081)(K.082) (K.083)	1.255.000.000	376.500.000,00	30,00	-
Pemeliharaan Jalan Muara Kelingi - SP. Temuan Jaya (K.131)	1.000.000.000	297.600.000,00	29,76	-
Pemeliharaan Jalan Ngestikarya - Ngestiboga I - Marga Tani (K.086)	1.483.000.000	444.900.000,00	30,00	45,60
Pemeliharaan Jalan O. Mangunharjo - G.2 Dwijaya (K.035)	693.000.000	207.900.000,00	30,00	30,00
Pemeliharaan Jalan Q1 Tambah Asri-Simp Semambang (K.023)	1.576.000.000	693.440.000,00	44,00	100,00
Pemeliharaan Jalan Simpang 4 Polres - Bundaran AC - F. Trikoyo (K.001/K.002)	1.379.000.000	413.700.000,00	30,00	30,00
Pemeliharaan Jalan Simp Tanjung - Pulau Panggung - Binjai (K.128)	949.000.000	189.800.000,00	20,00	26,35
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75.000.000	-	-	-
Pemeliharaan Rutin Jalan	450.000.000	68.594.675	15,24	-
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	450.000.000	68.594.675	15,24	-
Operasional UPT wilayah I	108.889.000	-	-	-
Operasional UPT wilayah II	104.311.000	-	-	-
Operasional UPT wilayah III	108.889.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	699.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.389.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.147.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	495.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	55.080.000	12.960.000,00	23,53	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.200.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.900.000	-	-	-
Pembangunan Jembatan	16.224.873.000	-	16,63	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.864.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.372.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.044.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.320.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.840.000	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	336.633.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81.500.000	-	-	-
Belanja Modal Jalan Kabupaten	299.200.000	0	-	-
Pembangunan Jembatan Beton Desa Sungai Pinang (Oprite Jembatan)	299.200.000	-	-	-
Belanja Modal Jembatan Lainnya	15.480.100.000	2.697.890.000	17,43	
Pembangunan Jembatan Akses Dekranasda	200.000.000	-	-	-
Pembangunan Jembatan Besi Desa Semangus Dusun 1 dan 2	498.000.000	-	-	-
Pembangunan Jembatan Gantung Desa Mambang	499.800.000	-	-	-
Pembangunan Jembatan Gantung Desa Mandi Aur (Dusun Gading)	399.000.000	-	-	-
Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Keruh Dusun VII Desa SP.8 Trijaya	1.500.000.000	-	-	-
Pembangunan Jembatan Multifungsi Menuju Desa Mekar Jaya Sungai Bunut (Tahap II)	2.212.300.000	663.690.000,00	30,00	41,92
Pembangunan Jembatan Sungai Musi Semangus (Tahap II)	2.854.000.000	570.800.000,00	20,00	24,86
Pembangunan Jembatan Sungai Nile Desa Taba Remanik	7.317.000.000	1.463.400.000,00	20,00	5,67
Penggantian Jembatan	24.978.780.000	11.053.675.000	44,25	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	699.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.389.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.016.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	495.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.380.000	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	333.300.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.000.000	-	-	-
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	23.871.500.000	11.053.675.000	46,30	58,14

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Jembatan Sungai Mambang Desa SP.5 Karya Teladan (K. 131)	4.332.500.000	1.603.025.000,00	37,00	100,00
Pembangunan Jembatan Sungai Megang Desa Megang Sakti II (K. 032)	6.825.000.000	1.365.000.000,00	20,00	47,94
Pembangunan Jembatan Sungai Tawas Desa SP.1 Pelita Jaya (K.143)	4.040.000.000	2.868.400.000,00	71,00	100,00
Pembangunan Jembatan Sungai Temelat Desa Sugih Waras (K.088)	8.674.000.000	5.217.250.000,00	60,15	42,74
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	700.000.000	0	-	-
Pembangunan Box Culvert Sungai Keruh Desa SP.3 Marga Baru (K. 143)	700.000.000	-	-	-
Rehabilitasi Jembatan	1.290.860.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	699.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.389.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.016.500	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	495.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.260.000	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	800.000.000	-	-	-
Rehabilitasi Jembatan Sungai Senaro Desa Megang Sakti V	400.000.000	-	-	-
Rehabilitasi Jembatan Sungai Tupak Desa G.2 Dwijaya (K.036)	400.000.000	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	450.000.000	-	-	-
Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Muara Beliti Baru	450.000.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000	-	-	-
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	141.900.000	0	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.646.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.419.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.945.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	140.000	-	-	-
Belanja Alat /bahan untuk kegiatan kantor -bahan komputer	4.790.000	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.650.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.660.000	-	-	-
Honorarium pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	7.400.000	-	-	-
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4.800.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.200.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	68.250.000	-	-	-
Belanja Modal Personal Computer	0	-	-	-
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	1.380.570.800	0	-	-
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.060.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.631.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.779.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.160.000	-	-	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.155.000	-	-	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000	-	-	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.000.000	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.226.310.800	0	-	-
Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Struktur Jalan Simpang Temuan Jaya - Simpang Jene (K.172) (DAK Reguler)	548.515.000	-	-	-
Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Struktur Jalan Spg Jayaloka - Marga Tani (K. 161) (DAK Reguler)	187.000.000	-	-	-
Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Struktur Jalan Trans Cekar - SP. 9 Bangun Jaya (K.063) (DAK Reguler)	293.895.800	-	-	-
Jasa Konsultansi Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Non Status dan Rehabilitasi Jembatan Gantung (DAK Afirmasi)	196.900.000	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.675.000	0	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	-	-	-
JUMLAH	160.543.180.210	33.334.270.611,00	20,76	25,00

5. Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

Tabel 2.5
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.143.217.968	-	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	433.367.250	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	176.443.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.699.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	26.699.200	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.699.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	26.698.550	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.127.500	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.079.619.664			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.817.900.064	7.740.496.388,00	65,50	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.320.600	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.399.000	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	352.464.300			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	352.464.300	98.340.000	27,90	25,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.513.300			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160.000.300	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.172.000	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.341.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.150.187.485			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.699.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	26.699.200	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.699.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	26.698.550	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.127.500	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.079.619.664			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.817.900.064	-	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	235.320.600	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.399.000	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	352.464.300			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	352.464.300	98.340.000	27,90	29,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.513.300			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	160.000.300	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	66.172.000	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	53.341.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.150.187.485			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.823.500	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.000.450	12.889.312	28,02	30,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	71.200.000	-	-	-
Penyediaan Bahan/Material	206.362.535	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.975.000	52.177.200	13,41	13,41
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.764.941.284			
Pengadaan Mebel	119.762.250	-	-	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.844.384.188	292.500.000,00		
Pembangunan Workshop Kantor DPUCKTRP Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	500.000.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Lanjutan Pembangunan Gedung Aula BKPSDM Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	250.000.000			
Pembangunan Gedung Pertemuan dan Arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	500.000.000			20,00
Lanjutan Pembangunan Ruang Fraksi Gedung DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti (Tahap II)-Pembayaran SPPH Kegiatan Tahun 2019	292.500.000			
Pembangunan Pagar Kantor Inspektorat Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	300.000.000			
Lanjutan Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti (Tahap II)	1.000.000.000			
Lanjutan Pembangunan Gedung BNN Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti (Tahap III)	500.000.000			
Pembangunan Kantor Polisi Sub Sektor Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	250.000.000			
Pembangunan Gedung Serba Guna Kecamatan BTS Ulu	750.000.000			
Pembangunan Kantor Polisi Sub Sektor Kecamatan Sumber Harta	250.000.000			
Pembangunan Kantor Koramil Kecamatan Selangit	250.000.000			
Pembangunan Kantor Kepala Desa Trikarya Kecamatan Purwodadi	401.884.188			
Pembangunan Kantor Kepala Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan	600.000.000			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.794.846	184.800.000	10,26	15,00
Pemasangan Trafo, SUTR, Panel dan Instalasi Listrik Gedung Auditorium Kantor Bupati Musi Rawas di Muara Beliti	300.000.000			
Pemasangan Jaringan Listrik dan LPJU Area Mall Pelayanan Publik di Muara Beliti	650.000.000			
Pembuatan Taman Gedung DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	200.000.000			
Lanjutan Pembuatan Landscape Kantor Bupati Musi Rawas di Muara Beliti	400.000.000			
Pemasangan LPJU di Kawasan Pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas di Kota Lubuklinggau	250.794.846			100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.915.980.443			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	6.250.000	25,00	25,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.450.991.355	2.598.065.383	106,00	65,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.997.100			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.359.991.988	754.513.000	55,48	25,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.045.097.554			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.442.700			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84.993.500			
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	250.663.234			
Pemeliharaan Rutin Jaringan Listrik dan LPJU di Kabupaten Musi Rawas	250.663.234			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.624.998.120			
Rehabilitasi Rumah Dinas Bupati Musi Rawas	500.000.000			32,60
Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	1.000.000.000			
Rehabilitasi Gedung Serba Guna Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti	200.000.000			
Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Batu Bandung Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	300.000.000			
Lanjutan Rehabilitasi Kantor Camat Kecamatan Jayaloka	200.000.000			
Lanjutan Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Suka Mulya Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000			
Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Binjai Kecamatan Muara Kelingi	225.000.000			
Lanjutan Rehabilitasi Kantor Camat Kecamatan Purwodadi	200.000.000			
Rehabilitasi Kantor UPT Air Lakitan di Kecamatan Sumber Harta	175.000.000			
Rehabilitasi Kantor Kepala Desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta	225.000.000			
Rehabilitasi Gedung Mapolres Musi Rawas di Muara Beliti	399.998.120			
Peningkatan Pelayanan BLUD	5.122.046.688			
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	5.122.046.688			
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	37.087.920.896			
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.976.004.000	4.339.200		
Peningkatan Tanggul Sungai				
Lanjutan Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Musi Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan (Tahap IV)	600.000.000			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Lakitan Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit	293.546.140			
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Desa Taba Tengah Kecamatan Selangit	243.546.140			
Lanjutan Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai di Taman Hutan Kota Pelangi di Kecamatan Muara Beliti	243.546.140			
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Lakitan Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit	243.546.140			
Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Lakitan Desa Muara Nilau Kecamatan Selangit	243.546.140			
Normalisasi/Restorasi Sungai	1.949.969.800			
Normalisasi Sungai Apur Desa Sumber Jaya kecamatan Sumber Harta	199.990.000			
Normalisasi Sungai Betan Kecamatan Purwodadi	199.990.000			
Lanjutan Normalisasi Sungai Gadis	199.989.800			
Normalisasi Sungai Kali Merah Desa Madang Kecamatan Sumber Harta	500.000.000			
Normalisasi Sungai Tikip Desa Sukajaya Kecamatan Sumber Harta	450.000.000			
Normalisasi Sungai Desa G2 Dwijaya Kecamatan Tugumulyo	200.000.000			
Pembuatan Sodetan Sungai Tikip Dusun V Desa Jajaran Baru Kecamatan Megang Sakti	200.000.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	158.303.500	4.339.200,00	2,7	3,00
Dana Fasilitas Untuk Komisi Irigasi (KOMIR)	158.303.500			
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.111.916.896			
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	898.654.500			
Review Design DI Sukamana	349.000.000			
DED Daerah Irigasi Baru Lesing Kecil Megang Sakti	349.000.000			
Pembuatan UKL/UPL Daerah Irigasi (D.I) Baru Lesing Kecil Megang Sakti	200.654.500			
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	13.181.908.290	54.973.282	0,42	1,00
Rehabilitasi Jaringan Suplesi BKP.1 Desa Ngadirejo	229.200.000			
Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa T2 Purwakarya Kecamatan Purwodadi	229.200.000			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Sri Mulyo Kecamatan STL Ulu Terawas	229.200.000			
Rehabilitasi dan Normalisasi Saluran Suplesi Desa U1 Pagar Sari Kecamatan Purwodadi	229.200.000			
Pembangunan Saluran Irigasi Desa U2 Karyadadi Kecamatan Purwodadi	229.200.000			
Lnjutan Pembangunan Jalan Akses Menuju Bendung DI Sukaraya	254.609.147			
Rehabilitasi dan Peningkatan DI Air Gegas	254.609.147			
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Beliti Jaya Kec. Muara Kelingi	229.200.000			
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Pelita Jaya	229.200.000			
Pembangunan/Perbaikan Saluran Irigasi Tersier Desa Dwijaya Kecamatan Tugumulyo	229.200.000			
IPDMIP (Dana Hibah)	10.839.089.996			
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Tupak				
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kasang Tinggi				
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Ketuan Kecil/Bumi Agung				
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Megang Tikip				
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	17.175.000.000	2.547.962.003,00	14,84	10,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi (DAK)	5.320.000.000			
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Megang Sakti V				45,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Padurksa II				45,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sukamana				20,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sukarame				80,00
Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sukaraya				100,00
Biaya Penunjang/Operasional (DAK)	280.000.000			
Biaya Penunjang/Operasional (APBD)	75.000.000			
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran Pasangan Tersier BS.3 KN Kecamatan Tugumulyo	1.000.000.000			90,00
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran Pasangan Tersier BK 15 Kecamatan Tugumulyo	1.000.000.000			
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran Pasangan Tersier BK.8 Kecamatan Tugumulyo	1.250.000.000			
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran Pasangan Tersier BK.13 Kecamatan Tugumulyo	1.250.000.000			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran Pasangan Tersier BKB.6 Kecamatan Tugumulyo	1.000.000.000			
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran Pasangan Tersier BKB.5 Kecamatan Tugumulyo	1.250.000.000			79,56
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran Pasangan Tersier Megang Tikip Kanan Kecamatan Tugumulyo	750.000.000			
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran Pasangan Tersier Megang Tikip Kiri Kecamatan Purwodadi	1.000.000.000			
Rehabilitasi dan Peningkatan Saluran Pasangan Tersier D.I Deras I Kecamatan STL Ulu Terawas	1.000.000.000			100,00
Rehabilitasi dan Peningkatan Suplesi Sukakarya Kecamatan STL Ulu Terawas	1.000.000.000			
Rehabilitasi Bangunan Bendung PID Trikarya	500.000.000			
Lanjutan Pembuatan Saluran Pembuangan Irigasi Kelurahan O Mangunharjo	500.000.000			
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.656.321.000	780.937.500,00	47,15	20,00
Operasional Unit Pengelola Irigasi	200.033.106			
Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kelingi Tugumulyo	94.309.728			
Penyelenggaraan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Air Lakitan	105.723.378			
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9.617.740.900			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.617.740.900			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	416.043.200			
Pembuatan UKL/UPL SPAM IKK Sukakarya	208.021.600			
Pembuatan UKL/UPL SPAM IKK Muara Rengas	208.021.600			
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	500.626.000			
Pembangunan Ground Reservoir SPAM IKK Muara Beliti	500.626.000			
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.701.071.700	1.926.450.000,00	22,14	20,00
Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi SPAM IKK Karya Sakti di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi	400.384.350			
Pembangunan SPAM Perdesaan Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti	400.384.350			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Sumur Desa Pulau Panggung Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000			
Pembangunan Sumur Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka	200.000.000			
Pembangunan Sumur RT. 09, RT. 10 dan RT. 11 Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka	150.000.000			
Optimalisasi dan Pengembangan Jaringan Perpipaian SPAM IKK Sumber Harta	2.500.000.000			20,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum (Dana Alokasi Khusus/DAK)				
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kecamatan Megang Sakti, Desa Megang Sakti I-SPAM IKK Megang Sakti (Dana Alokasi Khusus/DAK)	988.000.000			20,00
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu, Desa Sukarejo-SPAM IKK Tugumulyo (Dana Alokasi Khusus/DAK)	988.000.000			30,00
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kecamatan Muara Kelingi, Desa Tugu Sempurna-SPAM IKK Karya Sakti (Dana Alokasi Khusus/DAK)	988.000.000			25,00
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kecamatan Muara Beliti, Desa Pedang-SPAM IKK Muara Beliti (Dana Alokasi Khusus/DAK)	988.000.000			20,00
Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Desa Muara Kati Baru I-SPAM IKK Tiang Pumpung Kepungut (Dana Alokasi Khusus/DAK)	812.500.000			20,00
Biaya Penunjang/Operasional Kegiatan DAK				
Pelaksanaan rapat koordinasi (Dana Alokasi Khusus/DAK)	8.101.000			
Pelaksanaan Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	28.000.000			
Biaya Penunjang/Operasional (APBD)	49.702.000			
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.152.834.160			
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.152.834.160			
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	74.999.460			
Penyelenggaraan UPT Pengelola Air Limbah Domestik Kabupaten Musi Rawas	74.999.460			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.077.834.700			
Pembangunan IPAL Kombinasi MCK Desa Sadu Kecamatan BTS Ulu	311.998.500			
Pembangunan IPAL Kombinasi MCK Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan	311.998.600			
Pembangunan IPAL Kombinasi MCK Desa Purwakarya Kecamatan Purwodadi	311.998.600			
DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi (DAK)				
Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK-Desa Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo (Dana Alokasi Khusus/DAK)	472.000.000			
Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK-Desa Suka Makmur Kecamatan BTS Ulu (Dana Alokasi Khusus /DAK)	467.000.000			
Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK-Desa Raksa Budi Kecamatan BTS Ulu (Dana Alokasi Khusus/DAK)	467.000.000			
Pengadaan truk tinja (Dana Alokasi Khusus/DAK)	580.000.000			
Biaya Penunjang/Operasional DAK				
Fasilitasi kegiatan DAK Fisik (Dana Alokasi Khusus/DAK)	75.000.000			
Pelaksanaan rapat koordinasi (Dana Alokasi Khusus/DAK)	9.099.000			
Pelaksanaan Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Dana Alokasi Khusus/DAK)	22.000.000			
Biaya Penunjang/Operasional Dana Alokasi Khusus/DAK (APBD)	49.740.000			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	18.366.245.995			
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18.366.245.995			
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	17.966.245.995	7.194.150,00	0,04	
Pembangunan Talud Desa Megang Sakti IV Kecamatan Megang Sakti	200.000.000			
Pembangunan Talud Desa Bamasco Kecamatan Buah Negeri	200.000.000			
Pembangunan Talud Desa Beliti Jaya Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000			
Pembangunan Talud Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta	200.000.000			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembangunan Talud Desa Bumi Rejo Kecamatan Jayaloka	400.000.000			
Pembangunan Talud Desa F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000			
Pembangunan Talud Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi	350.000.000			
Pembangunan Talud Desa Kali Bening Kecamatan Tugumulyo	200.000.000			
Pembangunan Talud Desa Leban Jaya Kecamatan Tuah Negeri	350.000.000			
Pembangunan Talud Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka	150.000.000			
Pemasangan KWh Meter Beserta Instalasi Rumah Untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Musi Rawas	154.000.000			
Pemasangan Jaringan SUTR Desa Pedang Kecamatan Muara Beliti	175.000.000			
Pemasangan Jaringan SUTR Desa Petunang Kecamatan Tuah Negeri	175.000.000			
Pemasangan Jaringan Listrik Desa Tri Mukti Kecamatan BTS Ulu	300.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Tri Mukti Kecamatan BTS Ulu	200.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Sembatu Jaya Kecamatan BTS Ulu	175.000.000			
Pemasangan SUTR dan LPJU Desa Kota Baru Kecamatan BTS Ulu	195.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Tambangan Kecamatan BTS Ulu	175.000.000			
Pemasangan Jaringan Listrik Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu	300.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Temuan Jaya Kecamatan Muara Kelingi	175.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi	175.000.000			
Pemasangan SUTR dan LPJU Desa Saten Indah Jaya Kecamatan Muara Beliti	200.000.000			
Pemasangan Jaringan SUTR Desa Tri Anggun Jaya Kecamatan Muara Lakitan	200.000.000			
Pemasangan SUTR dan LPJU Kelurahan B Srikaton Kecamatan Tugumulyo	170.000.000			
Pemasangan Jaringan SUTR Desa L Sidoharjo Kecamatan Tugumulyo	175.000.000			
Pemasangan LPJU Desa C Nawangsasi Kecamatan Tugumulyo	170.000.000			
Pemasangan Jaringan Listrik di Desa M Sitiharjo Kecamatan Tugumulyo-Pembayaran SPPH Kegiatan Tahun 2018	7.194.150			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemasangan SUTR dan LPJU Desa Q2 Wonorejo Kecamatan Tugumulyo	200.000.000			
Pemasangan LPJU Desa T2 Purwakarya Kecamatan Purwodadi	170.000.000			
Pemasangan Jaringan SUTR dan LPJU Desa Trikarya Kecamatan Purwodadi	200.000.000			
Pemasangan Jaringan Listrik Desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta	275.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Megang Sakti III Kecamatan Megang Sakti	170.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit	170.000.000			
Pemasangan SUTR dan LPJU Desa Taba Remanik Kecamatan Selangit	200.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Muara Nilau Kecamatan Selangit	170.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas	350.000.000			
Pemasangan Trafo dan SUTR Kelurahan Terawas Kecamatan STL Ulu Terawas	200.000.000			
Pemasangan SUTR dan LPJU Tenaga Surya Desa Muara Kati Baru I Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	250.000.000			
Pemasangan Instalasi Tenaga Surya Desa Suka Mulya Kecamatan Tuah Negeri	200.000.000			
Pemasangan PJU Tenaga Surya Desa Bumi Makmur Kecamatan Muara Lakitan	170.000.000			
Pemasangan PJU Tenaga Surya Desa Harapan Makmur Kecamatan Muara Lakitan	170.000.000			
Pemasangan PJU Tenaga Surya Desa Sindang Laya Kecamatan Muara Lakitan	170.000.000			
Pemasangan PJU Tenaga Surya Desa Mukti Karya Kecamatan Muara Lakitan	170.000.000			
Lanjutan Revitalisasi Taman Pada Median Jalan Poros Kawasan Perkantoran Pemkab Musi Rawas di Muara Beliti	300.000.000			
Lanjutan Rehabilitasi Masjid Agung Darussalam	300.000.000			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rest Area Masjid Agung Darussalam Muara Beliti	200.000.000			
Lanjutan Rehabilitasi Taman Simpang Tiga Kelurahan Muara Kelingi Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000			
Rehabilitasi Gapura Perbatasan Kabupaten Musi Rawas-Musi Banyuasin di Kecamatan Muara Lakitan	765.051.845			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Lanjutan Revitalisasi Alun-Alun Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	1.500.000.000			
Pemasangan Jaringan SUTR dan LPJU Desa Beliti Jaya Kecamatan Muara Kelingi	750.000.000			
Pemasangan Trafo dan SUTR Desa Lubuk Muda Kecamatan Muara Kelingi	500.000.000			
Pemasangan SUTR dan PJU Tenaga Surya Desa Ngesti Boga I Kecamatan Jayaloka	370.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya	135.000.000			
Pemasangan Jaringan Listrik Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas	300.000.000			
Pemasangan SUTR Desa Madang Kecamatan Sumber Harta	200.000.000			
Pemasangan SUTR Desa Sukarami Kecamatan Sumber Harta	150.000.000			
Pemasangan PJU Tenaga Surya Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka	100.000.000			
Pemasangan PJU Tenaga Surya Desa Ngesti Boga II Kecamatan Jayaloka	100.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Sumber Rejo Kecamatan Megang Sakti	50.000.000			
Pemasangan SUTR Desa Karya Mulya Kecamatan Megang Sakti	150.000.000			
Pemasangan SUTR Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti	150.000.000			
Pemasangan LPJU Desa Marga Tani Kecamatan Jayaloka	200.000.000			
Pemasangan PJU Tenaga Surya Desa Marga Tani Kecamatan Jayaloka	350.000.000			
Pemasangan SUTR dan PJU Tenaga Surya Desa Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti	370.000.000			
Pemasangan LPJU Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan	370.000.000			
Pembuatan Cor Beton Alun-Alun Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan	900.000.000			
Pembangunan Gapura Desa Sukorejo Kecamatan STL Ulu Terawas	300.000.000			
Pembangunan Gapura Desa Kebur Jaya Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	150.000.000			
Pemasangan PJU Tenaga Surya Desa A Widodo Kecamatan Tugumulyo	300.000.000			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	91.111.050	22,78	23,00
Pemeliharaan rutin kebersihan dikawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan sekitarnya	200.000.000			
Pemeliharaan rutin taman	200.000.000			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.787.618.195			
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	8.787.618.195			
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	49.999.900			
Operasional Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	49.999.900			
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6.787.662.950	60.274.500	0,89	5,00
Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Gedung Sekretariat Bersama Ormas Islam Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti	215.280.000			10,00
Pembangunan Gedung Asrama Pondok Pesantren Tahfidz Doa Ibu Sejati Desa Sungai Bunut Kecamatan BTS Ulu	400.000.000			
Pembangunan Gedung Universitas Musi Rawas di Muara Beliti	1.000.000.000			
Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Pengembangan Perkantoran Bupati Musi Rawas di Muara Beliti	422.382.950			10,00
Pembangunan Gedung Nahdhatul Ulama Kabupaten Musi Rawas	500.000.000			25,00
Pembangunan Gedung Muhammadiyah Kabupaten Musi Rawas	500.000.000			10,00
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Tegal Sari Kecamatan Megang Sakti	500.000.000			
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Marga Tani Kecamatan Jayaloka	850.000.000			
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan	750.000.000			
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Mangan Jaya Kecamatan Muara Kelingi	750.000.000			
Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Remayu Kecamatan Tuah Negeri	600.000.000			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	499.958.497	41.554.200,00	8,31	5,00
Lanjutan Rehabilitasi Asrama Mahasiswa Silampari di Kota Yogyakarta	200.000.000			5,00
Lanjutan Rehabilitasi Total Mess Pemkab Musi Rawas di Palembang (Tahap IV)	299.958.497			
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.449.996.848			
Lanjutan Rehabilitasi Balai Desa Ngesti Boga I Kec. Jayaloka	299.996.848			
Lanjutan Rehabilitasi Balai Desa Banpres Kecamatan Tuah Negeri	250.000.000			
Lanjutan Rehabilitasi Balai Desa Dusun 3 Gading Indah Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi	250.000.000			
Lanjutan Rehabilitasi Balai Desa Nawangsasi Kecamatan Tugumulyo	100.000.000			
Lanjutan Rehabilitasi Balai Desa F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo	100.000.000			
Rehabilitasi Balai Desa G2 Dwijaya Kecamatan Tugumulyo	250.000.000			
Rehabilitasi Balai Desa Tanjung Kecamatan Muara Kelingi	200.000.000			
Program Penyelenggaraan Jalan	449.994.804			
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	449.994.804			
Rehabilitasi Jalan	449.994.804			
Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Poros dan Jalan Lintas Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut ke Perbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang	149.994.804			
Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Poros dan Jalan Lintas Kecamatan STL Ulu Terawas ke Perbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara	150.000.000			
Revitalisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Poros Kelurahan O Mangunharjo ke Kecamatan Megang Sakti	150.000.000			
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	52.841.000			
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	52.841.000			
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	52.841.000			
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	842.912.300			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	150.000.100			
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	150.000.100			
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	199.996.800			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	99.999.000	20.213.400,00	20,21	22,00
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	99.997.800			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	342.915.000			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	342.915.000	20.213.400,0	5,89	6,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	150.000.400			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	50.000.000			
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.400			
JUMLAH	113.501.326.218	17.397.933.168	15,33	8,04

6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.6
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Belanja Langsung	51.434.422.610,00	2.410.317.641,00	5	24
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.087.984.292,00	2.030.153.131,00	40	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155.044.900,00	0,00	0	

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.844.900,00	0,00	0	50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	29.000.000,00	0,00	0	50
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29.000.000,00	0,00	0	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.200.000,00	0,00	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	21.200.000,00	0,00	0	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.800.000,00	0,00	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.352.004.664,00	1.665.591.209,00	50	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.178.644.664,00	1.603.365.209,00	50	42
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	173.360.000,00	62.226.000,00	36	42
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	0,00	0	50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	682.487.636,00	144.543.210,00	21	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.965.000,00	7.561.000,00	32	50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	272.000.000,00	70.110.000,00	26	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.719.236,00	5.052.110,00	30	38
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00	10.000.000,00	25	33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	329.803.400,00	51.820.100,00	16	33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	0,00	0	

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengadaan Mebel	150.000.000,00	0,00	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.447.092,00	185.040.492,00	38	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.620.000,00	7.500.000,00	28	33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.841.092,00	16.940.492,00	34	33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	406.986.000,00	160.600.000,00	39	33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000,00	34.978.220,00	13	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.000.000,00	34.978.220,00	33	29
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	0,00	0	20
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.000.000,00	0,00	0	10
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100.000.000,00	18.457.100,00	18	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000,00	18.457.100,00	18	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100.000.000,00	18.457.100,00	18	50
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.842.735.000,00	112.021.900,00	3	
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	680.000.000,00	112.021.900,00	16	
Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	680.000.000,00	112.021.900,00	16	20
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.162.735.000,00	0,00	0	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.162.735.000,00	0,00	0	20
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.787.500.100,00	30.910.800,00	1	

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	2.787.500.100,00	30.910.800,00	1	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	2.787.500.100,00	30.910.800,00	1	20
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	37.444.446.268,00	32.274.850,00	0	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	37.444.446.268,00	32.274.850,00	0	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	37.444.446.268,00	32.274.850,00	0	0
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	491.755.950,00	23.648.900,00	5	
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	491.755.950,00	23.648.900,00	5	
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	491.755.950,00	23.648.900,00	5	5
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.680.001.000,00	70.118.560,00	4	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1.680.001.000,00	70.118.560,00	4	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	1.680.001.000,00	70.118.560,00	4	10
JUMLAH	51434422610	2.410.317.641,00	0,05	24

7. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Tabel 2.7
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.066.600	19.966.600	99,50	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.189.500	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.064.200	5.900.000	29,41	29,41
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20.507.100	20.507.100	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20.140.400	5.900.000	29,29	29,29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.983.700	-	0,00	0,00
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.505.536.156	3.637.688.990	48,47	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.013.300	30.059.000	38,53	50,00
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.175.000	-	0,00	50,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.000.000	-	0,00	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	51.700.000	18.000.000	34,82	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.351.000	52.722.050	17,55	50,00
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.455.000	-	0,00	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.576.800	10.983.714	19,76	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.925.230.000	1.212.450.000	41,45	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.800.000	3.090.125	11,12	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.173.550	84.240.750	37,41	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.500.000	1.000.000	5,41	50,00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA				
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan Cegah dini, pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	533.653.950	374.003.600	70,08	50,00
Penindakan atas gangguan Ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	188.998.700	39.860.400	21,09	50,00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	93.407.700	14.486.000	15,51	50,00
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA				
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	128.105.550	6.678.100	5,21	50,00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEUANGAN				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PENCEGAHAN , PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten atau Kota	76.117.300	5.915.300	7,77	50,00
JUMLAH	12.371.745.506	5.543.451.729	44,81	46,03

8. Dinas Sosial

Tabel 2.8
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Sosial

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	15.025.533.608	3.362.665.792	22,38	27,04
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.420.351.008	2.082.436.632	47,11	37,88
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.031.800	70.714.050	45,03	51,43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.675.300	21.930.550	63,25	80,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.775.800	14.275.800	90,49	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.775.800	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.775.800	2.087.400	11,12	30,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.775.800	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.775.800	18.775.800	100,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.477.500	13.644.500	36,41	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.246.137.386	1.678.328.144	51,70	38,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.132.879.586	1.635.085.344	52,19	55,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	89.425.600	41.478.100	46,38	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23.832.200	1.764.700	7,40	10,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.076.800	692.400	7,63	8,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.076.800	692.400	7,63	8,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.744.000	-	0,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.744.000	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	267.337.100	71.080.200	26,59	37,75
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.236.400	2.514.400	59,35	60,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.265.300	515.300	0,88	1,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	61.782.200	33.374.300	54,02	55,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.053.200	34.676.200	24,24	35,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.500.000	31.500.000	100,00	100,00
Pengadaan Mebel	31.500.000	31.500.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.206.722	180.840.638	41,65	45,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	750.000	50,00	55,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.999.194	14.255.893	34,77	35,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.707.528	165.834.745	42,34	45,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.317.200	49.281.200	18,64	23
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.815.200	11.679.200	17,75	25,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	186.002.000	32.102.000	17,26	20,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.500.000	5.500.000	44,00	45,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	-	0,00	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	536.705.400	122.429.300	22,81	24
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	105.676.900	19.744.900	18,68	21
Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	67.724.300	9.874.300	14,58	15,00
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	37.952.600	9.870.600	26,01	27,00
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	431.028.500	102.684.400	23,82	26,67
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72.000.000	23.520.000	32,67	33,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	129.795.600	34.318.600	26,44	27,00
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	229.232.900	44.845.800	19,56	20,00
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	23.249.750	2.987.900	12,85	15,00
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.249.750	2.987.900	12,85	15,00
Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.249.750	2.987.900	12,85	15,00
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	849.373.000	312.798.660	36,83	39,50
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	849.373.000	312.798.660	36,83	39,50
Penyediaan Permakanan	76.437.100	37.851.060	49,52	55,00
Penyediaan Sandang	37.500.100		4,81	7,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
		1.804.300		
Penyediaan Alat Bantu	150.214.000	48.922.000	32,57	50,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	55.306.000	11.313.900	20,46	35,00
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	57.000.000	22.716.900	39,85	45,00
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	472.915.800	190.190.500	40,22	45,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.369.491.350	782.966.100	10,62	20
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	56.341.900	10.019.200	17,78	25
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	56.341.900	10.019.200	17,78	25
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.313.149.450	772.946.900	10,57	14
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	266.250.000	133.651.100	50,20	16
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.669.400.000	634.547.600	9,51	10
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	377.499.450	4.748.200	1,26	2
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.826.363.100	59.047.200	3,23	13
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.620.488.100	35.471.600	2,19	19
Penyediaan Makanan	1.572.220.500	18.700.000	1,19	2
Penyediaan Sandang	48.267.600	16.771.600	34,75	35
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	205.875.000	23.575.600	11,45	8
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	-	-	0,00	0
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	205.875.000	23.575.600	11,45	15
JUMLAH	15.025.533.608	3.362.665.792	22,38	27,04

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.9
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	4.312.000	14	33,3
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000	2.854.400	14	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000		0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	9.897.600	49	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.000.000		0	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	9.226.000	46	0,0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	6.792.950	23	6,9
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.778.033.980	1.559.340.779	41	100,0
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	102.840.000	19.520.000	19	0,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40.400.000		0	0,0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.391.200	13.641.200	52	0,0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.280.000		0	16,7
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	19.987.500	67	57,1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	50.000.000	100	100,0

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.298.000		0	0,0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.000.000	9.999.600	32	20,0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	10.000.000	33	33,3
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.000.000	84.179.600	35	21,4
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000		0	0,0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.982.220	28.368.693	28	16,7
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.440.500	341.618.400	63	46,4
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	73.087.000		0	0,0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.000		0	0,0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000		0	0,0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.551.250		0	0,0
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				
<i>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</i>				
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-		#DIV/0!	0,0
<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>				
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	31.442.600	12.706.600	40	0,0
<i>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	31.267.200	3.747.550	12	0,0
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				
Perluasan Kesempatan Kerja	1.000.000.000		0	0,0
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	43.500.000	10.802.500	25	0,0
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	64.314.000	8.475.050	13	0,0
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	54.994.000	25.156.650	46	0,0
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	47.599.900	26.660.400	56	5,0
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.599.950	20.651.750	43	0,0
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	38.299.700	15.335.600	40	0,0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				
Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	30.000.000		0	0,0
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman	32.861.000	18.726.400	57	0,0
	6.879.182.500	2.312.001.222	34	

10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.10
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				
Perencanaan, Pnganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.963.500	7.163.500	65,34	75,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.882.100	6.482.100	59,57	75,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.100.000		-	15,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.200.000		-	15,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.200.000		-	15,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.700.000		-	15,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.289.582.064	949.580.865	41,47	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51.780.000	24.780.000	47,86	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.300.000	2.000.000	21,51	25,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000		-	-
Penyediaan Bahan logistik Kantor	18.700.000	5.600.000	29,95	40,00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	3.665.000	2.500.000	68,21	75,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	15.000.000	9.960.000	66,40	80,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.961.000	19.647.400	18,20	25,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000		-	10,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.372.000	13.273.862	35,52	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.434.500	126.737.000	50,21	60,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.844.400	13.218.100	40,24	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.617.250	32.185.000	57,87	60,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	10.000.000	66,67	75,00
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	77.455.000	20.151.300	26,02	35,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan dukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000	100.000.000	50,00	60,00
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	113.900.000	46.942.100	41,21	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	76.122.000	22.160.000	29,11	35,00
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	363.803.000	24.853.200	6,83	10,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				
Pngumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	35.025.000		-	10,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK(PHA)				
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	141.658.000	17.676.900	12,48	15,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Plembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	106.081.100	-	-	10,00
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43.320.800	195.000	0,45	10,00
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Sinkronisasi pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	37.447.500	-	-	10,00
JUMLAH	4.152.214.214	1.455.106.327	35,04	42,98

11. Dinas Ketahanan Pangan

Tabel 2.11
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.427.921.664	2.203.812.656	49,77	56,65
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220.000.000,00	70.054.400	31,84	37,83
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	19.156.100	47,89	65,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.000.000,00	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.000.000,00	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.000.000,00	32.400.000	92,57	97,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	35.000.000,00	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	18.498.300	46,25	65,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.081.090.664,00	1.654.748.053	53,71	55,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.001.190.664,00	1.619.755.353	53,97	60,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.900.000,00	34.992.700	43,80	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	30.000.000,00	9.188.800	30,63	50,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000,00	9.188.800	30,63	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.131.000,00	33.400.000	85,35	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000,00	33.400.000	95,43	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.131.000,00	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	340.040.000,00	147.843.903	43,48	67,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	6.345.000	63,45	63,45
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	34.650.000	99,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	5.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.500.000,00	15.616.500	32,20	40,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.540.000,00	86.232.403	35,70	35,70
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	597.260.000,00	221.012.500	37,00	57,57
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.125.000,00	4.495.000	87,71	87,71
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.700.000,00	12.007.100	25,17	40,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.435.000,00	204.510.400	37,56	45,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.400.000,00	67.565.000	56,12	85,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	110.000.000,00	57.165.000	51,97	70,00
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.400.000,00	10.400.000	100,00	100,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	652.400.000,00	7.207.800	1,10	25,00
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	652.400.000,00	7.207.800	1,10	25,00
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	500.000.000,00	-	-	35,00
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	152.400.000,00	7.207.800	4,73	15,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.136.249.100,00	75.453.600	6,64	49,63
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	980.906.100,00	49.928.000	5,09	36,00
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	63.000.000,00	17.567.600	27,89	35,00
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	853.346.100,00	12.142.400	1,42	35,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	18.750.000,00	9.181.900	48,97	25,00
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	22.500.000,00	7.653.500	34,02	50,00
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	23.310.000,00	3.382.600	14,51	35,00
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	41.650.000,00	7.066.900	16,97	30,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan kabupaten/Kota	41.650.000,00	7.066.900	16,97	30,00
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	6.150.000,00	6.140.000	99,84	100,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	6.150.000,00	6.140.000	99,84	100,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	107.543.000,00	12.318.700	11,45	32,50
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	43.000.000,00	10.098.100	23,48	45,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	64.543.000,00	2.220.600	3,44	20,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	126.000.000,00	12.797.300	10,16	27,50
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	85.600.000,00	8.271.200	9,66	20,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	40.400.000,00	4.526.100	11,20	35,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	40.400.000,00	4.526.100	11,20	35,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	158.399.900,00	18.403.400	11,62	27,50
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	158.399.900,00	18.403.400	11,62	27,50
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	80.492.700,00	9.842.200	12,23	35,00
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.504.600,00	3.216.200	25,72	40,00
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	8.903.500,00	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	56.499.100,00	5.345.000	9,46	35,00
JUMLAH	6.500.970.664	2.317.674.756	35,65	37,26

12. Dinas Lingkungag Hidup

Tabel 2.12
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	()	()
1	2	3	4	5
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11.752.195.631	1.898.486.526		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA	7.113.018.031	1.898.486.526	19,20	24,15
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.300.000	7.289.700	11,70	12,20
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.700.000	1.767.700	10,59	15,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.800.000	1.911.600	14,93	20,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12.800.000	2.209.800	17,26	18,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	1.400.600	7,00	8,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.603.355.514	1.416.883.261	31,74	36,67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.524.050.514	1.395.138.561	39,59	45,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.805.000	19.622.300	27,33	30,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	7.500.000	2.122.400	28,30	35,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.423.600	0	0,00	5,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20.423.600		0,00	5,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.146.900	43.906.900	16,62	30,83

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	()	()
1	2	3	4	5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	5.000.000	50,00	55,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.805.200	5.134.000	32,48	35,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.248.600	12.773.500	78,61	80,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.200.000		0,00	5,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.893.100	20.999.400	9,96	10,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.845.417	164.534.565	37,75	38,33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	750.000	16,67	27,00
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	132.776.269	43.691.849	32,91	41,00
Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	298.569.148	120.092.716	40,22	47,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726.946.600	265.872.100	36,57	41,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	709.946.600	258.872.100	36,46	37,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000	7.000.000	41,18	45,00
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000	0	0,00	5,00
Peyanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000		0,00	5,00
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	0	0,00	0,00
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000		0,00	0,00
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	10.000.000		0,00	0,00
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.363.077.050	88.867.700	6,52	21,00
Pencegahan Pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	1.057.618.800		0,00	21,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan perencanaan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, air Udara dan laut	103.420.800	6.380.900	6,17	11,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	()	()
1	2	3	4	5
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	29.598.000		0,00	5,00
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	924.600.000		0,00	5,00
Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	38.599.600	16.043.700	41,56	43,00
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat	38.599.600	16.043.700	41,56	43,00
Pemulihan Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	266.858.650	50.399.400	18,89	20,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	266.858.650	50.399.400	18,89	20,00
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	271.944.000	106.250.000	39,07	62,50
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	271.944.000	106.250.000	39,07	62,50
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	145.184.000	55.250.000	38,06	40,00
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	126.760.000	51.000.000	40,23	45,00
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	24.077.500	6.997.500	29,06	30,00
Penyimpanan Sementara Limbah B3	24.077.500	6.997.500	29,06	30,00
Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan Administrasi dan Tekhnis Penyimpanan Sementara Limbah B3	24.077.500	6.997.500	29,06	30,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	66.196.800	5.226.500	7,90	20,00
Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66.196.800	5.226.500	7,90	20,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	()	()
1	2	3	4	5
Fasilitasi Pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan /atau Izin PPLH	9.996.800		0,00	10,00
Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	56.200.000	5.226.500	9,30	10,00
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	22.470.000	-	0,00	5,00
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	22.470.000	-	0,00	5,00
Koordinasi, Sinkronisasi penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak kearifan Lokal atau pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	22.470.000		0,00	5,00
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45.000.000	2.342.500	5,21	6,00
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	2.342.500	5,21	6,00
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	45.000.000	2.342.500	5,21	6,00
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	169.927.750	39.154.000	23,04	25,00
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.927.750	39.154.000	23,04	25,00
Penilaian Kinerja masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	169.927.750	39.154.000	23,04	25,00
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	22.495.000	0	0,00	15,00
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/kota	22.495.000	0	0,00	15,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	()	()
1	2	3	4	5
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/kota	22.495.000		0,00	15,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.643.989.500	259.970.700	27,09	42,75
Pengelolaan Sampah	2.643.989.500	259.970.700	27,09	30,00
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	453.321.100	6.543.100	1,44	12,75
Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	696.284.600	13.859.600	1,99	12,00
Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	515.910.000	222.870.000	43,20	45,00
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	15.436.000	13.660.200	88,50	89,00
Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	963.037.800	3.037.800	0,32	25,00
JUMLAH	11.752.195.631	2.407.295.426	20,48	25,14

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.13
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.689.808.104			
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>200.915.050</i>			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.037.450	10.890.000	25,30	30,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	68.220.000	-	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	10.238.800	-	-	60,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.942.400	-	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.942.400	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.938.800	-	-	60,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.595.200	-	-	60,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.643.294.884			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.560.244.884	1.196.505.648	46,73	46,73
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.850.000	36.030.000	52,33	52,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14.200.000	5.900.000	41,55	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.251.600			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.251.600	5.900.000	41,40	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	162.524.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	162.524.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.568.182.200			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	683.500.000	12.500.000	1,83	3,01
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.997.800	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.756.400	16.306.400	42,07	42,20
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	8.020.000	17,82	20,83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	784.928.000	127.669.200	16,27	20,33

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	937.815.870			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.750.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.969.830	31.714.891	34,86	33,33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	838.096.040	352.403.000	42,05	33,33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	162.824.500			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.824.500	19.498.074	15,37	37,50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.000.000	8.000.000	22,22	43,24
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	78.662.500			
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	75.148.500			
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	18.216.000	-	-	0,19
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56.932.500	9.156.200	16,08	19,07
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	3.514.000			
Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	3.514.000	-	-	-
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	75.069.800			
Pelayanan Pencatatan Sipil	75.069.800			
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	75.069.800	13.011.200	17,33	24,43
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	491.080.500			
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	71.761.000			
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	71.761.000	4.081.200	5,69	5,91
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	419.319.500			
Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	350.000.000	328.500.000	93,86	100,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	48.602.000	19.320.754	39,75	42,17
Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	20.717.500	23.000.000	111,02	100,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	-
Jumlah	6.334.620.904	2.228.406.567	35,18	45,38

14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.14
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.000.000	27.000.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.300.000	30.300.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	31.200.000	-	0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	24.300.000	24.300.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	24.300.000	-	0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	13.700.000	45,67	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.931.300	-	0,00	50,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.056.303.900	1.842.918.590	60,30	65,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	98.040.000	43.626.000	44,50	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	-	0,00	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	-	0,00	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0,00	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29.240.000	6.259.000	21,41	25,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		-		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	-	0,00	50,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	447.461.000	-	0,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	259.085.500	81.358.100	31,40	40,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.000.000	66,67	70,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.969.900	21.184.898	34,19	50,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.000.000	7.350.000	18,38	25,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.280.000	203.880.000	48,51	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.000.000	28.565.000	42,01	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	116.720.100	4.913.000	4,21	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.500.000	4.000.000	47,06	50,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.000.000	80.025.000	29,64	30,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENATAAN DESA				
Penyelenggaraan Penataan Desa				
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	25.529.000	11.948.900	46,81	50,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA				
Fasilitasi Kerjasama antar Desa				
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	42.364.500	22.318.000	52,68	60,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	10.000.000		0,00	25,00
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	83.527.000		0,00	25,00
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	2.502.000	1.976.600	79,00	100,00
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.714.323.050	1.129.745.800	65,90	75,00
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	13.941.000		0,00	50,00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.529.500	1.529.500	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	22.500.000		0,00	50,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.379.295.300	190.467.000	13,81	25,00
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	123.779.000	9.949.600	8,04	50,00
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	20.992.000	12.285.600	58,53	100,00
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	864.745.359	51.354.000	5,94	25,00
JUMLAH	9.423.159.409	3.867.954.588	41,05	54,34

15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.15
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	5.839.770.876	2.404.811.032	41,18	
Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.474.600	13.397.350	57,07	23,33
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.298.900	10.010.100	88,59	42,86
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.133.900	3.387.250	33,42	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.020.900	-	0,00	0,00
koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1.020.900	-	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.669.946.904	1.469.951.267	40,05	60,32
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.586.340.054	1.421.400.067	39,63	42,86
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	82.181.450	47.125.800	57,34	62,22
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	1.425.400	1.425.400	100,00	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.919.600	835.650	16,99	25,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD	4.919.600	835.650	16,99	25,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	84.607.800	66.738.950	78,88	50,67
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.503.000	6.342.300	84,53	88,24
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undang	25.926.800	11.228.050	43,31	50,21
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.140.000	49.168.600	96,15	97,37
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	2.011.575.472	835.392.715	41,53	45,25

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	430.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.776.500	13.025.665	34,48	41,67
Penyediaan Jasa Umum Kantor	1.973.368.972	822.367.050	41,67	45,93
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.246.500	18.495.100	40,88	44,00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	6.424.700	3.685.000	57,36	50,00
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	36.821.800	14.560.100	39,54	47,62
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2.000.000	250.000	12,50	22,22
Urusan Wajib				
Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana				
Program Pengendalian Penduduk	1.978.200	-	-	
Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	1.090.600	-	0,00	0,00
Pelaksanaan survei/pendataan Indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan	257.400	-	0,00	0,00
Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI, dan SLTP/MTS, Jalur nonformal dan informal	833.200	-	0,00	0,00
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	887.600	-	0,00	0,00
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	887.600	-	0,00	0,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	4.854.485.100	503.260.400	10,37	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.282.297.500	194.451.500	8,52	21,25
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	1.464.800	1.269.800	86,69	89,29
Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	482.700	-	0,00	0,00
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	84.448.000	-	0,00	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	2.094.050.000	175.033.000	8,36	11,90
Pengendalian Program KKBPK	101.852.000	18.148.700	17,82	20,00
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB PKB/PLKB)	956.953.000	298.956.900	31,24	36,91
Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk petugas Keluarga Berencana/penyuluh lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.753.000	456.900	26,06	32,14
Penggerakan Kader institusi masyarakat (IMP)	955.200.000	298.500.000	31,25	37,19
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	897.576.300	9.852.000	1,10	17,13
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringannya	63.855.000	-	0,00	0,00
Peningkatan Kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	783.793.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	2.000.000	-	0,00	0,00
Pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	477.600	-	0,00	0,00
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	47.450.700	9.852.000	20,76	27,10
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	717.658.300	-	0,00	0,00
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	715.904.000	-	0,00	0,00
Pembinaan Terpadu Kampung KB	1.754.300	-	0,00	0,00
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	894.691.400	3.692.600	0,41	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	894.691.400	3.692.600	0,41	9,69
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	275.500.000	-	0,00	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Orientasi/Pealtihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	784.200	584.200	74,50	80,36
Promosi dan Sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan konomi keluarga/ UPPKS)	4.007.600	3.108.400	77,56	80,00
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (mnenjadi orang tua hebat, Generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	611.600.000	-	0,00	0,00
Sosialisasi IPK	2.799.600			0,00
JUMLAH	11.590.925.576	2.911.764.032	25,12	30,43

16. Dinas Perhubungan

Tabel 2.16
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perhubungan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
<u>DANA APBD KABUPATEN</u>				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	7.100.000	47,33	40,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.000.000	6.091.100	87,02	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.000.000	5.300.000	75,71	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000	5.300.000	75,71	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.000.000	5.300.000	75,714286	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000			100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.163.693.690	1.942.843.592	46,66	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125.000.000	55.863.000	44,69	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.000.000			20,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.000.000			20,00
Administrasi Pegawai Perangkat Daerah				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	107.800.000			5,95
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.000.000	199.100.000	98,08	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000			57,14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	3.950.000	9,88	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.000.000	14.195.800	12,03	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	124.234.721	28.407.860	22,87	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	737.760.000	366.389.200	49,66	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000			
Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000			
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	-			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	-			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengelolaan Terminal Penumpang Type.C				
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	76.500.000	23.120.600	30,22	50,00
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	360.800.000	245.979.500	68,18	46,15
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.000.000			
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota				
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	70.000.000			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	183.000.000	54.300.000	29,67	42,00
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Agkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	520.000.000			4,00
JUMLAH	6.959.788.411	2.963.240.652	42,58	38,54

17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 2.17
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.494.605.056	2.318.849.898	51,59	64,59

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	41.645.100	46,27	66,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	10.886.200	72,57	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	9.772.400	65,15	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000	9.880.500	65,87	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	11.106.000	74,04	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000		0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000		0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.056.497.556	1.612.995.023	52,77	61,26
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.936.497.556	1.553.524.623	52,90	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000	42.595.400	42,60	48,08
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	16.875.000	84,38	85,71
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000	9.600.000	64,00	62,50
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	9.600.000	64,00	62,50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	114.000.000	111.756.500	98,03	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.000.000	79.200.000	99,00	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	34.000.000	32.556.500	95,75	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	491.107.500	143.350.700	29,19	62,13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.975.000	10.015.500	91,26	92,31
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	48.575.000	48,58	40,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	10.468.000	52,34	57,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	6.465.000	64,65	66,67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	15.140.000	75,70	66,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330.132.500	52.687.200	15,96	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	458.000.000	202.183.175	44,14	58,33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.500.000	75,00	75,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	39.083.175	39,08	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	356.000.000	161.600.000	45,39	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270.000.000	197.319.400	73,08	41,20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000	33.905.600	33,91	37,50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	14.000.000	70,00	44,44
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000	149.413.800	99,61	41,67
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.000.161.700	855.309.600	42,76	25,00
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.000.161.700	855.309.600	42,76	25,00
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	39.000.000		0,00	0,00
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	208.000.000	84.200.000	40,48	41,67
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	243.330.000	84.000.000	34,52	41,67
Pelayanan Informasi Publik	39.880.000		0,00	0,00
Layanan Hubungan Media	1.469.951.700	687.109.600	46,74	41,67
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-		0,00	0,00
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	-		0,00	0,00
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.142.563.300	56.552.386	2,64	25,00
Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.621.243.000	56.552.386	3,49	50,00
Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	-		0,00	0,00
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	133.000.000	25.941.000	19,50	50,00
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.488.243.000	30.611.386	2,06	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	521.320.300	-	0,00	0,00
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		0,00	0,00
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	56.000.000		0,00	0,00
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	-		0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	-		0,00	0,00
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	350.000.000		0,00	0,00
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	15.320.300		0,00	0,00
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	100.000.000		0,00	0,00
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	-		0,00	0,00
Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	-		0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	115.000.000	7.998.300	6,96	0,00
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	115.000.000	7.998.300	6,96	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	40.000.000	2.782.500	6,96	0,00
Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	40.000.000	5.215.800	13,04	0,00
Membangun Metadata Statistik Sektoral	35.000.000		0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	75.000.000	33.428.400	44,57	25,00
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	19.295.000	38,59	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	19.295.000	38,59	0,00
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	14.133.400	56,53	50,00
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	14.133.400	56,53	50,00
JUMLAH	8.827.330.056	3.272.138.584	37,07	27,92

18. Dinas Koperasi dan UKM

Tabel 2.18
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Koperasi dan UKM

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.940.819.812	1.897.189.521	48,14	63,58
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	98.098.600	39.312.200	40,07	66,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.597.200	13.597.200	81,92	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.420.000	18.420.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.093.500	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.971.900	-	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.192.500	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	15.823.500	7.295.000	46,10	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.255.161.036	1.610.855.168	49,49	52,78
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.180.332.836	1.583.897.068	49,80	58,33
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.956.500	21.658.100	36,74	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran	15.871.700	5.300.000	33,39	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0,00	0,00
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.287.600	75.687.500	31,24	66,32
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.479.100	2.430.900	44,37	66,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.750.000	25.450.000	98,83	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.725.000	6.050.000	29,19	57,14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.731.400	4.500.000	21,71	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.602.100	37.256.600	21,97	57,78
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	234.151.976	125.321.078	53,52	58,33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000	-	0,00	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36.286.560	10.781.078	29,71	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.065.416	114.540.000	58,42	75,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.120.600	46.013.575	41,41	61,11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.496.800	6.932.000	17,55	41,67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	53.623.800	31.581.575	58,89	83,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	18.000.000	7.500.000	41,67	58,33
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	105.000.000	27.782.776	26,46	43,33
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	105.000.000	27.782.776	26,46	43,33

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi	52.500.000	18.575.000	35,38	66,67
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan	52.500.000	9.207.776	17,54	20,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	103.299.900	32.571.515	31,53	41,11
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam	103.299.900	32.571.515	31,53	41,11
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP	42.000.000	5.997.665	14,28	22,22
Penghargaan Kesehatan KSP/USP	61.299.900	26.573.850	43,35	60,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	447.510.000	18.355.500	4,10	0,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	447.510.000	18.355.500	4,10	10,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	447.510.000	18.355.500	4,10	10,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	50.949.700	7.200.000	14,13	23,33
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.949.700	7.200.000	14,13	23,33
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	50.949.700	7.200.000	14,13	23,33
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.908.047.500	24.618.280	1,29	17,50
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.908.047.500	24.618.280	1,29	17,50
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	-	4.450.000	0,00	23,33

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	55.001.500	9.720.000	17,67	26,67
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro (DID)	1.795.000.000		0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	58.046.000	10.448.280	18,00	20,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	120.000.000	58.639.962	48,87	50,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	120.000.000	58.639.962	48,87	50,00
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	120.000.000	58.639.962	48,87	50,00
Jumlah	6.675.626.912	2.066.357.554	30,95	40,83

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 2.19
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</i>				
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.500.000	18.600.000	82,67	86,80
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.250.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.250.000	5.937.800	22,62	22,62

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.500.000	6.650.000	29,56	32,51
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	22.500.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.500.000	20.250.000	90,00	99,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	10.250.000	68,33	75,17
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.341.663.217	1.316.121.684	56,20	61,83
Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.713.000	57.580.800	48,50	53,35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000	17.899.850	44,75	49,22
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	11.136.200	37,12	40,83
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	64.060.000	21.231.556	33,14	36,46
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.950.000	14.980.000	83,45	91,80
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.000	16.500.000	76,74	84,42
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	6.142.853	30,71	33,79
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	17.344.000	69,38	76,31
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.000.000	1.165.600	3,07	3,37
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.727.600	64.948.237	36,75	40,43
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	17.000.000	17.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.847.000	31.186.215	29,74	32,72
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	6.900.000	46,00	50,60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	469.687.500	207.852.500	44,25	48,68
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.000.000	19.227.755	30,04	33,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000	6.068.416	43,35	47,68
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	13.500.000	45,00	49,50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.000.000	1.299.100	0,98	0,98
Program Pengembang Iklim Penanaman Modal				
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	90.000.000	25.124.216	27,92	30,71
Program Promosi Penanaman Modal				
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	93.484.500	75.900.100	81,19	89,31
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	194.825.000	17.781.010	9,13	10,04
Program Pelayanan Penanaman Modal				
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70.609.400	26.807.633	37,97	41,76
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	29.880.000	-	-	-
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	21.418.000	7.971.000	37,22	40,94
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	21.418.000	1.203.900	5,62	5,62
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	67.800.000	32.670.300	48,19	53,00
JUMLAH	4.487.083.217	2.097.230.725	46,74	51,41

20. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Tabel 2.20
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.092.150.668			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	5.201.155.068			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239.640.000	85.920.000	35,85	35,85
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	40.740.000	28.640.000	70,30	70,30
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	43.440.000	29.340.000	67,54	67,54
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA - SKPD	43.440.000	-	0,00	54,21
Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD	38.040.000	27.940.000	73,45	73,45
Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA - SKPD	38.040.000	-	0,00	0,00
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	29.940.000	-	0,00	0,00
Evaluasi kinerja perangkat daerah	6.000.000	-	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.433.539.918	1.598.486.048	46,56	46,56
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.248.225.618	1.567.162.148	48,25	48,25
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	136.967.200	30.179.600	22,03	22,03
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan/ semesteran SKPD	48.347.100	1.144.300	2,37	2,37
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.590.000	-	0,00	0,00
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	15.590.000	-	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.905.150	20.235.642	26,66	26,66
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75.905.150	20.235.642	26,66	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	642.055.000	358.106.208	55,78	55,78
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	10.000.000	2.498.500	24,99	24,99
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	308.240.000	308.230.000	100,00	100,00
Penyediaan bahan logistik kantor	11.280.000	2.796.250	24,79	24,79

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	79.835.000	10.078.700	12,62	12,62
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	232.700.000	34.502.758	14,83	14,83
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	103.740.000	103.690.000	99,95	99,95
Pengadaan Mebel	103.740.000	103.690.000	99,95	99,95
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	418.650.000	158.061.913	37,76	37,76
Penyediaan jasa surat menyurat	1.800.000	435.000	24,17	24,17
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	113.270.000	30.224.513	26,68	26,68
Penyediaan jasa layanan umum kantor	303.580.000	127.402.400	41,97	41,97
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	272.035.000	44.916.450	16,51	16,51
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	77.035.000	8.614.400	11,18	11,18
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	170.000.000	22.802.050	13,41	13,41
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25.000.000	13.500.000	54,00	54,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN.	1.338.547.450			
<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>	1.338.547.450	241.377.088	18,03	18,03
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda	50.500.750	2.910.000	5,76	5,76
Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kabupaten/kota	138.046.700	11.797.500	8,55	8,55
Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota	450.000.000	170.847.988	37,97	37,97

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan / atau berprestasi	-	-	0,00	0,00
Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan sukarelawan pemuda	-	-	0,00	0,00
Peyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	700.000.000	55.821.600	7,97	7,97
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kpemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00	0,00
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	-	-	0,00	0,00
Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi pemuda Kabupaten/Kota	-	-	0,00	0,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	7.552.448.150			
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.401.388.150	127.525.528	2,90	2,90
Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten/Kota	4.401.388.150	127.525.528	2,90	2,90
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.284.610.000	186.611.000	8,17	8,17
Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan singel event tingkat Kabupaten/Kota	113.310.000	-	0,00	0,00
Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan	2.171.300.000	186.611.000	8,59	8,59
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	700.000.000	552.898.200	78,99	78,99
Pemusatan latihan daerah, ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	200.000.000	52.898.200	26,45	26,45
Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi Kabupaten/Kota	500.000.000	500.000.000	100,00	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	166.450.000	48.870.000	29,36	29,36
Penyelenggaraan, pengembangan dan permasalahan festival dan olahraga rekreasi	166.450.000	48.870.000	29,36	29,36
JUMLAH	14.092.150.668	3.526.698.077	25,03	25,03

21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 2.21
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.158.950			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.620.750	11.116.350	56,66	60,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.675.450	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.703.100	8.277.800	46,76	60,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.934.900	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.294.600	5.150.000	29,78	30,00
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	14.808.800	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.121.350	4.234.450	28,00	29,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.997.507.456			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.919.919.456	1.282.829.648	43,93	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	77.588.000	35.749.400	46,08	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.708.750			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.345.000	3.239.000	44,10	50,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.500.000	140.470.000	92,72	93,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.768.750	33.067.000	40,94	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	57.200.000	8.100.000	14,16	35,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403.895.000	131.233.962	32,49	40,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.704.500			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	950.000	42,22	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	49.734.500	16.305.285	32,78	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.720.000	175.860.000	50,00	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.459.500			

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.859.500	37.742.600	27,99	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.600.000	12.105.000	49,21	50,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.799.600			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	82.629.500	1.850.000	2,24	20,00
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata kebudayaan	188.170.100	-	-	-
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam daerah Kabupaten/kota	371.826.000			
Pelindungan, Pengembangan, pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	279.121.900	38.738.000	13,88	13,88
Pembiayaan Sumber daya manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	92.704.100	82.350.000	88,83	90,00
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/kota	1.013.017.600			
Pembinaan Sumberdaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	1.013.017.600	499.699.750	49,33	50,00
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	93.121.000			
Perlindungan Cagar Budaya	93.121.000	15.189.900	16,31	50,00
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	344.784.800			
Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	344.784.800	200.974.000	58,29	70,00
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/kota	55.840.200			
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	55.840.200	9.166.100	16,41	30,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/Kota	1.134.220.000			
Pengembangan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	1.034.220.000	-	-	-
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	-	-	-
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	109.467.400			
Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	63.838.300	52.503.000	82,24	90,00
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	45.629.100	14.312.000	31,37	40,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	375.873.500			
Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	136.190.200	105.519.000	77,48	80,00
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	173.794.400	-	-	-
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi pariwisata Kabupaten /Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	65.888.900	15.886.200	24,11	30,00
JUMLAH	8.152.489.256	2.942.618.445	36,09	40,03

22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 2.22
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.705.765.176	1.720.538.456	1145	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72.893.100	48.213.500	66	57,85
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	15.904.400	15.204.400	95,60	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.561.900	13.861.900	95,19	99,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.669.000	-	0,00	10,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.336.900	12.636.900	94,75	99,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.310.300	-	0,00	35,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.240.300	6.510.300	79,01	80,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.870.300	-	0,00	30,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.632.286.596	1.448.633.811	55,03	33,33
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.547.999.096	1.412.795.211	55,45	45,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.648.600	35.838.600	47,38	65,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	8.638.900	-	0,00	30,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.738.300	3.600.000	46,52	65,19
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.738.300	3.600.000	46,52	30,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82.833.100	-	0,00	30,59
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	82.833.100	-	0,00	20,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.278.340	58.430.640	15,24	0,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.817.340	22.817.340	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.500.000	-	0,00	20,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.361.000	2.361.000	100,00	20,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.070.000	3.570.000	55,88	40,00
Penyediaan Bahan dan Peraturan Perundang-undangan	10.519.400	4.386.600	0,00	10,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Komsultasi SKPD	256.010.600	25.295.700	9,88	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.003.000	-	0,00	15,00
Pengadaan Mebel	29.003.000	-	0,00	25,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.068.290	100.553.105	33,96	0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.420.000	-	0,00	20,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	28.090.610	9.005.425	23,00	35,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.557.400	2.907.400	46,6	40,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	247.000.280	88.640.280	35,89	40,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.664.450	61.107.400	33,06	40,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.212.650	33.130.000	33,06	45,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	92.701.800	27.977.400	0,00	45,00
Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Mesin lainnya	8.750.000	-	0,00	30,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	10.558.545.800	2.096.534.024		
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	370.701.300	58.390.400	15,75	60,00
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.553.700	34.271.900	61,69	55,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.150.500	24.118.500	70,62	60,00
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	177.401.100	-	0,00	20,00
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	103.596.000	-	0,00	20,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.187.844.500	2.038.143.624	20,01	30,00
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000.000	2.005.318.125	20,05	35,00
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	48.670.900	26.458.899	54,36	60,00
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	139.173.600	6.366.600	4,57	35,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	8.450.000	-		
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.450.000	-	0,00	15,00
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya etnis nusantara	8.450.000	-	0,00	15,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	286.553.800	74.910.600	5,37	
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	57.970.000	3.115.500	5,37	45,00
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	57.970.000	3.115.500	5,37	40,00
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	71.313.500	7.095.100	9,95	45,00
Akuisi, Pengelolaan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	71.313.500	7.095.100	9,95	45,00
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	157.270.300	64.700.000	41,14	35,00
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	157.270.300	64.700.000	41,14	40,00
	14.559.314.776	3.817.072.480	26,22	55,00

23. Dinas Perikanan

Tabel 2.23
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perikanan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.002.800	4.113.200	8,39	8,39
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.001.800	1.005.000	5,29	5,29
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	19.002.700	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.004.000	18.004.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.002.100	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.004.000	16.754.000	83,75	83,75
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.001.900	2.501.900	25,01	25,01

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.071.459.102	1.856.575.244	45,60	45,60
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.680.000	23.150.000	27,02	27,02
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.001.600	-	0,00	0,00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.001.300	2.351.300	18,09	18,09
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79.800.000	-	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	31.330.400	152.900	0,49	0,49
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.002.500	5.502.500	55,01	55,01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.690.300	15.090.300	40,04	40,04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.868.000	5.868.000	100,00	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.998.000	2.490.000	49,82	49,82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12.147.000	4.977.200	40,97	40,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.703.500	53.809.900	24,49	24,49
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	19.704.500	-	0,00	0,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.999.159	21.208.138	42,42	42,42
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.177.860	149.258.560	50,74	50,74
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.608.800	22.773.275	45,91	45,91
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.800.000	4.500.000	45,92	45,92

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.439.300	-	0,00	0,00
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	40.000.000	10.684.600	26,71	26,71
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	103.000.000	6.700.700	6,51	6,51
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	40.000.000	2.937.700	7,34	7,34
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	40.000.000	3.272.200	8,18	8,18
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau tenaga Kerja Asing	40.000.000	13.539.000	33,85	33,85
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1.272.134.000	17.257.600	1,36	1,36
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	153.247.000	4.328.500	2,82	2,82
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	8.734.321	17,47	17,47
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	40.000.000	10.329.100	25,82	25,82

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	993.243.600	3.297.000	0,33	0,33
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	3.505.000	5,84	5,84
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.020	6.579.100	18,80	18,80
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	29.999.850	236.100	0,79	0,79
<i>Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil perikanan</i>				
<i>Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</i>				
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	7.730.000	51,53	51,53
<i>Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	30.000.000	6.072.000	20,24	20,24
<i>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota</i>				
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	901.149.000	6.049.000	0,67	0,67
JUMLAH	9.054.204.091	2.321.337.338	25,64	25,64

24. Dinas Pertanian dan Peternakan

Tabel 2.24
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.008.526.926			
Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Pertingkat Daerah	253.163.700			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.239.150	8.703.400	34,48	55,40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.300.000	9.250.000	45,57	90,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.300.000	-	-	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.600.000	10.150.000	49,27	90,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.435.000	-	-	2,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.804.500	13.567.100	15,45	20,86
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.485.050	7.408.900	12,67	15,75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.473.127.068			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.333.985.068	2.269.876.376	52,37	52,37
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	124.582.500	42.861.700	34,40	39,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14.559.500	1.917.700	13,17	25,62
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.259.500			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.259.500	5.106.700	26,52	31,78
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.640.000			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	22.640.000	-	-	2,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.861.650			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.156.400	5.232.000,00	51,51	51,51
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.388.700	27.840.000	91,61	91,61
Penyediaan bahan Logistik Kantor	41.441.800	18.257.100	44,05	44,05
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	11.050.650	4.913.150	44,46	44,46
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	43.960.100	19.230.100	43,74	43,74

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.864.000	52.479.000	26,39	29,34
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.572.800			
Pengadaan Mebel	31.572.800	10.210.100	32,34	32,34
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.386.408			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.762.000	6.149.500	48,19	48,19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.215.856	18.322.115	32,02	49,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.408.552	248.121.393	49,19	49,19
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.515.800			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.318.600	27.473.500	17,80	17,80
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	121.197.200	38.817.360	32,03	32,03
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000	9.100.000	39,57	47,39
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	776.944.400			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	29.736.800			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik lokasi	29.736.800	-	-	2,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan,dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	747.207.600			
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	747.207.600	44.684.100	5,98	5,98
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.784.694.565			
Pengembangan Prasarana Pertanian	227.786.500			
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	227.786.500	48.843.700	21,44	21,44
Pembangunan Prasarana Pertanian	4.556.908.065			
Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.056.908.065	12.837.600	0,32	1,00
Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	500.000.000	-	-	2,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	117.892.200			
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	117.892.200			
Pengendalian Organisasi Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0	-	-	-
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	117.892.200	16.854.650	14,30	14,30
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	106.534.000			
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	106.534.000			
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	106.534.000	38.880.100	36,50	36,50
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	65.307.350			
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	65.307.350			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa	41.331.200	-	-	2,00
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	23.976.150		-	2,00
JUMLAH	11.859.899.441	3.017.087.344	25,44	31,26

25. Dinas Perkebunan

Tabel 2.25
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perkebunan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.008.526.926			
Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Pertangkat Daerah	253.163.700			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.239.150	8.703.400	34,48	55,40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.300.000	9.250.000	45,57	90,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	20.300.000	-		0

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Perubahan RKA-SKPD			-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.600.000	10.150.000	49,27	90,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	20.435.000	-	-	2,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	87.804.500	13.567.100	15,45	20,86
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.485.050	7.408.900	12,67	15,75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.473.127.068			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.333.985.068	2.269.876.376	52,37	52,37
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	124.582.500	42.861.700	34,40	39,73
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14.559.500	1.917.700	13,17	25,62
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.259.500			
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.259.500	5.106.700	26,52	31,78
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.640.000			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	22.640.000	-	-	2,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.861.650			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.156.400	5.232.000,00	51,51	51,51
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.388.700	27.840.000	91,61	91,61
Penyediaan bahan Logistik Kantor	41.441.800	18.257.100	44,05	44,05
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	11.050.650	4.913.150	44,46	44,46
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	43.960.100	19.230.100	43,74	43,74
Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	198.864.000	52.479.000	26,39	29,34
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.572.800			
Pengadaan Mebel	31.572.800	10.210.100	32,34	32,34
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.386.408			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.762.000	6.149.500	48,19	48,19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.215.856	18.322.115	32,02	49,80
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.408.552	248.121.393	49,19	49,19

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.515.800			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.318.600	27.473.500	17,80	17,80
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	121.197.200	38.817.360	32,03	32,03
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.000.000	9.100.000	39,57	47,39
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	776.944.400			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	29.736.800			
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik lokasi	29.736.800	-	-	2,00
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan,dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	747.207.600			
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	747.207.600	44.684.100	5,98	5,98
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.784.694.565			
Pengembangan Prasarana Pertanian	227.786.500			
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	227.786.500	48.843.700	21,44	21,44
Pembangunan Prasarana Pertanian	4.556.908.065			
Pembangunan , Rehabilitas dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.056.908.065	12.837.600	0,32	1,00
Pembangunan, Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	500.000.000	-	-	2,00
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	117.892.200			
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	117.892.200			
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	117.892.200	16.854.650	14,30	14,30

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	106.534.000			
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	106.534.000			
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	106.534.000	38.880.100	36,50	36,50
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	65.307.350			
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	65.307.350			
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa	41.331.200	-	-	2,00
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	23.976.150		-	2,00
JUMLAH	11.859.899.441	3.017.087.344	25,44	31,26

26. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 2.26
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.884.676.613	2.546.446.790	43,27	0,00
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115.580.050	29.476.000	25,50	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.761.750	8.437.300	21,77	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.944.900	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.944.900	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	13.944.900	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	13.944.900	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.479.800	12.479.800	100,00	100,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.558.900	8.558.900	100,00	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.987.050.732	1.902.874.977	47,73	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.886.762.132	1.867.772.027	48,05	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85.293.800	32.773.550	38,42	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	14.994.800	2.329.400	15,53	33,33
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.990.600	2.567.800	17,13	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.990.600	2.567.800	17,13	50,00
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	24.665.900	6.115.900	24,79	0,00
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	24.665.900	6.115.900	24,79	25,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	144.658.500	52.558.000	36,33	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	94.658.500	2.558.000	2,70	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.075.200	166.406.290	32,62	0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.302.200	7.616.000	49,77	60,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.550.000	11.550.000	14,16	60,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.310.000	7.189.000	46,96	50,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.189.900	12.530.000	28,35	50,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	78.768.500	22.336.400	28,36	50,00
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.954.600	105.184.890	38,26	44,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.095.300	801.600	0,67	0,00
Pengadaan Mebel	120.095.300	801.600	0,67	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	657.003.131	346.327.923	52,71	0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	750.000	50,00	27,27
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.940.955	19.180.315	38,41	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	605.562.176	326.397.608	53,90	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.557.200	39.318.300	12,66	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	133.818.000	24.918.300	18,62	44,44
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	14.400.000	57,60	60,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.739.200	-	0,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7.108.104.620	135.987.782	1,91	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.538.115.114	4.230.900	0,06	0,00
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.538.115.114	4.230.900	0,06	0,00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	6.499.998.814	-	0,00	50,00
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	38.116.300	4.230.900	11,10	37,50
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	218.229.650	47.736.700	21,87	0,00
Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	218.229.650	47.736.700	21,87	0,00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	46.052.750	14.396.200	31,26	50,00
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	172.176.900	33.340.500	19,36	100,00
Program Pengembangan Ekspor	171.659.481	-	0,00	0,00
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Kabupaten/Kota	171.659.481	-	0,00	0,00
Pameran Dagang Nasional	171.659.481	-	0,00	0,00
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	180.100.375	84.020.182	46,65	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	180.100.375	84.020.182	46,65	0,00
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	110.409.000	52.770.682	47,80	50,00
Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	69.691.375	31.249.500	44,84	50,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	200.380.500	-	0,00	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	200.380.500	-	0,00	0,00
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	200.380.500	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan Dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	100.380.500	-	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100.000.000	-	0,00	0,00
TOTAL	13.193.161.733	2.682.434.572	20,33	46,90

27. Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.27
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Musi Rawas

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.200.000	95.598.850	31,02	31,02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.000.000	65.756.100	41,10	41,10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.900.000	5.247.300	16,98	16,98
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.800.000	2.082.700	7,77	7,77

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.300.000	2.192.100	9,41	9,41
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	22.800.000	2.292.150	10,05	10,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.400.000	15.298.600	71,49	71,49
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000	2.729.900	11,87	11,87
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.696.910.074	8.206.831.807	46,37	46,37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.035.556.074	7.977.630.857	46,83	46,83
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	576.800.000	204.931.650	35,53	35,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	84.554.000	24.269.300	28,70	28,70
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.800.000	23.491.800	31,41	31,41
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.800.000	23.491.800	31,41	31,41
JUMLAH	18.079.910.074	8.325.922.457	46,05	46,05

28. Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

Tabel 2.28
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Administrasi Tata Pemerintahan				
Penataan Administrasi Pemerintahan	424.750.000	258.144.900	60,78	58,67
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	412.500.000	144.305.700	34,98	36,25
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	490.760.000	101.534.900	20,69	37,67
Fasilitasi Kerja Sama Daerah				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	98.750.000	46.831.700	47,42	75
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	55.000.000	7.060.000	12,84	65
Jumlah	1.481.760.000	557.877.200	37,65	46,79

29. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Tabel 2.29
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA				
Pelaksana Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-		
Fasilitasi Keprotokolan	2.498.730.000	506.707.484	20,28	20,28
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	466.189.000	82.734.438	17,75	17,75
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	815.081.000	207.099.350	25,41	25,41
JUMLAH	3.780.000.000	796.541.272	21,07	21,07

30. Bagian Organisasi Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.30
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Bagian Organisasi

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	252.074.000	42.273.700	16,77	30,00
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	142.130.900	35.521.200	24,99	35
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	210.076.000	22.615.600	10,77	37,5
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatalaksana	81.956.900	25.898.600	31,60	35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	63.734.500	15.258.800	23,94	75
JUMLAH	749.972.300	141.567.900	18,88	42,50

31. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.31
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Musi Rawas

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Administrasi Tata Pemerintahan				
Penataan Administrasi Pemerintahan	424.750.000	258.144.900	60,78	60,78
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	412.500.000	144.305.700	34,98	34,98
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	490.760.000	101.534.900	20,69	20,69
Fasilitasi Kerja Sama Daerah				
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	98.750.000	46.831.700	47,42	47,42
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	55.000.000	7.060.000	12,84	12,84
JUMLAH	1.481.760.000	557.877.200	37,65	37,65

32. Bagian Perencanaan Keuangan Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.32
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Perencanaan Keuangan Setda Kab. Musi Rawas

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.200.000	95.598.850	31,02	31,02
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.000.000	65.756.100	41,10	41,10
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.900.000	5.247.300	16,98	16,98
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.800.000	2.082.700	7,77	7,77
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	23.300.000	2.192.100	9,41	9,41
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	22.800.000	2.292.150	10,05	10,05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.400.000	15.298.600	71,49	71,49
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000	2.729.900	11,87	11,87
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.696.910.074	8.206.831.807	46,37	46,37
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.035.556.074	7.977.630.857	46,83	46,83
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	576.800.000	204.931.650	35,53	35,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	84.554.000	24.269.300	28,70	28,70
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.800.000	23.491.800	31,41	31,41
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.800.000	23.491.800	31,41	31,41
JUMLAH	18.079.910.074	8.325.922.457	46,05	46,05

33. Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.33
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.321.488.000	313.619.000	23,73	27,95
Sub Kegiatan :				
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	277.749.000	77.463.000	27,89	9,32
Fasilitasi Bantuan Hukum	612.389.000	72.332.000	11,81	9,32
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	431.350.000	163.824.000	37,98	9,32
JUMLAH	1.321.488.000	313.619.000	23,73	27,95

34. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.34
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Musi Rawas

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
KEGIATAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				
SUB KEGIATAN:				
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	167.400.000	54.467.600	32,54	32,54
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	168.750.000	65.557.400	38,85	38,85
Pengelola Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	168.750.000	57.160.000	33,87	33,87
JUMLAH	504.900.000	177.185.000	35,09	35,09

35. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.35
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Musi Rawas

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	638.538.800	75.111.900	11,76	11,76
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	270.498.000	49.035.500	18,13	18,13
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200.000.000	65.778.800	32,89	32,89
JUMLAH	1.109.036.800	189.926.200	17,13	17,13

36. Bagian Umum Setda Kab. Musi Rawas

Tabel 2.36
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Bagian Umum Setda Kab. Musi Rawas

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.850.000			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	196.350.000	193.655.000	98,63	99
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.500.000	-	0,00	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.688.085.310			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	161.500.000	58.515.000	36,23	43
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	938.460.000	177.700.000	18,94	20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.840.510	50.470.000	39,79	40
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.255.000	-	0,00	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	513.077.800	284.880.000	55,52	56

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Fasilitasi Kunjungan Tamu	249.040.000	80.300.000	32,24	32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.628.912.000	187.569.700	11,52	11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.945.702.000			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.600.000.000	-	0,00	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.037.892.000	-	0,00	0
Pengadaan Mebel	307.810.000	-	0,00	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.591.009.800			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.544.800	4.740.000	41,06	50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.476.275.000	436.183.456	29,55	39
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	855.950.000	340.650.000	39,80	40
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.247.240.000	1.710.160.000	32,59	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.769.042.450			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	967.625.850	442.550.925	45,74	47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.419.781.200	405.550.350	28,56	28
Pemeliharaan Mebel	159.472.200	32.800.000	20,57	20
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	628.500.000	261.250.000	41,57	41
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	-	0,00	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	443.663.200	102.484.000	23,10	23
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	969.365.280			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	199.965.280	80.959.692	40,49	42
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	109.400.000	99.600.000	91,04	92

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000	-	0,00	0
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	289.910.000	48,32	50
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.065.400.000			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.626.700.000	1.159.884.000	31,98	32,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	908.600.000	338.520.000	37,26	37
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	530.100.000	214.095.000	40,39	41,00
Jumlah	25.241.454.840	6.952.427.123	27,54	33,9

37. Sekretariat DPRD

Tabel 2.37
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.176.231.160	19.093.384.257	38,05	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	700.000	0	0,00	14,29
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.863.837.731	2.253.927.078	46,34	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000	0	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.178.600	0	0,00	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.708.338.700	247.354.500	14,48	50,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.811.880.000	0	0,00	50,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.065.195.970	517.308.575	25,05	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.332.000	148.260.000	9,53	50,00
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	300.000	0	0,00	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34.128.846.759	15.055.444.104	44,11	50,00
Layanan Administrasi DPRD	2.758.521.400	871.090.000	31,58	50,00
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	45.485.409.600	11.681.264.908	25,68	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	8.219.844.700	0	0,00	50,00
Pembahasan Kebijakan Anggaran	16.951.741.000	646.335.400	3,81	50,00
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3.886.626.000	1.559.424.000	40,12	12,50
Peningkatan Kapasitas DPRD	5.717.786.800	1.393.985.298	24,38	50,00
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2.284.262.400	684.913.200	29,98	50,00
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	0	0	0,00	0,00
Pembahasan Kerja Sama Daerah	0	0	0,00	0,00
Fasilitasi Tugas DPRD	8.425.148.700	7.396.607.010	87,79	50,00
JUMLAH	95.661.640.760	30.774.649.165	32,17	28,13

38. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 2.38
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.284.673.950	2.352.972.795	44,52	44,68
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.084.050	5.855.000	2,61	32,33
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.355.300	1.775.000	2,85	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.442.000	-	0,00	52,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	21.731.550	3.000.000	13,80	28,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19.726.600	300.000	1,52	45,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	19.365.500	-	0,00	20,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78.463.100	780.000	0,99	24,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.770.514.300	1.985.264.392	52,65	57,67
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.627.146.100	1.922.165.192	52,99	62,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	111.189.700	50.699.200	45,60	58,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	32.178.500	12.400.000	38,54	53,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.870.000	6.123.800	38,59	56,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.870.000	6.123.800	38,59	56,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	108.000.000	-	0,00	63,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.000.000	-	0,00	35,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	-	0,00	28,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	445.097.500	86.904.417	19,52	57,17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.300.000	6.126.000	59,48	68,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.500.000	-	0,00	28,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.479.000	6.541.000	56,98	63,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.414.800	13.414.700	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	111.000.000	3.000.000	2,70	41,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.403.700	57.822.717	22,82	43,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.390.000	-	0,00	8,67
Pengadaan Mebel	-	-	0,00	0,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.390.000	-	0,00	26,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	528.608.100	247.491.861	46,82	51,33
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.650.000	1.330.000	50,19	57,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.210.200	27.948.561	32,42	43,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.747.900	218.213.300	49,62	54,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.110.000	21.333.325	12,05	31,25
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.730.000	12.930.000	12,11	38,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.380.000	1.903.325	3,44	42,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	6.500.000	43,33	45,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	0,00	0,00
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	970.352.500	246.748.292	25,43	67,97
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	618.421.900	130.179.992	21,05	79,40
Pelaksanaan Konsultasi Publik	55.448.400	34.817.400	62,79	100,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	24.516.000	20.931.000	85,38	100,00
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	237.527.300	54.569.592	22,97	65,00
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	17.718.700	17.718.700	100,00	100,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	283.211.500	2.143.300	0,76	32,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	188.671.400	79.800.000	42,30	60,00
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	188.671.400	79.800.000	42,30	60,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	163.259.200	36.768.300	22,52	64,50
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	66.666.800	36.768.300	55,15	100,00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	96.592.400	-	0,00	29,00
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.636.699.050	217.510.248	13,29	37,38
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	461.250.000	50.495.400	10,95	31,50
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJP, RPJMD dan RKPD)	16.432.000	1.980.000	12,05	28,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	6.818.150	13,64	30,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	50.000.000	7.820.000	15,64	33,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	96.750.000	15.044.400	15,55	38,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJP, RPJMD dan RKPD)	35.587.000	5.824.350	16,37	32,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.000.000	8.773.250	17,55	38,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	65.731.000	-	0,00	20,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	96.750.000	4.235.250	4,38	33,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	422.182.750	38.748.271	9,18	29,25
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJP, RPJMD dan RKPD)	30.273.050	4.715.500	15,58	34,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.000.000	1.149.900	5,75	31,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	52.000.000	5.283.750	10,16	28,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	75.300.000	12.021.021	15,96	26,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJP, RPJMD dan RKPD)	53.700.000	7.112.100	13,24	30,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50.000.000	3.046.900	6,09	25,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50.000.000	195.000	0,39	28,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	90.909.700	5.224.100	5,75	32,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	753.266.300	128.266.577	17,03	51,38
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJP, RPJMD dan RKPD)	120.000.000	43.633.100	36,36	72,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	258.266.300	31.469.200	12,18	48,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.000.000	1.015.000	3,38	62,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	90.000.000	14.939.074	16,60	62,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJP, RPJMD dan RKPD)	-	-	0,00	0,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	115.000.000	6.601.700	5,74	45,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusutan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	50.000.000	7.386.800	14,77	60,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	90.000.000	23.221.703	25,80	62,00
JUMLAH	7.891.725.500	2.817.231.335	35,70	50,01

39. Badan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.39
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Penelitian dan Pengembangan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.725.755.062	1.545.439.947	32,70	76,08
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.683.004.562	1.498.817.247	40,70	39,31
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.855.700	1.200.000	1,94	68,24
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.982.800	600.000	5,01	40,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.543.600	600.000	6,29	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.243.600	0	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.142.400	0	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.082.400	0	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.914.900	0	0,00	80,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.946.000	0	0,00	80,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.796.157.512	1.301.512.612	46,55	49,39
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.711.258.662	1.269.162.612	46,81	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	76.138.000	32.350.000	42,49	30,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.760.850	0	0,00	30,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.399.900	0	0,00	0,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.399.900	0	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	407.411.700	58.512.600	14,36	1,90
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.530.200	0	0,00	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.150.000	6.000.000	65,57	85,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.206.000	3.500.000	11,98	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.899.500	0	0,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	337.626.000	49.012.600	14,52	20,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.767.500	123.624.785	35,86	3,64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.575.000	0	0,00	40,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	134.163.600	32.853.785	24,49	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	209.028.900	90.771.000	43,43	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.412.250	13.967.250	23,51	6,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.878.900	9.904.350	30,12	10,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.533.350	4.062.900	20,80	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	0	0,00	10,00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.042.750.500	46.622.700	4,47	36,78
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	757.752.400	46.622.700	6,15	28,70
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100.000.000	16.930.800	16,93	20,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	174.988.400	11.109.700	6,35	10,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	79.973.400	0	0,00	25,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	0	0	0,00	0,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	156.435.700	0	0,00	40,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	54.963.100	0	0,00	55,00
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan	121.391.800	0	0,00	15,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan				
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	70.000.000	18.582.200	26,55	70,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0	0	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	0	0	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	59.995.400	0	0,00	10,00
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	59.995.400	0	0,00	10,00
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	0	0,00	0,00
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	0	0	0,00	0,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	225.002.700	0	0,00	71,11
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0	0	0,00	0,00
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	100.002.200	0	0,00	60,00
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	125.000.500	0	0,00	80,00
JUMLAH	4.725.755.062	1.545.439.947	32,70	76,08

40. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.40
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
KEUANGAN	336.226.861.505		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.834.580.971		-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.750.000		-	
Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	28.750.000		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	10.000.000		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	10.000.000	3.250.000	32,50	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	5.000.000	0	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	5.000.000		-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	7.100.000	35,50	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.408.955.771		-	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.072.755.771	8.819.843.555	38,23	57,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	316.000.000	129.800.000	41,08	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20.200.000		-	42,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.900.000		-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.900.000	3.000.000	14,35	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.000.000		-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.000.000		-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.936.000		-	

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	5.347.500	48,61	75,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.870.000	8.674.500	29,04	50,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.065.000	17.435.700	57,99	50,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.000.000	19.703.850	33,97	50,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	30.000.000	7.380.000	24,60	50,00
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.001.000	21.047.380	21,05	50,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000		-	
Pengadaan Mebel	50.000.000		-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	794.935.500		-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.530.000	2.840.000	43,49	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	149.025.500	54.832.793	36,79	50,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	8.925.000	29,75	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	609.380.000	248.610.000	40,80	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.103.700		-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	138.774.000	47.513.145	34,24	53,33
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	1.850.000	9,25	33,33
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.329.700		-	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	310.567.280.534		-	
Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	1.959.900.000		-	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95.000.000		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	128.000.000	9.813.000	7,67	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	50.000.000	6.528.300	13,06	-
Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.000.000	1.318.000	13,18	50,00
Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	51.775.000	6.588.500	12,73	-
Koordinasi dan Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	100.000.000	23.897.400	23,90	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	255.438.000	23.377.600	9,15	-
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	231.250.000	26.376.000	11,41	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	217.787.000	36.612.800	16,81	20,00
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	30.650.000	9.388.100	30,63	-
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	790.000.000	256.380.000	32,45	45,28
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	665.250.000		-	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	50.000.000	22.604.000	45,21	50,00
Koordinasi, Fasilitasi, asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	235.000.000	77.189.850	32,85	50,00
Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	50.000.000	2.372.500	4,75	25,00
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	330.250.000	125.719.500	38,07	50,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah	712.439.300		-	
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	94.732.000	44.388.300	46,86	52,94

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	195.408.000	119.583.300	61,20	62,50
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	221.796.800	96.404.800	43,47	50,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	96.194.500	28.013.100	29,12	40,00
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	42.803.000	23.513.750	54,93	-
Pembinaan akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	61.505.000	42.478.200	69,06	50,00
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	306.767.091.234		-	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	287.718.128.484	106.810.296.400	37,12	80,00
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000		-	-
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9.048.962.750			
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	462.600.000		-	
Implementasi dan Pemeliharaan sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Kkeuangan Daerah	462.600.000	204.231.700	44,15	50,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	825.000.000		-	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	825.000.000		-	
Penyusunan Standar Harga	81.530.000		-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.000.000		-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah	173.840.000	7.228.800	4,16	41,67
Penilaian Barang Milik Daerah	104.276.000	8.050.500	7,72	3,33

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	170.584.000	8.973.200	5,26	60,00
Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	88.700.000	13.860.000	15,63	28,43
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	111.156.000	62.328.200	56,07	50,00
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	79.914.000	19.638.180	24,57	25,00
JUMLAH	336.226.861.505	117.524.307.403	34,95	41,06

41. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Tabel 2.41
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.381.626.926	2.865.120.246	27,60	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	425.620.000	147.737.366	34,71	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.978.100	40.774.316	45,83	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	41.238.000	9.983.650	24,21	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.295.500	10.840.000	26,90	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	40.233.500	7.443.000	18,50	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	40.233.500	10.098.000	25,10	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	174.641.400	68.598.400	39,28	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.370.263.421	1.990.365.472	23,78	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.166.381.771	1.936.204.972	23,71	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109.920.000	35.310.000	32,12	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	93.961.650	18.850.500	20,06	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah	27.490.200	6.005.000	21,84	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.490.200	6.005.000	21,84	50,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.818.900	1.766.000	4,03	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	43.818.900	1.766.000	4,03	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	421.950.545	113.545.021	26,91	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.908.700	6.236.600	57,17	40,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.500.000	42.500.000	71,43	27,27
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53.690.345	10.665.000	19,86	41,67
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	99.996.700	15.507.600	15,51	40,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.200.000	6.000.000	24,79	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.654.800	32.635.821	18,79	50,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.863.500	247.000.000	97,68	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	48.000.000	48.000.000	100,00	100,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.863.500	199.000.000	97,14	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	632.289.760	294.531.587	46,58	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	7.740.000	77,40	77,40
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.569.760	38.631.587	37,30	50,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.000.000	16.500.000	51,56	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	486.720.000	231.660.000	47,60	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207.330.600	64.169.800	30,95	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.441.000	7.497.000	24,63	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.889.600	26.672.800	30,70	27,27
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	90.000.000	30.000.000	33,33	50,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.019.976.900	222.673.850	21,83	
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.019.976.900	222.673.850	21,83	
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	133.635.200	20.957.300	15,68	50,00
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	58.607.000	-	0,00	50,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	64.818.700	8.839.500	13,64	0,00
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	63.974.800	13.950.000	21,81	44,44
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	131.707.500	84.949.700	64,50	50,00
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	0,00	41,67
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	131.431.200	48.371.250	36,80	45,45
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	64.904.650	6.289.200	9,69	27,27
Penagihan Pajak Daerah	165.846.500	16.875.100	10,18	0,00
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50.772.200	10.514.500	20,71	0,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	65.104.200	5.941.900	9,13	50,00
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	89.174.950	5.985.400	6,71	50,00
JUMLAH	11.401.603.826	3.087.794.096	27,08	45,31

42. Inspektorat

Tabel 2.42
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Inspektorat

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten / kota				
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah	83.546.100	1.680.000	2,01	40
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.410.000		0,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.410.000		0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	18.050.000	15.066.200	83,47	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	18.050.000		0,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja	77.140.000	32.221.600	41,77	50
				100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.604.700	750.000	3,32	33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.649.360.676	3.372.755.758	50,72	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.560.000	50.840.000	46,83	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	93.272.000	17.455.000	18,71	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.241.000	4.772.000	11,86	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	57.585.000	585.000	1,02	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.015.025.200	71.464.600	7,04	25
				0
				14
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	59.043.000	14.007.900	23,72	0

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	123.929.800	47.136.400	38,03	550
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.350.000		0,00	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000		0,00	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	142.672.300	25.385.000	17,79	0
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	30.350.000	13.915.750	45,85	100 23
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	51.650.000	2.490.000	4,82	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.848.000	26.827.200	7,99	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebeler	78.768.000	-	0,00	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	295.140.000	169.275.000	57,35	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Surat menyurat	4.840.000		0,00	0 0
Penyediaan Jasa Koneksi Sumber daya Air dan Listrik	179.349.000	29.795.593	16,61	60
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	318.768.400	118.750.000	37,25	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan	87.674.400	4.990.165	5,69	0 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perizinan Dinas operasional Lapangan	192.939.000	3.778.627	1,96	0 100 0 0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.500.000		0,00	0
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	102.132.000		0,00	0
Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Perasarana Gedung Kantor/ Bangunan lainnya	81.450.000		0,00	0
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN				
Penyelenggaraan Pengawasan Internal				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.378.907.000	327.735.500	23,77	139
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	770.702.000	128.918.800	16,73	27
Reviu Laporan Kinerja	91.838.900	20.705.550	22,55	100
Reviu Laporan Keuangan	157.574.800	59.468.000	37,74	100
Pengawasan Desa	398.874.500	150.338.850	37,69	17
Kerja Sama Pengawasan Internal	283.751.100	53.005.500	18,68	60
Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Pemeriksaan APIP	388.300.000	139.469.708	35,92	67
				83
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	137.500.000	3.819.000	2,78	0
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	692.210.000	142.621.300	20,60	23
Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	223.735.900	36.767.300	16,43	50
				20
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	213.850.000	540.000	0,25	0
Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	288.148.600	600.000	0,21	0
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi	212.949.000	49.255.400	23,13	0
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas	505.597.500	19.280.300	3,81	0
				0
				0
JUMLAH	16.794.597.876	5.156.467.001	30,70	23,80

43. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 2.43
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.736.982.643	2.426.347.709	42,29	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.000.000	22.060.800	19,70	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.000.000	9.553.000	32,94	66,67
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.000.000	-	-	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.000.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.000.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.000.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.000.000	12.507.800	65,83	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.099.869.043	2.111.782.560	51,51	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.967.369.043	2.068.707.560	52,14	57,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.500.000	37.440.000	38,40	41,67
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000	5.635.000	16,10	47,50
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.000.000	4.447.350	24,71	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.000.000	4.447.350	24,71	25,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.000.000	-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	170.000.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	623.503.000	109.650.739	17,59	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.500.000	-	-	25,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.003.000	8.779.400	51,63	75,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	19.686.000	56,25	58,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan	100.000.000	27.819.500	27,82	33,33

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Peraturan Perundang-undangan				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.000.000	53.365.839	15,38	25,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.084.600	-	-	
Pengadaan Mebel	81.284.600	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.800.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.566.000	152.416.660	35,40	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	446.500	22,33	25,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.892.000	55.073.660	32,04	41,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	256.674.000	96.896.500	37,75	41,67
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.960.000	25.989.600	17,68	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.224.000	8.475.600	28,04	50,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.736.000	8.514.000	16,46	42,86
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000	9.000.000	13,85	28,57
Program Kepegawaian Daerah	2.408.635.400	637.305.831	26,46	
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	750.000.000	89.381.720	11,92	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	25.000.000	660.000	2,64	-
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	325.000.000	18.408.020	5,66	54,00
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	35.000.000	1.617.100	4,62	20,00
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	365.000.000	68.696.600	18,82	61,20
Mutasi dan Promosi ASN	1.133.375.000	418.816.111	36,95	
Pengelolaan Mutasi ASN	155.000.000	45.103.961	29,10	85,00
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200.000.000	93.774.850	46,89	67,90
Pengelolaan Promosi ASN	778.375.000	279.937.300	35,96	51,56
Pengembangan Kompetensi ASN	309.460.400	113.072.000	36,54	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	125.000.000	2.619.000	2,10	-
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	162.544.000	91.047.100	56,01	35,09

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	21.916.400	19.405.900	88,55	100,00
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	215.800.000	16.036.000	7,43	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	85.000.000	-	-	-
Pembinaan Disiplin ASN	84.800.000	10.789.400	12,72	25,00
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	46.000.000	5.246.600	11,41	37,50
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.436.947.200	181.338.748	7,44	
Pengembangan Kompetensi Teknis	1.186.206.000	157.237.148	13,26	
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	556.206.000	50.703.200	9,12	-
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	630.000.000	106.533.948	16,91	28,57
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.250.741.200	24.101.600	1,93	
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	75.000.000	-	-	-
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	484.116.200	1.976.600	0,41	58,82
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	691.625.000	22.125.000	3,20	3,57
JUMLAH	10.582.565.243	3.244.992.288	30,66	34,38

44. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 2.44
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.078.200	-	0,00	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	14.541.700	-	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	14.531.500	-	0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Lap. Kinerja dan Ikhtas Realisasi kerja SKPD	74.217.800	-	0,00	60,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.888.532.474	1.392.386.500	48,20	64,29
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.256.000	23.101.600	37,71	50,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.552.000	17.274.450	50,00	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.956.000	3.000.000	37,71	62,50
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.500.000	-	0,00	0,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.000.000	1.800.000	22,50	41,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.734.000	46.177.300	35,87	92,36
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.550.000	-	0,00	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.913.450	34.927.422	60,31	58,33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.455.845	111.750.992	39,15	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.842.700	62.894.999	54,77	63,64
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	-	0,00	0,00
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
Perumusan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	353.380.800	-	0,00	0,00
PROGRAM Peningkatan Peran Partai dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemilu Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,				
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik	47.244.800	-	0,00	0,00
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik, Pemilu Pilkada serta	1.378.615.300	30.394.900	2,20	20,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemantauan Situasi politik				
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	272.049.100	108.126.300	39,75	56,41
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
Pelaksanaan Koordinasi diBidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	782.580.300	383.173.300	48,96	66,67
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara	169.013.300	47.700.000	28,22	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	457.734.000	163.923.200	35,81	50,00
JUMLAH	7.314.779.269	2.426.630.963	33,17	37,44

45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 2.45
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.621.100	7.621.100	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.621.100	3.911.100	51,32	51,32
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.135.953.822	693.259.337	61,03	61,03
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.086.500	27.000.000	46,48	46,48
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	54.000.000	54.000.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.556.600	4.500.000	7,43	7,43
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.135.000	7.984.000	21,50	21,50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.029.300	2.120.000	4,07	4,07
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	194.977.900	161.467.004	82,81	82,81
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
Pengadaan Mebel	12.434.500	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.820.400	11.068.220	37,12	37,12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	612.341.940	371.500.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.082.000	83.787.200	55,83	55,83
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000	-		
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	322.783.400	179.519.600	55,62	55,62
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	33.002.000	-	-	-
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	27.113.900	-	-	-
JUMLAH	2.820.759.462,00	1.607.737.561,00	57,00	57,00

46. Kecamatan STL Ulu Terawas

Tabel 2.46
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan STL Ulu Terawas

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2.400.714.711	981.142.621		
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	78.029.500	41.865.500	53,65	

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	16.233.500	16.233.500	100,00	100,00
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	13.338.500	13.338.500	100,00	100,00
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	13.685.500	0	0,00	0,00
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	12.293.500	12.293.500	100,00	100,00
Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	12.663.500	0	0,00	0,00
Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.815.000	0	0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.955.258.221	789.074.109	40,36	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1.894.887.721	762.097.109	40,22	60,00
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	50.557.000	26.977.000	53,36	55,00
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	9.813.500	0	0,00	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.563.500	0	0,00	
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	8.563.500	0	0,00	0,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.229.200	32.037.000	30,44	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.138.200	8.138.200	100,00	100,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0,00	0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.616.000	6.223.800	49,33	49,33
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20.000.000	5.000.000	25,00	25,00
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	64.475.000	12.675.000	19,66	20,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	46.436.000	14.250.000	30,69	
Pengadaan Mebel	46.436.000	14.250.000	30,69	31,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.440.200	75.333.012	49,10	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.716.500	1.811.512	20,78	21,00
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	144.723.700	73.521.500	50,80	51,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	53.758.090	28.583.000	53,17	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	35.708.800	10.538.000	29,51	30,00
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11.900.000	11.900.000	100,00	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	6.149.290	6.145.000	99,93	100,00
<i>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	35.522.500	35.522.500	100,00	
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	35.522.500	35.522.500	100,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.522.500	35.522.500	100,00	100,00
<i>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>	300.956.600	167.324.000	55,60	
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	0	0	0,00	
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	0	0	0,00	0,00
<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	300.956.600	167.324.000	55,60	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300.956.600	167.324.000	55,60	55,60
<i>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	194.817.300	0	0,00	
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	194.817.300	0	0,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	194.817.300	0	0,00	0,00
<i>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</i>	133.277.400	69.277.400	51,98	
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	133.277.400	69.277.400	51,98	
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia	64.000.000	0	0,00	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	69.277.400	69.277.400	100,00	100,00
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.348.250	49.348.250	100,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	49.348.250	49.348.250	0,00	
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	49.348.250	49.348.250	100,00	100,00
JUMLAH	3.114.636.761	1.302.614.771	41,82	46,35

47. Kecamatan Selangit

Tabel 2.47
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Selangit

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.336.688.785	1.019.505.203	319,68	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.734.700	14.681.000	100	17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.681.000	14.681.000	100	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.468.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.063.700	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.864.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.898.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.759.000	-	-	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.974.164.782	915.344.083	87,86	44
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.898.888.232	884.264.083	46,57	43

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	75.276.550	31.080.000	41,29	50
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.761.200	11.375.000	28,26	27
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.511.200	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.250.000	11.375.000	28,26	30
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.800.000	-	-	-
Pengadaan Mebel	9.800.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.554.135	70.205.120	80,17	26
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	720.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.648.800	1.205.120	25,92	25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.185.335	69.000.000	54,25	50
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.673.968	7.900.000	23,39	13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.771.600	7.900.000	23,39	50
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.500.000	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.402.368	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.698.100	50.045.600	123	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	85.698.100	50.045.600	123,24	67

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.045.600	27.795.600	79,31	100
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50.652.500	22.250.000	43,93	34
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	315.817.000	135.060.000	43	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	315.817.000	135.060.000	42,77	45
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	315.817.000	135.060.000	42,77	45
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	116.089.500	56.909.000	100	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	116.089.500	56.909.000	100,00	50
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.180.500	-	-	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	56.909.000	56.909.000	100,00	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	48.749.000	48.749.000	100	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	48.749.000	48.749.000	100,00	100
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	48.749.000	48.749.000	100,00	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	200.032.000	-	-	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	200.032.000	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	200.032.000	-	-	-
JUMLAH	3.103.074.385	1.310.268.803	42,22	41

48. Kecamatan Sumber Harta

Tabel 2.48
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Sumber Harta

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
KECAMATAN SUMBER HARTA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan ,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.199.500	25.763.800		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	12.071.900	12.071.900	100	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	13.691.900	13.691.900	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.391.900		0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.671.900		0,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	11.371.900		0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.626.340.221	648.064.423	25,00	25,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.556.110.021	628.504.423	25,00	25,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan /Verifikasi Keuangan SKPD	59.958.300	19.560.000	32,62	51,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	10.271.900		0,00	0,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.815.100	17.937.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	6.854.100		0,00	100,00
Belanja Modal, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.000.000	7.500.000	11,90	11,90
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.738.900	4.357.000	26,03	64,72
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.034.100	6.080.000	23,35	63,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.188.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.206.900	59.575.448		0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000		0,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.685.000	1.162.048	12,00	12,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	174.521.900	58.413.400	33,47	33,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.100.800			0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.100.800		0,00	0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				0,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15.212.800	15.212.800	100	100
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.212.800	15.212.800	100,00	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				0,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.238.100			
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.238.100		0,00	0,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	246.848.750	69.171.228		
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	246.848.750	69.171.228	16,99	16,99

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.044.600	52.044.600		0,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	52.044.600	52.044.600	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA				0,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.949.000	26.299.000	56,02	100,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	46.949.000	26.299.000	56,02	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	198.857.800			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	198.857.800			
JUMLAH	2.648.813.571	914.068.299	34,51	34,51

49. Kecamatan Tugumulyo

Tabel 2.49
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Tugumulyo

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
KECAMATAN TUGUMULYO				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.051.287.645	1.674.173.536		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.000.000	0	0,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000	0	0,00	50,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.603.382.866	1.505.294.768	57,82	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.496.828.566	1.465.325.818	58,69	64,29
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	82.280.000	39.968.950	48,58	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24.274.300	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.250.000	59.264.500	37,45	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan/ Kantor	11.500.000	11.500.000	100,00	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.500.000	12.500.000	33,33	50,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.750.000	6.019.500	47,21	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.000.000	0	0,00	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.500.000	29.245.000	44,65	19,13
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.784.979	104.686.768	46,16	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.784.979	8.686.768	24,97	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.000.000	96.000.000	50,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.869.800	4.927.500	17,68	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.869.800	4.927.500	17,68	50,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	25.968.600	25.968.600	100,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25.968.600	25.968.600	100,00	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.968.600	25.968.600	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	392.819.500	171.746.903	43,72	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	13.154.800	1.624.750	12,35	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.154.800	1.624.750	12,35	50,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	379.664.700	170.122.153	44,81	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	379.664.700	170.122.153	44,81	100,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	193.830.200	0	0,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	193.830.200	0	0,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	193.830.200	0	0,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	56.318.900	56.318.900	100,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.318.900	56.318.900	100,00	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	56.318.900	56.318.900	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	47.149.000	47.149.000	100,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.149.000	47.149.000	100,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	47.149.000	47.149.000	100,00	100,00
JUMLAH	3.767.373.845	1.975.356.939	52,43	74,08

50. Kecamatan Purwodadi

Tabel 2.50
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Purwodadi

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
KECAMATAN PURWODADI				
Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.315.600	0	0,00	40,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.315.600	0	0,00	40,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.739.922.656	1.584.249.216	57,82	50,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.624.810.656	1.568.939.216	59,77	50,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	97.975.400	15.310.000	15,63	50,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.136.600	0	0,00	25,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000	0	0,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	176.053.550	24.941.800	14,17	39,13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.005.000	2.495.000	49,85	50,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000	0	0,00	33,33
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.564.550	13.996.800	39,36	56,90
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.000.000	3.950.000	28,21	42,50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.484.000	4.500.000	9,68	12,91
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.717.410	49.213.297	26,22	50,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.716.500	6.213.809	29,99	50,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167.000.910	42.999.488	25,75	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.890.000	6.347.500	20,55	35,53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.390.000	5.347.500	25,00	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.500.000	1.000.000	10,53	21,05

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	18.685.500	15.941.500	85,31	100,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.685.500	15.941.500	85,31	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	74.215.000	10.030.000	13,51	45,45
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	74.215.000	10.030.000	13,51	45,45
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	560.872.034	124.868.548	22,26	22,26
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	560.872.034	124.868.548	22,26	22,26
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	368.860.400		0,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	368.860.400		0,00	24,94
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	368.860.400		0,00	24,94
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	70.732.500	58.032.500	82,05	100,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	70.732.500	58.032.500	82,05	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.211.200	27.574.000	49,94	83,33
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8.262.200	0	0,00	66,67
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	46.949.000	27.574.000	58,73	100,00
JUMLAH	4.301.975.850	1.901.198.361	44,19	49,22

51. Kecamatan Muara Beliti

Tabel 2.51
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Muara Beliti

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.613.417.292	1.129.478.685	43,22	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.437.800	54.293.900	86,96	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	11.052.000	11.052.000	100,00	100,00
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	11.691.300	11.691.300	100,00	100,00
Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	11.089.300	11.089.300	100,00	0,00
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	10.173.100	10.173.100	100,00	100,00
Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	10.288.200	10.288.200	100,00	0,00
Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.143.900		0,00	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.245.117.002	919.237.565	40,94	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.159.898.702	877.097.565	40,61	50,00
Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	72.240.000	42.140.000	58,33	50,00
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12.978.300	0	0,00	25,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	28.180.000	0	0,00	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.180.000	0	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.148.300	32.614.000	46,49	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.414.300	6.414.000	100,00	100,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.000.000	9.000.000	50,00	50,00
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35.734.000	7.200.000	20,15	20,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.093.000	16.093.000	100,00	
Pengadaan Mebel	16.093.000	16.093.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	148.685.822	71.086.967	47,81	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12.598.467	7.999.612	63,50	25,00
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	136.087.355	63.087.355	46,36	33,33

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.755.368	36.153.253	84,56	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	24.518.400	18.153.253	74,04	50,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	18.236.968	18.000.000	98,70	0,00
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	34.167.400	34.167.400	100,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.167.400	34.167.400	100,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	34.167.400	34.167.400	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	386.464.150	119.328.020	30,88	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.044.150	1.800.000	5,62	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	32.044.150	1.800.000	5,62	33,33
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	354.420.000	117.528.020	33,16	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	354.420.000	117.528.020	33,16	33,33
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban Umum	200.217.300	0	0,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	200.217.300	0	0,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	200.217.300	0	0,00	0,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.140.700	56.140.700	100,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	56.140.700	56.140.700	100,00	
Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	56.140.700	56.140.700	100,00	100,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.749.000	45.749.000	100,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.749.000	45.749.000	100,00	
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	45.749.000	45.749.000	100,00	100,00
JUMLAH	3.336.155.842	1.384.863.805	41,51	50,80

52. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

Tabel 2.52
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

Program/Kegiatan	Pagu Anggran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	303.857.800	60.780.000	20,00	20,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.730.000	-	-	-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	3.850.000	-	-	-
Penyediaan jasa administrasi keuangan	34.920.000	8.730.000	25,00	25,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	17.800.000	1.950.000	10,96	10,96
Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.000.000	8.400.000	42,00	42,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.451.800	5.000.000	67,10	67,10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	5.500.000	55,00	55,00
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	-	-	-
Penyediaan Makan dan Minum	20.300.000	-	-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	20.000.000	-	-	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12.756.000	-	-	-
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	138.050.000	31.200.000	22,60	22,60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.750.000	-	-	-
Pengadaan Mebeluer	15.000.000	-	-	-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10.000.000	-	-	-

Program/Kegiatan	Pagu Anggran (Rp)	Realisasi		
		Keuangan		Fisik
		Rp	%	%
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	47.750.000	-	-	-
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.000.000	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Formal	21.000.000	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.809.000	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	7.809.000	-	-	-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	120.000.000	-	-	-
Peringatan Hari Besar Nasional	120.000.000	-	-	-
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	136.214.000	-	-	-
Penyelenggaraan Pembinaan Model Desa Prima	31.158.000	-	-	-
Penyelenggaraan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	72.756.000	-	-	-
Penyelenggaraan Pembinaan PPK Pedesaan	32.300.000	-	-	-
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	29.700.000	-	-	-
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	29.700.000	-	-	-
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	54.210.000	54.210.000	100,00	100,00
Musrenbang Tingkat Kecamatan	54.210.000	54.210.000	100,00	100,00
Program Menuju Musi Rawas Sempurna	136.100.000	81.100.000	59,59	59,59
Pembinaan Majelis Ta'lim	30.000.000	-	-	-
Musabaqah Tilawatil Qur'an	81.100.000	81.100.000	100,00	100,00
Penyelenggaraan Taman Pendidikan Al-Qur'an	25.000.000	-	-	-
JUMLAH	881.640.800	196.090.000	22,24	22,24

53. Kecamatan Jayaloka

Tabel 2.53
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Jayaloka

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
KECAMATAN JAYALOKA				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.967.184.984	947.557.468	48,17	57,14
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	51.745.000	51.745.000	100,00	100
Pembinaan Kerukunan Antar suku dan umat beragama, Ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, Regional dan Nasional (MTQ)	43.750.000	43.750.000	100,00	75
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	354.764.960	87.907.000	24,78	100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal terkait (Musrenbang)	44.471.000	44.471.000	100,00	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.459.400	46.379.400	54,27	50
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	-	-	60
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	18.192.304	-	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.000.000	66.000.000	50,00	55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.500.000	26.500.000	100,00	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.500.000	34.000.000	50,37	75
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.740.000	12.250.150	56,35	60
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	-	-	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	72.240.000	36.120.000	50,00	57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	22.877.700	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	29.598.000	29.598.000	100,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	23.642.200	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	20.818.000	20.818.000	100,00	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	19.488.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD	19.040.200	-	-	-
JUMLAH	3.041.011.748	1.447.096.018	47,59	62,74

54. Kecamatan Suka Karya

Tabel 2.54
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Suka Karya

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.858.121.418	683.480.879	36,78	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.322.850	4.905.800	8,13	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.862.200			-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	13.954.800			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.450.050			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.250.000			
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Belanja SKPD	8.805.800	4.905.800	55,71	100
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.473.799.382	570.639.407	38,72	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.427.126.882	550.726.907	38,59	50
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	46.672.500	19.912.500	42,66	50
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	-			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.203.450	33.983.000	27,36	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerapan Bangunan Kantor	7.586.000	7.586.000	100	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.000.000			33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	9.000.000			42
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.617.450	26.397.000	30,48	50
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.500.000	-		
Pengadaan Mebel	11.500.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	136.432.636	57.074.572	41,8	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000			50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.578.052	2.814.752	42,79	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.854.584	54.259.820	42,44	50

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.863.100	16.878.100	32,54	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.863.100	16.878.100	41,30	42
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.000.000			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	22.690.000	20.740.000	91,41	
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.690.000	20.740.000	91,41	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.690.000	20.740.000	91,41	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	66.657.900	-		
Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	66.657.900	-		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66.657.900			25
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	42.710.000	42.710.000	100,00	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	42.710.000	42.710.000	100,00	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	42.710.000	42.710.000	100,00	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.512.000	34.812.000	74,8	
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	46.512.000	34.812.000	74,8	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	46.512.000	34.812.000	74,85	100
JUMLAH	2.036.691.318	781.742.879	38,4	44,86

55. Kecamatan Muara Kelingi

Tabel 2.55
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Muara Kelingi

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	64.049.600			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.739.500	-	-	40,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA –SKPD	13.332.200	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA –SKPD	12.600.000		-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	11.262.000		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA –SKPD	10.115.900		-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.472.373.009			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.405.164.859	1.144.079.622	47,57	25,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan	53.079.500	13.320.000	25,09	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	14.128.650		-	22,22
Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.625.000			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	5.625.000		-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000	33.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.500.000		-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.500.000	15.000.000	18,18	18,18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.500.000			
Pengadaan Mebel	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.451.660			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000		-	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.820.160		-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.831.500	71.960.000	31,86	31,86

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.996.000			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.496.000		-	100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.500.000		-	-
PROGRAM PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	72.120.000			
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan perangkat Daerah Vertikal terkait	42.120.000	42.020.000	99,76	99,76
Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30.000.000		-	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	313.500.000			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	313.500.000	137.549.900	43,88	16,67
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	192.330.200			
Sinerginitas dengan kepolisian negara republik indonesia, TNI dan instansi vertikal terkait	192.330.200		-	37,50
PROGRAM PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH UMUM	54.890.000			
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	54.890.000	54.890.000	100,00	65,71
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	51.749.000			
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	51.749.000	34.109.000	65,91	100,00
JUMLAH	3.616.584.469	1.550.428.522	42,87	40,07

56. Kecamatan Tuah Negeri

Tabel 2.56
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Tuah Negeri

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.530.794.022	256.835.003	-	0,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.121.500	43.822.000	47,57	47,57
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	23.065.500	23.065.500	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.063.000	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.756.500	20.756.500	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	25.236.500	-	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.155.753.792	740.364.926	64,06	64,06
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.120.833.792	722.904.926	64,50	64,50
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.920.000	17.460.000	50,00	50,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.732.200	12.057.500	43,48	43,48
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.675.000	1.875.000	33,04	33,04
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	22.057.200	10.182.500	46,16	46,16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.500.000	25.500.000	100,00	100,00
Pengadaan Peralatan Mesin dan lainnya	25.500.000	25.500.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.257.130	109.500.000	48,61	48,61
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.257.130	-	-	-

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	219.000.000	109.500.000	50,00	50,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.929.400		-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.929.400		-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.792.500	35.792.500	100	100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.792.500	35.792.500	100,00	100,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.792.500	35.792.000	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.050.000		100	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	47.050.000	47.050.000	100,00	100,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	47.050.000	47.050.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	63.700.000	63.700.000	100	100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.700.000	63.700.000	100,00	100,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	63.700.000	63.700.000	100,00	100,00
JUMLAH	1.702.836.522	1.077.786.926	63,29	63,29

57. Kecamatan Muara Lakitan

Tabel 2.57
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Muara Lakitan

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.531.051.274	903.343.155		
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	86.301.200	26.228.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.500.000		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.618.000	15.618.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.746.200		-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14.195.000		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	14.632.000		-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.610.000	10.610.000	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.061.311.144	739.037.662	35,85	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.972.141.144	721.217.662	36,57	23,33
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.280.000	17.820.000	25,00	25,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.890.000		-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.830.000		-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.830.000		-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.503.930	10.983.930	15,80	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.581.930	9.581.930	100	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.402.000	1.402.000	12,30	16,81
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.520.000		-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.760.000	116.421.063	46,61	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000		-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.060.000	2.901.063	15,22	15,22
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.700.000	113.520.000	49,86	16,67

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.345.000	10.672.500	45,72	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.345.000	6.672.500	34,49	11,11
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.136.000	52.136.000	100,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	52.136.000	52.136.000	100,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	52.136.000	52.136.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	400.539.920	134.474.450	33,57	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	58.481.050	58.481.050	100,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58.481.050	58.481.050	100,00	100,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	342.058.870	75.993.400	22,22	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	342.058.870	75.993.400	22,22	16,67
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	89.402.000	89.402.000	100	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	89.402.000	89.402.000	100	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	89.402.000	89.402.000	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	55.000.000	55.000.000	100	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.000.000	55.000.000	100	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	55.000.000	55.000.000	100	100
JUMLAH	3.128.129.194	1.234.355.605	39,46	45,00

58. Kecamatan Mengang Sakti

Tabel 2.58
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan Mengang Sakti

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.844.659.462	1.702.902.517	44,29	44,29
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.575.200	43.170.000	62,05	62,05
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.305.900	13.146.900	98,81	98,81
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.637.600	16.637.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.643.800		-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.386.100	13.386.100	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.601.800		-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.280.145.012	1.454.371.861	86,47	86,47
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.155.063.862	1.410.059.261	44,69	44,69
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	106.057.600	44.312.600	41,78	41,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	19.023.550		-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.694.500	-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.694.500		-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	127.816.900	67.018.400		-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.017.900	6.667.900	95,01	95,01
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.005.500	37.450.500	81,40	81,40
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.100.000	12.600.000	50,20	50,20
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.028.500	4.300.000	22,60	22,60
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.665.000	6.000.000	19,57	19,57

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.127.850	109.816.200	39,91	39,91
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	5.000.000	83,33	83,33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.989.600	566.200	7,09	7,09
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	261.138.250	104.250.000	39,92	39,92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.300.000	28.526.056	35,97	35,97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.800.000	28.526.056	37,63	37,63
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000		-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.310.000	35.310.000	100,00	100,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.310.000	35.310.000	100,00	100,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35.310.000	35.310.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	766.339.500	174.749.500	22,80	22,80
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	44.500.000	18.900.000	42,47	42,47
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.500.000	18.900.000	42,47	42,47
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	721.839.500	155.849.500	21,59	21,59
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	721.839.500	155.849.500	21,59	21,59
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	384.660.400	112.160.400		
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	384.660.400	112.160.400		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	384.660.400	112.160.400	29,16	29,16

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	36.850.000	36.850.000	100,00	100,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	36.850.000	36.850.000	100,00	100,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	36.850.000	36.850.000	100,00	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	52.949.000	52.949.000	100,00	100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	52.949.000	52.949.000	100,00	100,00
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	52.949.000	52.949.000	100,00	100,00
JUMLAH	5.120.768.362	2.114.921.417	41,30	41,30

59. Kecamatan BTS Ulu

Tabel 2.59
Evaluasi Kinerja Program Dan Kegiatan Kecamatan BTS Ulu

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
KECAMATAN BTS. ULU				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.860.949.099	1.275.526.077		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.381.640.956	1.090.329.827	45,78	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.303.540.756	1.052.704.527	45,70	57,14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	78.100.200	37.625.300	48,18	100,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000	3.600.000	50,00	

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000	3.600.000	50,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.213.000	49.300.250	24,50	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan/ Kantor	30.063.000	2.098.000	6,98	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.500.000	40.000.000	37,91	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.250.000	7.202.250	44,32	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000	0	0,00	50,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.900.000	0	0,00	32,61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.000.000	32.000.000	100,00	
Pengadaan Mebel	32.000.000	32.000.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.727.743	90.000.000	48,72	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350.000	0	12,55	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.377.743	0	0,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000	90.000.000	50,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.167.400	10.296.000	19,01	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.997.400	10.296.000	32,18	50,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000	0	0,00	14,29
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.670.000	0	0,00	14,29
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.989.300	27.639.300	72,76	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.989.300	27.639.300	72,76	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	37.989.300	27.639.300	72,76	100,00

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI		
		KEUANGAN		FISIK
		Rp	(%)	(%)
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	450.266.850	209.782.400	46,59	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.000.000	0	0,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18.000.000	0	0,00	15,79
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	432.266.850	209.782.400	48,53	
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	432.266.850	209.782.400	48,53	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	184.340.200	0	0,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	184.340.200	0	0,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	184.340.200	0	0,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.860.000	29.300.000	53,41	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	54.860.000	29.300.000	53,41	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	54.860.000	29.300.000	53,41	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	47.349.000	47.349.000	100,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	47.349.000	47.349.000	100,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	47.349.000	47.349.000	100,00	100,00
JUMLAH	3.635.754.449	1.589.596.777	54,55	71,71

Penilaian RKPD dilakukan dengan menghitung realisasi sampai dengan bulan Juni 2021. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 548.126.980.507,- atau sebesar 29,21% termasuk dalam kategori **rendah**. Target indikator sasaran sampai dengan bulan Juni sebesar 50,00%, sedangkan realisasi sasaran Indikator capaian sebesar 32,62% termasuk dalam kategori **sedang**.

Penyebab rendahnya realisasi dan keuangan :

1. Adanya penyesuaian terhadap beberapa regulasi yaitu Permendagri 77 Tahun 2020, Kepmen 050-3708 Tahun 2020 terhadap pemetaan pada kode rekening belanja maupun uraian/rincian belanja yang masih belum sempurna dan harus diperbaiki melalui mekanisme penjabaran menyebabkan terhambatnya penyerapan realisasi fisik dan keuangan
2. Adanya Penyesuaian terhadap konsistensi penyajian informasi pada setiap tahapan perencanaan pembangunan hingga perencanaan anggaran yang harus menggunakan kodifikasi dan nomenklatur baru yang mengacu pada permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemuktahirannya.
3. Adanya penyesuaian pada petunjuk teknis pelaksanaan dan penatausahaan keuangan yang menyebabkan beberapa Perangkat Daerah kurang cepat dan tanggap sehingga proses pelaksanaan program/kegiatan dapat belum berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target/waktu yang ditetapkan.
4. Proses Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan lebih awal agar dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan dan penyerapan sesuai dengan target yang ditetapkan.
5. Terjadinya refocusing anggaran yang dialihkan untuk penanganan wabah Covid 19 sehingga terjadi penundaan dan realokasi anggaran sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Diperlukan komitmen dari Kepala OPD sebagai pelaksana program/kegiatan agar pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan senantiasa melakukan koordinasi kepada semua pihak terkait dan diupayakan adanya agenda kerja untuk kegiatan rutin bagi masing-masing OPD Pelaksana.
7. Sikap ketelitian petugas menjadi penting dan harus diutamakan dalam pelaksanaan tugas yang diutamakan dalam pelaksanaan tugas, sebaiknya Kepala OPD menempatkan petugas yang kompeten di bidang program/kegiatan.

2.3 Evaluasi Terhadap Pendanaan Penanganan Covid-19

Sampai saat ini Pandemi Covid-19 belum dapat diperkirakan kapan berakhirnya. Pandemi Covid 19 memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh sektor kehidupan manusia terutama sektor kesehatan yang ditandai dengan banyaknya korban jiwa, kemudian sektor strategis perekonomian juga terkena dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor pariwisata, perdagangan, industri manufaktur dan pertanian.

Pemerintah terus berupaya menekan laju peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi dampak yang timbul akibat pandemi ini, salah satunya di bidang ekonomi. Sebab, keselamatan dan ketahanan ekonomi masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah dengan realisasi penyerapan seperti dalam tabel berikut ini :

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19 KABUPATEN MUSI RAWAS Kondisi S.D 30 Juni 2021

A. BIDANG KESEHATAN

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
1	Dukungan Operasional Untuk Pelaksanaan Vaksinasi	15,268,186,600	63,719,000	0.42%
2	Pemantauan dan Penanggulangan Dampak Kesehatan Ikutan Pasca Vaksinasi	1,093,200,000	-	0.00%
3	Distribusi, Pengamanan, Penyediaan Tempat Penyimpanan Vaksin	651,555,750	-	0.00%
4	Insentif Tenaga Kesehatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Vaksinasi	8,951,381,015	1,558,000,000	17.41%
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,404,593,655	2,048,133,128	17.96%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
6	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	7,072,751,720	2,185,178,574	30.90%
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	136,955,000	-	0.00%
8	Pengelolaan Layanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan Terpotensi Bencana	2,137,740,000	-	0.00%
9	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12,428,640,000	-	0.00%
JUMLAH		59,145,003,740	5,855,030,702	9.90%

B. BIDANG SOSIAL DAN/ATAU EKONOMI KEPADA MASYARAKAT YANG TERDAMPAK COVID-19

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
A	Penanganan Dampak Ekonomi	140,891,254,703.00	21,043,475,000.00	14.94%
1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	264,015,100.00	-	0.00%
2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	86,475,200.00	-	0.00%
3	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1,200,000,000.00	-	0.00%
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2,317,000,000.00	-	0.00%
5	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	11,190,000.00	-	0.00%
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	22,800,000.00	-	0.00%
7	Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	18,000,000.00	-	0.00%
8	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	20,000,000.00	-	0.00%
9	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	34,600,000.00	-	0.00%
10	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	71,775,000.00	-	0.00%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
11	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	18,000,000.00	-	0.00%
12	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	26,075,000.00	-	0.00%
13	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30,000,000.00	-	0.00%
14	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	-	0.00%
15	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	2,213,000.00	-	0.00%
16	koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100,000,000.00	-	0.00%
17	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	537,200,000.00	-	0.00%
18	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1,180,785,865.00	-	0.00%
19	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	89,288,179,300.00	18,603,900,000	20.84%
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	326,904,565.00	184,800,000	56.53%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	979,911,910.00	-	0.00%
22	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,727,487,396.00	2,254,775,000	39.37%
23	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	284,901,500.00	-	0.00%
24	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7,022,846,467.00	-	0.00%
25	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	326,514,000.00	-	0.00%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
26	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Diluar Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 Ha	2,415,000,000.00	-	0.00%
27	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	28,329,880,400.00	-	0.00%
28	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	199,500,000.00	-	0.00%
B.	Bantuan Social Safety Net / Jaring Pengamanan Sosial	34,293,359,750	1,379,334,000	25.00%
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	93,500,000.00	-	0.00%
2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	33,920,000.00	-	0.00%
3	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	42,000,000.00	-	0.00%
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	34,950,000.00	-	0.00%
5	Penyediaan Permakanan	56,600,000.00	28,300,000	50.00%
6	Penyediaan Sandang	28,828,000.00	-	0.00%
7	Penyediaan Alat Bantu	129,300,000.00	42,000,000	32.48%
8	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6,426,000,000.00	-	0.00%
9	Penyediaan Sandang	17,636,000.00	4,409,000	25.00%
10	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	284,400,000.00	-	0.00%
11	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Didaerah	598,800,000.00	299,400,000	50.00%
12	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	367,850,000.00	-	0.00%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
13	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	139,500,000.00	46,500,000	33.33%
14	Koordinasi Singkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	3,510,228,150.00	-	0.00%
15	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	44,756,800.00	-	0.00%
16	Penambahan Ruang Kelas Baru	2,456,707,551.00	-	0.00%
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	879,777,500.00	-	0.00%
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	386,484,349.00	-	0.00%
19	Pengadaan Mebel Sekolah	468,750,000.00	-	0.00%
20	Pengadaan Perlengkapan Siswa	2,767,000,000.00	-	0.00%
21	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	500,000,000.00	-	0.00%
22	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	3,427,200,000.00	-	0.00%
23	Penambahan Ruang Kelas Baru	1,500,000,000.00	-	0.00%
24	Pengadaan Mebel Sekolah	468,750,000.00	-	0.00%
25	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	400,500,000.00	-	0.00%
26	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1,233,000,000.00	-	0.00%
27	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	450,000,000.00	-	0.00%
28	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	205,200,000.00	-	0.00%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,014,000,000.00	878,700,000	21.89%
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	268,422,000.00	80,025,000	29.81%

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penyerapan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (d)/(c)
31	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antardesa	559,500,000.00	-	0.00%
32	Dukungan pada Kelurahan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid 19	2,499,799,400.00	-	0.00%
JUMLAH		175,184,614,453	22,422,809,000	12.80%

Pagu anggaran penanganan Covid 19 Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 234.329.618.193,- yang terdiri dari Prioritas Penanganan Kesehatan sebesar Rp. 59.145.003.702,-, Penanganan Dampak Ekonomi sebesar Rp. 140.891.254.703,- dan Penyediaan social safety Net/ Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp. 34.293.359.750,-.

Realisasi dana covid sampai dengan triwulan 2 sebesar Rp. 28.277.839.702,- atau sebesar 12,07%. Adapun realisasi tersebut terdiri dari realisasi penanganan kesehatan sebesar Rp. 5.855.030.702,- penanganan dampak ekonomi sebesar Rp. 21.043.475.000,- dan realisasi penyediaan social safety net/Jaring pengaman social sebesar Rp. 1.379.334.000,-.

Sampai dengan triwulan 2, sisa pagu yang belum terealisasi sebesar Rp. 206.051.778.491,- atau sebesar 87,93%.

BAB III

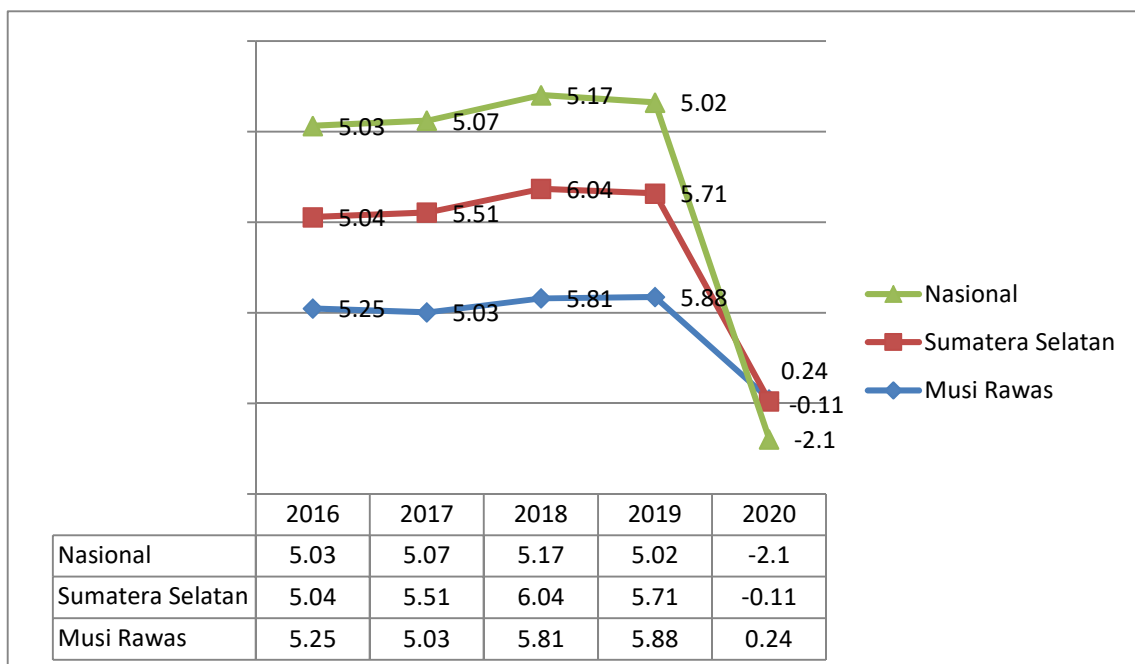
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau perbaikan ekonomi suatu daerah karena faktor perubahan harga (inflasi) telah dikeluarkan. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2016-2020 tergambar dalam grafik berikut:

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2016- 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, 2021, (data diolah)

Dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,6%. Mencermati kondisi perekonomian terakhir yang dipengaruhi pandemic Corona Virus Disease

2019, maka pada Perubahan RKPD Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 diperkirakan akan menjadi 5 %.

Grafik 3.2
Perubahan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021



Sumber : Bappeda (Data diolah), 2021

Struktur ekonomi suatu daerah menjadi indikator penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder ataupun tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber daya alam dalam proses produksi, yaitu : sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder adalah sektor yang sudah tidak terlalu mengandalkan peran sumber daya alam lagi, tapi lebih banyak mengandalkan kemajuan teknologi dan peran sumber daya manusia, yaitu sektor industri pengolahan, listrik, air, dan konstruksi. Sedangkan sektor tersier adalah adalah sektor yang bisa dikatakan sudah tidak mengandalkan sumber daya alam lagi, yaitu sektor perdagangan, pengangkutan dan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan lain, dan sektor jasa-jasa.

Selama Tahun 2020 kegiatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas telah mampu menciptakan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 19.303,45 (milyar) dan diasumsikan akan mencapai Rp 19.482,10 (milyar) pada tahun 2021.

Data struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB = 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (milyar rupiah) dan Target 2021

Lapangan Usaha	Realisasi					Target 2021
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.717,87	4.985,20	5.289,73	5.586,00	5.821,98	5.870,00
Pertambangan dan Penggalian	4.576,04	4.826,24	5.520,96	6.206,80	5.944,77	5.990,00
Industri Pengolahan	1.874,15	2.120,01	2.365,01	2.571,30	2.705,27	2.770,00
Pengadaan Listrik dan Gas	4,32	4,55	4,81	5,00	5,74	6,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,09	1,24	1,37	1,50	1,58	2,50
Konstruksi	898,33	965,59	1.061,48	1.138,90	1.109,63	1.130,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.155,90	1.365,06	1.528,12	1.700,90	1.793,01	1.880,00
Transportasi dan Pergudangan	70,26	74,55	82,10	91,10	88,13	88,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49,52	51,56	57,84	65,90	66,71	67,08
Informasi dan Komunikasi	44,41	50,06	56,26	62,10	72,69	73,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	101,48	108,35	119,30	126,10	123,80	124,02
Real Estate	202,91	217,08	240,44	268,40	279,17	279,00
Jasa Perusahaan	2,39	2,77	3,14	3,60	3,95	4,17
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	370,56	381,05	382,06	391,00	407,30	407,03
Jasa Pendidikan	443,33	449,18	487,35	531,06	527,47	527,04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100,27	115,13	122,73	131,60	146,79	147,09
Jasa lainnya	145,51	162,69	177,23	195,20	205,45	205,08
PDRB Dengan Migas	14.758,34	15.880,31	17.499,94	19.076,90	19.303,45	19.482,10

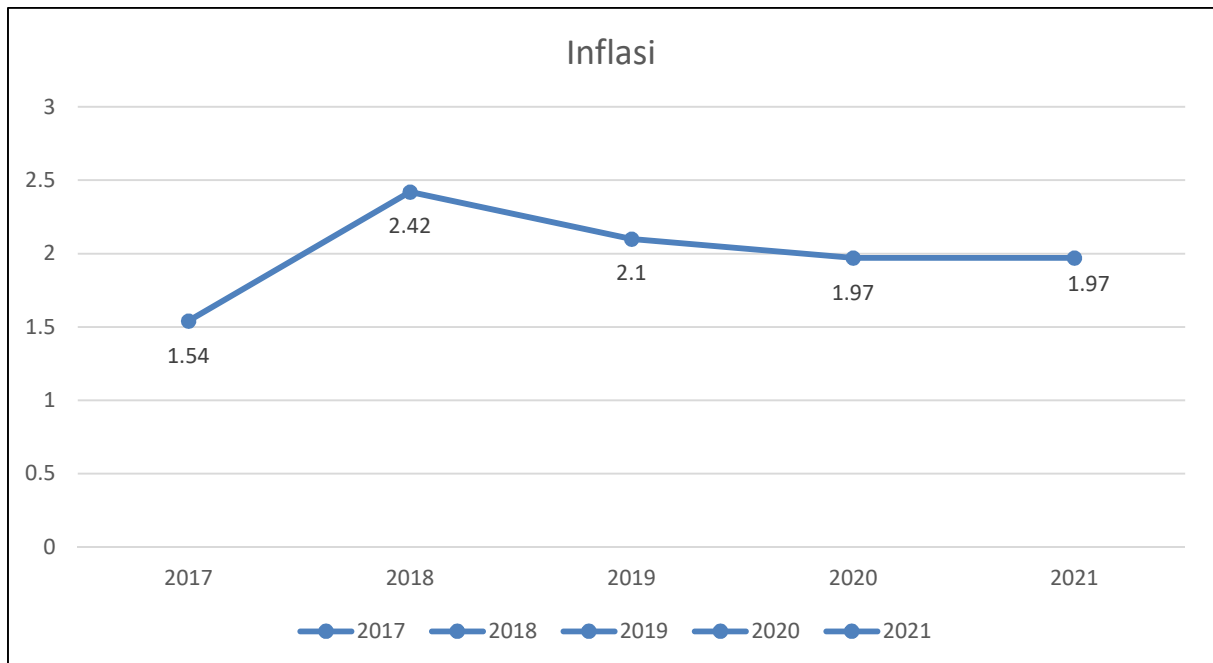
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas dan Bappeda, 2021, (data diolah)

b. Inflasi

Indikator yang digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi adalah inflasi. Inflasi sektoral yang dilihat dalam publikasi ini digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen.

Grafik 3.3

Perkembangan Inflasi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021



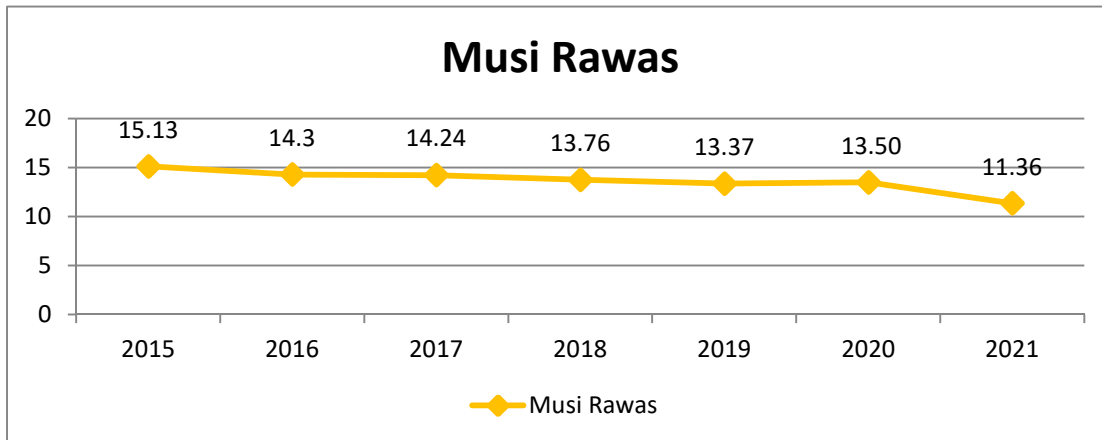
Sumber: BPS, RPJMD Musi Rawas 2016-2021 (data diolah)

Pada tahun 2020 Inflasi di Kabupaten Musi Rawas mengalami penurunan dari 2.1% di tahun 2019 menjadi 1.97%. Sementara berdasarkan rilis dari BPS bahwa Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juli 2021 mengalami Deflasi sebesar 0,06%, Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan Juli 2021 sebesar 0,76%. Sementara Inflasi Tahunan “Year on Year” (Juli 2021 terhadap Juli 2020) sebesar 1,46 %. Berdasarkan grafik diatas dan data rilis BPS tentang angka inflasi Provinsi Sumatera Selatan, inflasi di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 diperkirakan tetap seperti pada tahun 2020 sebesar 1.97%.

c. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih jauh di atas Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, akan tetapi pencapaian pada tahun 2020 sebesar 13,5% ini masih belum memenuhi target RPJMD Kabupaten Musi Rawas yaitu sebesar 13,47%. Sesuai dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, angka kemiskinan di Musi Rawas ditargetkan sebesar 11,36%.

Grafik 3.4
 Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas
 Tahun 2016-2020 dan Target Tahun 2021



Sumber: BPS, RPJMD Musi Rawas 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023.

Mencermati kondisi perekonomian terakhir yang masih dipengaruhi pandemi Covid-19, maka pada Perubahan RKPDP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 yang semula ditargetkan 11,36% diperkirakan menjadi 13,1%. Hal ini juga disesuaikan dengan target angka kemiskinan yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

Grafik 3.2
 Perubahan Proyeksi Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas
 Tahun 2021



Sumber : Bappeda (Data diolah), 2021

Tantangan yang dihadapi pada tahun 2021 adalah adanya kemungkinan terjadinya kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas akibat masih

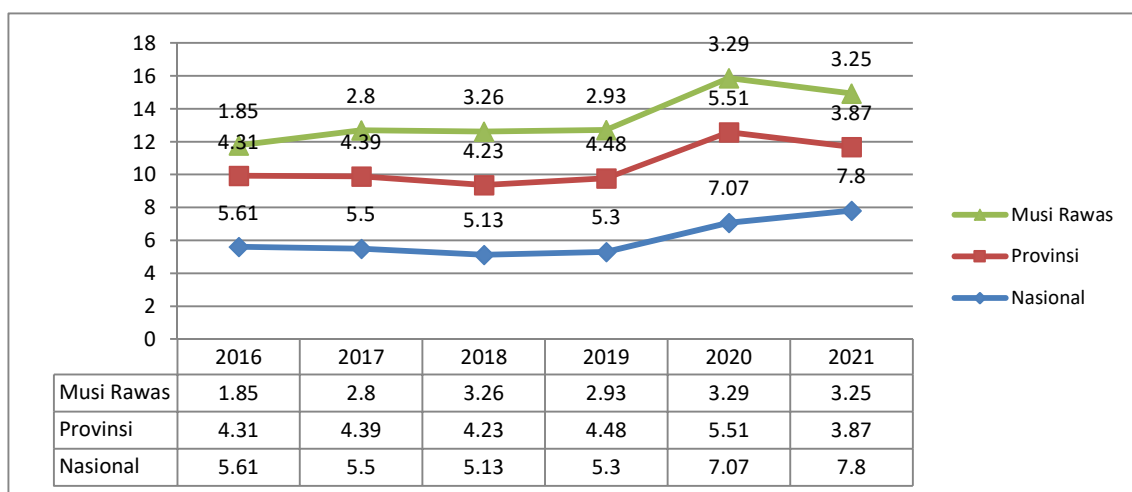
berlanjutnya pandemi Corona Virus Disease 2019 yang mengakibatkan Kabupaten Musi Rawas sempat melaksanakan PPKM Level IV. Untuk itu Pemerintah Kabupaten berusaha untuk tetap menggerakkan berbagai sektor ekonomi agar tetap tumbuh positif melalui berbagai upaya stimulus.

d. Pengangguran

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Musi Rawas adalah pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Sementara itu, untuk tingkat pengangguran di Musi Rawas pada tahun 2020 mencapai 3,29 persen. Pada tahun 2021 tingkat pengangguran di Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan mengalami penurunan yaitu sebesar 3.25, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Grafik 3.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2020 dan Proyeksi Tahun 2021



Sumber: BPS, RPJMD Musi Rawas 2016-2021, RPJMD Sumatera Selatan 2019-2023, RPJMN 2019-2024 (data diolah 2021).

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Rancangan kerangka keuangan menggambarkan kondisi dan analisis keuangan daerah serta prospek pendanaan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021. Kerangka keuangan daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 memberikan gambaran pendanaan pembangunan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah kebijakan untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2021.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Pencermatan terhadap kondisi perekonomian terakhir di Kabupaten Musi Rawas yang diakibatkan oleh pandemic Corona Virus Disease 19 menunjukkan adanya penurunan kondisi ekonomi yang berdampak kepada besaran retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bisa dipungut oleh daerah. Untuk itu perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD.

Tabel 3.2
Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan
Proyeksi Struktur Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	REALISASI APBD TA.2021 TW II	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Bertambah/ Berkurang
1	Pendapatan Asli Daerah	199.070.974.521,00	65.918.694.956,15	293.236.514.261,00	94.165.539.740,00
1.1	Pajak Daerah	86.173.894.375,00	8.442.865.202,00	180.373.894.375,00	94.200.000.000,00
1.2	Retribusi Daerah	4.315.733.125,00	1.797.222.140,00	4.315.733.125,00	-
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.000.000.000,00	6.308.182.934,75	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	102.581.347.021,00	49.370.424.679,40	100.546.886.761,00	(2.034.460.260,00)
2	Pendapatan Transfer	1.503.612.785.930,00	539.779.266.206,00	1.610.165.719.987,00	106.552.934.057,00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.434.813.691.000,00	512.429.661.682,00	1.484.997.193.047,00	50.183.502.047,00

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	REALISASI APBD TA.2021 TW II	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Bertambah/ Berkurang
	a. Dan Perimbangan	1.193.105.812.000,00	-	1.243.289.314.047,00	50.183.502.047,00
	b. Dana Insentif Daerah	52.341.267.000,00	-	52.341.267.000,00	-
	c. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
	d. Dana Keistimewaan	-	-	-	-
	e. Dana Desa	189.366.612.000,00	-	189.366.612.000,00	-
2.2	Transfer Antar Daerah	68.799.094.930,00	27.349.604.524,00	125.168.526.940,00	56.369.432.010,00
	a. Pendapatan bagi hasil	68.799.094.930,00	-	76.168.526.940,00	7.369.432.010,00
	b. Bantuan Keuangan	-	-	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	65.439.596.750,00	44.820.947.700,00	68.366.154.350,00	2.926.557.600,00
3.1	Hibah	65.439.596.750,00	7.187.537.700,00	68.366.154.350,00	2.926.557.600,00
3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	37.633.410.000,00	-	-
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.768.123.357.201,00	650.518.908.862,15	1.971.768.388.598	203.645.031.397,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Daerah TA 2021 sampai dengan Triwulan II baru sebesar 36,79% dari target Pendapatan Daerah TA 2021 hal ini disebabkan dampak pandemi Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022.

3.2.2 Belanja Daerah

Pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan berlaku. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah di arahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Bupati Musi Rawas. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja

Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Berikut ini pelaksanaan terkait dengan efisiensi dan efektifitas belanja daerah :

- Memperbaiki komposisi dan efisiensi belanja dengan peningkatan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas peruntukannya, penyederhanaan jenis program dan kegiatan dan menghindari duplikasi.
- Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistic, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja
- Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran.
- Pengurangan persentase belanja operasional dan peningkatan persentase belanja langsung

2. Prioritas Anggaran

Prioritas penggunaan anggaran tahun 2021 diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam memenuhi tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 yaitu **Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat melalui Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Penanaman Modal menuju Pembangunan Berkelanjutan**. Selain itu juga untuk mendukung kegiatan pelayanan publik dan untuk mendukung pencapaian prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan dan pembangunan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan

dan pemerataan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan dan terarah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 .

3. Pengoptimalan belanja modal

Belanja modal diupayakan dengan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan. Bentuk optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dengan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan berlaku.

4. Transparansi dan Akuntabel

Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja harus dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku. Pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi aspek administrasi dan juga menyangkut proses keluaran dan hasil harus jelas.

Tabel 3.3
Struktur Perubahan Belanja Daerah

No	Uraian	Belanja			
		APBD TA. 2021	REALISASI APBD TA.2021 TW II	Proyeksi Perubahan APBD TA. 2021	Bertambah/ Berkurang
	BELANJA DAERAH	1.832.421.446.761,00	574.452.348.389,28	2.096.055.292.303,00	263.633.845.542,00
1.	Belanja Operasi	1.124.024.055.578,00	427.366.359.560,28	1.279.224.035.049,00	157.661.783.186,00
a.	Belanja Pegawai	590.784.028.714,00	301.394.187.731,00	686.638.909.129,00	127.657.483.753,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	522.503.252.364,00	124.350.021.829,28	578.941.254.912,00	27.097.202.925,00
c.	Belanja Bunga	-	-	-	-
d.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
e.	Belanja Hibah	10.736.774.500,00	1.622.150.000,00	13.643.871.008,00	2.907.096.508,00
f.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
2.	Belanja Modal	460.310.327.833,00	39.667.592.671,00	506.583.991.300,00	43.811.859.752,00
3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	608.099.758,00	13.480.174.720,00	3.480.174.720,00
4.	Belanja Transfer	238.087.063.350,00	106.810.296.400,00	296.767.091.234,00	58.680.027.884,00

No	Uraian	Belanja			
		APBD TA. 2021	REALISASI APBD TA.2021 TW II	Proyeksi Perubahan APBD TA. 2021	Bertambah/ Berkurang
a.	Belanja Bagi Hasil	-	-	9.048.962.750,00	9.048.962.750,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	238.087.063.350,00	106.810.296.400,00	287.718.128.484,00	49.631.065.134,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

Pada tahun 2021 realisasi belanja daerah pada semester I baru sebesar 31,35% dari pagu belanja. Rendahnya realisasi ini masih dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 dengan rincian realisasi belanja operasi terealisasi 38,10%, belanja modal 8,57%, Belanja Tidak Terduga 6,08% dan belanja transfer 44,86%. Sesuai dengan momentum pemulihan ekonomi dan sosial daerah dari Pandemi Covid-19.

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel 3.4
Struktur Pembiayaan Daerah

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	REALISASI APBD TA.2021 TW II	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Bertambah/ Berkurang
	PEMBIAYAAN DAERAH	64.298,089.560	1.126.731.856	124.286.903.705	59.988.814.145
1.	Penerimaan pembiayaan	74.298,089.560	1.126.731.856	134.286.903.705	59.988.814.145
a.	SiLPA	74.298,089.560	1.126.731.856	134.286.903.705	59.988.814.145
b.	Penerimaan Piutang daerah	-	-	-	-
2.	Pengeluaran pembiayaan	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,000,000,000	-	10,000,000,000	-
b.	pembayaran pokok utang	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Musi Rawas, 2021

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas melalui penyelarasan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat keutamaan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2021 ini merupakan pelaksanaan tahun keenam belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun keenam atau tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016- 2021 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sekaligus transisi menuju pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2021, RKPD Kabupaten Musi Rawas mengacu mempertimbangkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026.

Tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan

merupakan target yang ingin dicapai di Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan
1.	Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik
2.	Membangun sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan berkualitas Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal
3.	Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana
4	Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya Status Desa

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 terdapat 21 (duapuluh satu) Sasaran Pembangunan yang di terjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2021. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Indeks RB	53,37 (CC)
		Nilai SAKIP	B (68,52)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,52
2.	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	2.85

		Indeks Profesionalitas ASN	60
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,22 (A)
4.	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,17
5.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks Kesehatan	73
6.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86.45
		Indeks Pembangunan Pemuda	0,176
		Status Kabupaten Layak Anak	650 Pratama
7.	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	100%
8.	Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73
9.	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan lokal dan kebudayaan	Persentase Lembaga Adat yang aktif	70
		Indeks Budaya Literasi Daerah	29.8
10.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	91,26
11.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)	Indeks Infrastruktur Dasar	96
		Indeks Sumber Daya Air	48
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	72,76
13.	Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	94
14.	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	48,27
15.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Rp 5.938,42 Milyar
16.	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	Rp 1636,85 milyar
		PDRB sektor perdagangan	Rp 943,6 milyar
17.	Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	5
18.	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13.1
19.	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3.25
20.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,72
21.	Meningkatnya status desa	Persentase Peningkatan Desa Maju	29,56

4.2. Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2021

RKPD Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 sekaligus tahun transisi menuju tahun pertama RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 maka pemerintah daerah perlu untuk menetapkan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2021 guna mendukung prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021. Tema pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2021 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 adalah **"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"**. Sedangkan tema

pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 adalah “**Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima**”.

Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Musi Rawas, maka tema RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 adalah :

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat melalui Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Penanaman Modal menuju Pembangunan Berkelanjutan”

Pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia membawa implikasi terhadap terganggunya pertumbuhan ekonomi global. Data yang dilansir International Monetary Fund (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi secara global diproyeksikan menjadi di angka – 4,4 persen pada tahun 2020. Penurunan proyeksi ini didorong oleh ketidakpastian tinggi seputar penyebaran virus dan upaya pemulihan perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 sejatinya tidak hanya melanda Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara di dunia. Resesi ekonomi menjadi ancaman baru bagi negara-negara di belahan dunia. Pertumbuhan ekonomi global yang berkontraksi pada tahun ini menandakan semakin dalamnya ketidakpastian ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam perencanaan pembangunan tahun 2021 akan terfokus pada 3 keyword/kata kunci tema yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Keyword tema pembangunan tahun 2021 adalah:

a. *Pengentasan Kemiskinan (Penanganan Dampak Ekonomi)*

Seperti kita ketahui bersama bahwa terjadinya Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang signifikan hampir terhadap seluruh sektor kehidupan, antara lain ;

- Diperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat;
- Peningkatan pengangguran;
- Peningkatan kerawanan sosial/kriminalitas;
- Angka kemiskinan naik;
- Rawan pangan;
- Kesenjangan sosial ekonomi meningkat;
- Penurunan kontribusi dari sektor pariwisata, industri, dan jasa pada pertumbuhan ekonomi;
- Inflasi meningkat;

- Pembangunan infrastruktur terhambat.

Dengan demikian penanganan dampak ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan merupakan seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen. Kemiskinan merupakan persoalan di Kabupaten Musi Rawas sehingga perlu upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan. Selain pengendalian pertumbuhan penduduk, beberapa kebijakan langsung dalam upaya pengentasan kemiskinan juga telah dilakukan oleh pemerintah seperti kebijakan subsidi silang, skema bantuan langsung masyarakat (BLM), pemberian modal usaha untuk pemberdayaan masyarakat, bantuan kesehatan dan pendidikan, serta program jaring pengaman lainnya. Namun, upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin memang bukan perkara mudah, butuh waktu dan konsistensi serta upaya yang luar biasa dengan menciptakan berbagai terobosan dan kebijakan yang tepat dan efektif.

Terlebih lagi, dengan adanya wabah Covid 19 maka bisa dipastikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas akan meningkat. Sehingga sangat diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mampu memberikan solusi dan efek percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas.

b. *Pembangunan Sumber Daya Manusia (Penanganan Kesehatan dan Penyediaan Jaringan Pengaman Sosial)*

Pembangunan Sumber Daya Manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kapasitas dari masyarakat Kabupaten Musi Rawas. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang dimaksud bertujuan untuk :

- Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Musi Rawas;
- Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dengan adanya perluasan lapangan kerja, pulihnya perekonomian dan pendapatan yang layak;
- Adanya kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, energi dan air bersih.

c. *Peningkatan Penanaman Modal (Penanganan Dampak Ekonomi)*

Musi Rawas memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan perlu dikembangkan akan tetapi belum dikelola secara maksimal. Hal ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi pemerintah untuk mengolah potensi yang tersedia menjadi ekonomi riil serta meningkatkan penanaman modal yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berkomitmen untuk menghilangkan kendala serta hambatan teknis yang selama ini menjadi permasalahan dalam bidang penanaman modal yaitu :

- Penyediaan lahan bahan baku yang murah sesuai standar kebutuhan penanam modal yang tidak merusak lingkungan;
- Terjaminnya situasi dan kondisi keamanan Musi Rawas.
- Tersedianya tenaga kerja yang handal dan memadai serta upah buruh yang bersaing dan berkualitas
- Perijinan yang cepat, tidak adanya pungutan liar serta infrastruktur yang memadai;

Tabel 4.3

Tema dan Tematik Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

TEMA	
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MELALUI PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN PENANAMAN MODAL MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
TEMATIK	
PEMULIHAN EKONOMI	PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Prioritas: 1. Pengentasan Kemiskinan 2. Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi 3. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata serta Berwawasan Lingkungan	Prioritas : 1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
KONDISI PERLU	
Prioritas : 1. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	

Untuk mencapai target dalam tema pembangunan tersebut kemudian ditentukan tematik yang sesuai dengan mempertimbangkan 2 (dua) dimensi pembangunan. Dimensi pemulihan ekonomi mengangkat tematik pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas, sedangkan dimensi pembangunan berkelanjutan mengangkat tematik pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Musi Rawas. Kedua tematik tersebut didukung dengan kondisi perlu yang diwujudkan dalam Peningkatan Layanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.

Adapun keselarasan antara Tema Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Tema Pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.4
Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2021
dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2021 dengan Tema Pembangunan Musi Rawas Tahun 2021

RKP Nasional	RKPD Musi Rawas	RKPD Sumatera Selatan
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat melalui Pengentasan Kemiskinan, Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Penanaman Modal menuju Pembangunan Berkelanjutan”	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima”

Keselarasan tema pembangunan antara RKPD Musi Rawas dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah memiliki kata kunci “**Pemulihan Ekonomi**”. Pemulihan Ekonomi adalah keadaan ekonomi dalam pola konjungtur yang ditandai oleh mulai meningkatnya kembali produksi dan konsumsi, penambahan kesempatan kerja, jumlah uang beredar dan peningkatan permintaan kredit. Adanya rencana “Pemulihan Ekonomi” dilatarbelakangi oleh dampak terjadinya penyebaran wabah Covid 19 yang menyebabkan lumpuhnya sektor perekonomian, menurunnya pendapatan perkapita, menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini sudah barang tentu akan berdampak terhadap peningkatan kemiskinan di Indonesia termasuk juga di provinsi Sumatera Selatan bahkan di Kabupaten Musi Rawas.

4.3 Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan Untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun sebelumnya, dan memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Musi Rawas pada Tahun 2021, maka terdapat beberapa telaah yang harus dilakukan, yaitu:

4.3.1. Telaah Terhadap RKP 2021

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Perencanaan pembangunan jangka menengah skala nasional mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Perencanaan nasional Tahun 2021 mengacu kepada RPJMN Tahun 2020 – 2025.

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 adalah “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, maka tujuan RPJMN Tahap ke-4 Tahun 2020-2024 diarahkan kepada “**Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing**”.

Tujuan RPJMN ke-4 dapat tercapai dengan acuan pada empat fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Kelembagaan politik dan hukum.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif.
4. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan pada RPJPN maka tema pada RPJMN 2020-2024 adalah “**Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan**” yang didukung dengan :

1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Karakter Bangsa
3. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas
4. Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan
5. Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Selanjutnya berdasarkan RPJPN dan RPJMN 2020-2024 maka telah ditetapkan tema RKP Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

“PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL”

Tema RKP Tahun 2021 tersebut didukung dengan 7 (tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta
7. Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

4.3.2. Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Pada tahun 2021 tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima”

Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 terdiri dari:

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Pemulihan Ekonomi yang Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata
3. Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragama

4.3.3. Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas

Sesuai dengan pasal Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu perumusan rancangan awal RKPD adalah penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten.

Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena menjadi pertimbangan dalam merumuskan permasalahan daerah, sehingga diharapkan dapat memiliki kontribusi positif dalam menyempurnakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di masa yang akan datang. Penyusunan ini sekaligus merupakan penyaluran dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses maupun komunikasi dengan masyarakat pada berbagai event kegiatan sosial kemasyarakatan. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini sebagai bagian dari strategi mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas sehingga diupayakan memiliki keselarasan dan kesinambungan dengan RKPD 2021 sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas yang disampaikan untuk penyusunan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Bidang Kesehatan

Dalam penanganan penyebaran virus covid 19, pemerintah daerah diharapkan menjadikan sektor kesehatan menjadi prioritas dan tetap mengikuti arahan pemerintah pusat. Pemerintah daerah bisa menginisiasi kebijakan kebijakan pendukung untuk diterapkan di Musi Rawas seperti mengkampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah, penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat, edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid tes atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri, dan isolasi Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit. Untuk itu pemerintah Kabupaten Musi Rawas bisa memberdayakan RS dr. Sobirin, RS. Muara Beliti serta puskesmas rawat inap untuk penyiapan ruang-ruang isolasi dan penanganan penderita covid 19

Selama masa pandemic covid 19, sistem Kesehatan dihadapkan pada menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemic covid 19 dan pemenuhan pelayanan Kesehatan dasar. Keseimbangan ini wajib dijaga agar tidak terjadi peningkatan kasus penyakit lain setelah pandemi COVID-19 usai. Pelayanan Kesehatan dasar yang dimaksud adalah pelayanan Kesehatan rutin dasar yang kebutuhannya akan terus ada di masyarakat. Pelayanan Kesehatan yang dimaksud meliputi Imunisasi, pemeriksaan Ibu

hamil, pengobatan pasien TB, HIV, Penyakit kronis seperti Diabetes, Hipertensi, dan sebagainya. Untuk itu perlu mendapatkan perhatian khususnya pada peningkatan kualitas layanan puskesmas, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RS dr. Sobirin dan RS. Muara Beliti dengan peningkatan sarana dan prasarana dan Sosialisasi Program Hidup Bersih Sehat untuk meningkatkan kualitas pola hidup sehat masyarakat dan mencegah meningkatnya penyakit menular dan tidak menular di masyarakat.

b. Bidang Pendidikan

Penyebaran virus Covid 19 yang mulai ada di Indonesia telah merubah tatanan kehidupan masyarakat terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah dalam rangka mencegah penularan covid-19 perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah. Akses internet menjadi kebutuhan pokok dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Disisi lain, peningkatan layanan pendidikan dasar tetap harus tetap menjadi fokus perhatian kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Kondisi lingkungan sekolah yang kurang memadai memerlukan penanganan yang terus menerus dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang nyaman untuk proses belajar mengajar terutama di tingkat SD, TK dan PAUD. Disamping itu kelengkapan sarana prasarana belajar juga tidak boleh terabaikan terutama untuk menunjang kegiatan pembelajaran di tingkat SMP. Kegiatan pembelajaran juga perlu didorong melalui keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai prakarsa masyarakat untuk meningkatkan kesempatan warga masyarakat memperoleh pengetahuan dan ketrampilan.

c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kondisi infrastruktur jalan dan jaringan irigasi di Kabupaten Musi Rawas yang mengalami kerusakan perlu segera mendapat penanganan agar tidak semakin parah dan menghambat aktivitas transportasi masyarakat maupun budidaya pertanian. Oleh karenanya perlu segera dilakukan kegiatan rehabilitasi pada poros jalan maupun jaringan irigasi di sejumlah tempat yang sedang mengalami kerusakan. Disamping masalah kerusakan, konstruksi pengaman jalan juga perlu dibangun secara bersamaan untuk tujuan meningkatkan umur teknis bangunan utamanya melalui perkuatan tebing jalan dan saluran drainase jalan.

Dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman di sejumlah tempat di Kabupaten Musi Rawas, dipandang perlu untuk meningkatkan penyediaan prasarana dasar air bersih serta penataan jalan lingkungan, guna mewujudkan kualitas permukiman yang lebih layak. Sementara melihat kondisi sejumlah besar keluarga miskin yang masih tinggal di Rumah Tak Layak Huni (RTLH), maka penanganan persoalan RTLH harus menjadi komitmen bersama baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa.

Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi perlu menjadi perhatian khusus, khususnya jaringan internet. Di masa pandemic covid 19 dimana pembelajaran anak sekolah dilaksanakan secara daring maka kebutuhan akan internet menjadi mutlak. Untuk itu diharapkan peran eksekutif untuk menyediakan internet gratis bagi sekolah dan desa.. Penuntasan blank spot area juga perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.

d. Bidang Ekonomi

Pertanian dan Perkebunan masih merupakan sektor dominan dalam struktur perekonomian Kabupaten Musi Rawas dengan serapan tenaga kerja terbesar dibanding sektor-sektor lain. Mendorong kembali pertumbuhan sektor pertanian dan Perkebunan mempunyai arti strategis bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dan sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan mengingat masyarakat miskin mayoritas berada di sektor pertanian dan perkebunan.

Upaya merevitalisasi kondisi usaha tani perlu disokong dengan peningkatan kondisi infrastruktur pertanian berupa pembangunan jalan pertanian dan jalan usaha tani, pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi tingkat usaha tani. Pada aspek budidaya pertanian diperlukan modernisasi alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Demikian pula dalam pengembangan peternakan diperlukan upaya peningkatan populasi di seluruh wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Potensi sektor perikanan air tawar yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Rawas harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Pengembangan perikanan air tawar diupayakan secara arif sehingga penggunaan air irigasi tidak terganggu.

Menghadapi dampak ekonomi pandemi, pemerintah perlu memberikan prioritas dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran yang besar. Berbagai kebijakan perlu dirancang untuk melindungi dan memulihkan UMKM di tengah pandemi Covid-19.

e. Bidang Keuangan Daerah

Dalam bidang Keuangan daerah, diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PAD harus selalu dilaksanakan. Hal yang perlu dipikirkan adalah sistem digitalisasi sistem retribusi dan perpajakan, semakin hari sudah seharusnya masyarakat semakin diberikan kemudahan dalam mekanisme pembayaran berbagai jenis pajak dan retribusi tersebut. Penentuan target pendapatan asli daerah sudah seharusnya berbasis studi potensi terhadap semua sektor jenis pendapatan bukan dengan metode prediksi atau perkiraan tambahan persentase saja.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hendaknya dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga predikat WTP bisa dipertahankan.

4.3.4. Telaah Terhadap Hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan Evaluasi terhadap RKPD tahun sebelumnya dilakukan terhadap tiga aspek yaitu :

- a. Evaluasi terhadap capaian indikator makro RKPD tahun sebelumnya:
 1. Secara umum, hampir seluruh indikator memiliki capaian kinerja diatas 75%.
 2. Ada beberapa indikator makro yang capaiannya perlu ditingkatkan yaitu “**Angka Kemiskinan**”. Meskipun angka kemiskinan setiap tahun mengalami penurunan, namun angka kemiskinan belum dapat mencapai target “**Satu digit**” sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Provinsi yaitu Angka Kemiskinan satu digit sehingga diperlukan upaya yang maksimal dari OPD dan pihak-pihak terkait agar capaian kerjanya dapat meningkat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Evaluasi Indikator Sasaran RKPD tahun sebelumnya
Beberapa indikator yang capaian kerjanya kurang dari 75% yaitu :
 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian yang capaian kerjanya 56,50%.
 2. Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal yang capaian kerjanya 60,00%.
 3. Persentase Anak Usia SD yang Hafidz Al-Quran Jus 30 yang capaian kerjanya 59,66%.
- c. Evaluasi Pelaksanaan terhadap Program RKPD Tahun 2019 dan Realisasi Fisik mencapai 96,84% dan Realisasi Keuangan mencapai 93,09% atau termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**

Secara umum Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan menjalankan program/kegiatan/indikator antara OPD satu dengan yang lain, seharusnya pada saat menentukan program/ kegiatan/indikator hal yang pertama perlu diperhatikan adalah Tupoksi dari OPD tersebut. Setelah tupoksi diketahui, langkah kedua adalah menganalisis data-data indikator yang relevan dengan tupoksi tersebut. Jika data indikator menunjukkan kondisi yang belum baik, maka dapat dibuat program/kegiatan, namun jika dirasa sudah tidak ada persoalan, maka dapat melihat apakah terdapat persoalan lain yang relevan dengan tupoksi dan perlu diberikan solusi. Jika ya, maka dari persoalan tersebut dapat dibuat analisis *Logical Frame Work*, sehingga munculnya program/kegiatan/indikator berangkat dari kebutuhan akan penyelesaian terhadap persoalan eksiting (bukan dari keinginan) yang relevan dengan Tupoksi-nya. OPD yang memiliki persoalan tumpang tindih kewenangan perlu melakukan perbaikan program-kegiatan-indikatornya.

- b. OPD perlu memperhatikan capaian indikator program yang masih rendah. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah apakah target indikator terlalu tinggi, apakah indikator kurang tepat dalam menggambarkan hasil keluaran dari program, atau apakah program tersebut belum dilaksanakan dengan optimal. Dengan demikian dapat dilakukan perubahan target/ mengganti indikator dan/atau mengoptimalkan pelaksanaan program/kegiatan. Dalam menentukan target-target indikator harus berdasarkan data-data kondisi eksisting atau data-data realisasi periode lalu yang akurat sebagai asumsi. Sehingga target indikator tidak melebihi batas kemampuan sumberdaya OPD (*man, money, method, material, machine*).
- c. Menyusun perencanaan anggaran tidak dapat dipisahkan dari penyusunan perencanaan kebijakan (analisa terhadap persoalan eksternal/internal yang perlu diberikan solusi). Dengan kata lain menyusun rencana anggaran harus melalui analisa kebutuhan (bukan keinginan), sehingga alokasi anggaran untuk kegiatan/program bertitik tolak dari persoalan atau kewajiban yang perlu dilaksanakan (amanah Kepala Daerah/amanah RPJMN). Dengan demikian program dan kegiatan dapat dibiayai lebih realistis (efisien). Untuk OPD yang memiliki anggaran besar dan serapan kecil maka perlu melakukan perubahan perencanaan anggaran dan kebijakan.

4.3.5. Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Musi Rawas

Strategi dan prioritas pembangunan disusun agar mencapai tujuan dan hasil yang terukur dalam hal melaksanakan kegiatan di daerah agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah secara sistematis dan terarah.

Berdasarkan prioritas pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan pembangunan wilayah diupayakan untuk melakukan percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong pembangunan wilayah di setiap kecamatan sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Dalam hal mewujudkan visi dan pelaksanaan misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021.

- c. Pembangunan pemukiman perkotaan, fasilitas sosial, ekonomi dan budaya, serta RTH untuk mendukung fungsi pusat perkotaan dengan pelayanan skala kabupaten.
 - d. Muara Beliti yang berfungsi sebagai *Agropolitan Center (AC)* didukung dengan pembangunan Terminal Peti Kemas di desa Durian Remuk dan Pergudangan.
- 2). Pembangunan Sub Pusat Agropolitan atau Pusat Pelayanan pada 4(empat) lokasi yaitu Simpang Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan dan Simpang Semambang berupa :
- a. Sub Terminal Agropolitan.
 - b. Kawasan pertokoan/ruko.
 - c. Perkantoran untuk jasa dan keuangan.
 - d. Sub Terminal Penumpang.
 - e. Permukiman perkotaan.
 - f. Industri agro.
 - g. Workshop dan fasilitas pendukung kegiatan agropolitan.
- 3). Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung terbangunnya sistem perkotaan dan agropolitan, yaitu :
- a. Jalan kolektor yang menghubungkan pusat agropolitan Muara Beliti dengan sub pusat agropolitan dan antar sub pusat agropolitan.
 - b. Pembangunan sistem pengairan berupa Bendung Daerah Irigasi (DI) Lakitan, DI Kelingi, DI Megang Tikip, dan DI lainnya, dengan sistem jaringan irigasi untuk kecamatan yang telah dan akan dikembangkan pertanian padi-sawah seperti Tugumulyo, Muara Beliti, Purwodadi, Sumber Harta, STL Ulu Terawas, dan Megang Sakti.
 - c. Pembangunan infrastruktur strategis lainnya seperti jalan Kereta Api (KA) yang akan menghubungkan Lubuklinggau, rencana Terminal Peti Kemas (di Selatan Muara Beliti), Palembang dan peningkatan Bandara Silampari.
- 4). Pembangunan fasilitas sosial ekonomi pada setiap ibukota kecamatan (sub pusat pelayanan) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, yaitu:
- a. Pasar Kecamatan
 - b. Puskesmas
 - c. Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah
 - d. Fasilitas umum; Tempat Ibadah, RTH dan lainnya

4.3.6. Telaah Terhadap Isu Strategis

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, maka Kabupaten Musi Rawas menerjemahkan permasalahan pembangunan ke dalam isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Isu Strategis Pembangunan Daerah

Permasalahan	Isu Strategis
Bertambahnya jumlah penduduk miskin sebagai dampak terjadinya pandemic covid19	Penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi secara terintegrasi terhadap penduduk dan sektor ekonomi produktif
Banyaknya sektor usaha kecil, menengah dan koperasi yang terdampak akibat terjadinya pandemic covid19	
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas pelayanan dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta sarana dan prasarana kesehatan	
Belum optimalnya investasi dan daya saing daerah	Peningkatan investasi dan daya saing daerah serta pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian, perikanan hulu sampai hilir, destinasi wisata dan UMKM
Masih rendahnya hasil produksi dan rendahnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan akibat dari belum tertatanya system pertanian yang berkelanjutan dan pemasaran produk pertanian dan perikanan	
Belum optimalnya penciptaan dan pengembangan destinasi pariwisata	
Peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM	
Infrastruktur yang belum merata	Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata
Penguatan konektivitas antar wilayah	
Perlunya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintah dan pelayanan prima	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public dengan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas dan aparatur pemerintah yang bersih dan pelayanan prima
Perlunya peningkatan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat	

4.4 Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2021

Dengan memperhatikan telaah tersebut diatas, maka prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 adalah:

Tabel 4.7
Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021	Indikator Prioritas Daerah	Target
1	Pengentasan Kemiskinan	Angka Kemiskinan	12,41
		Gini Rasio	0,230
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia	IPM	67,15
3	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Realisasi nilai investasi	6 T

		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	6,1%
4	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Persentase Konektivitas antar wilayah	89 %
		Indeks Infrastruktur Dasar	85
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,27
5	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Indeks Reformasi Birokrasi	70

Selain memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana yang tertuang didalam tabel 4.6 serta RPJMD Kabupaten Musi Rawas dalam penentuan prioritas daerah tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga memperhatikan arahan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang didalam RPJMN 2020-2024 dan RKP Tahun 2021, serta RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021. Arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi ini selanjutnya dilakukan sinkronisasi kondisi dan karakteristik daerah, maka prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 adalah untuk mendukung pencapaian fokus dan sasaran pembangunan daerah dengan mengacu isu permasalahan yang ada di kabupaten Musi Rawas maka penjabaran tema dan prioritas pembangunan dituangkan ke dalam arah kebijakan, program prioritas dan program nomeklatur pembangunan daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8
Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Pada RKPD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
1. Pengentasan Kemiskinan	1. Menurunnya angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Perlindungan sosial secara terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Kemiskinan secara terpadu • Peningkatan perlindungan sosial secara terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan Angka Kemiskinan • Peningkatan Perlindungan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Kemiskinan • Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
	2. Memberdayakan Ekonomi Perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> • Membina usaha ekonomi produktif masyarakat. • Mendirikan lembaga keuangan mikro di tingkat desa dan kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ekonomi perdesaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan perekonomian pedesaan
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya kualitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan • Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan • Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
	2. Meningkatnya kualitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan program wajib belajar dua belas tahun • Peningkatan daya tampung pada lembaga-lembaga PAUD baik yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pendidikan • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan • Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Prioritas Pembangunan Pada RKPD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
		bersifat formal maupun non formal			
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan budaya literasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan budaya literasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan budaya gemar membaca
	3.Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan suasana kehidupan agamis dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan agama secara formal dan nonformal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan wawasan keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Musi Rawas Bertilawah
	4.Meningkatnya penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pengelolaan keragaman dan nilai budaya daerah
	5.Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pemberdayaan pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pemuda
3. Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	1.Meningkatnya jumlah penanaman modal di Kabupaten Musi Rawas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan perizinan terpadu berbasis ICT 	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penanaman Modal
	2.Meningkatnya kontribusi pertanian dan perikanan terhadap perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan mutu melalui pengembangan teknologi pertanian hulu sampai hilir serta pengembangan bisnis perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan sistem pertanian terpadu • Pengembangan perikanan budidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi, dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi dan produktivitas Pertanian, perkebunan dan peternakan • Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan

Prioritas Pembangunan Pada RKPD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
	3.Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koperasi dan UMKM serta lembaga ekonomi non pertanian 4.Meningkatnya Pengembangan IKM	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM di Kabupaten Musi Rawas 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Koperasi, UMKM dan IKM 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM dan IKM 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Koperasi, UMKM dan IKM
	5.Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengelolaan Pasar 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana pasar
	6.Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan dan pengembangan destinasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Penciptaan destinasi wisata baru Pemasaran destinasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan objek wisata Pengembangan pemasaran pariwisata
4. Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	1.Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap 2.Meningkatnya Infrastruktur Keciptakarya dan Pengairan 3.Meningkatnya Pemenuhan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pembangunan sarana keciptakarya Pembangunan sarana pemukiman Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan/pengendalian banjir/pengamanan sungai
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembangunan sanitasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana penyediaan air minum dan air bersih

Prioritas Pembangunan Pada RKPD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
					<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana sanitasi
				<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan infrastruktur TIK 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan Prasarana TIK
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan infrastruktur perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan
	5.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meningkatkan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan yang menyeluruh, terpadu, adil dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan kualitas lingkungan hidup
	6.Meningkatnya pelayanan kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penanggulangan bencana Mengurangi resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas lembaga penanggulangan bencana daerah Pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan desa tanggap bencana

Prioritas Pembangunan Pada RKPD	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
5. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	1. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Berkualitas dan Tepat Waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah
	2. Meningkatnya keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka peningkatan kemandirian dan kenyamanan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasarakatan kamtibmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan kantrabtibmas 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 didukung dengan Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah. Program Prioritas dan Kegiatan Daerah harus memiliki indikator dan target yang akan dicapai pada tahun 2021. Masing-masing Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah akan dijabarkan sebagai berikut :

PRIORITAS DAERAH PENGENTASAN KEMISKINAN



KETERANGAN



: Prioritas RKPD



: Program Prioritas

Penurunan Angka Kemiskinan

Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	12,41	Dinas Sosial, DPMD

Peningkatan Perlindungan Sosial

Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya PMKS yang tertangani	Persentase PMKS yang tertangani (%)	13,23%	Dinas Sosial

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya ekonomi pedesaan	Jumlah lembaga ekonomi desa yang aktif (%)	80%	DPMD

Tabel 4.9

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pengentasan Kemiskinan**

Program Prioritas : **Penurunan Angka Kemiskinan**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	OPD Penanggungjawab
Penanganan kemiskinan	Meningkatnya jumlah penduduk yang diatas garis kemiskinan	- Persentase Penduduk diatas garis kemiskinan	87,59 %	Dinas Sosial

Tabel 4.10

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pengentasan Kemiskinan**

Program Prioritas : **Peningkatan Perlindungan Sosial**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	OPD Penanggungjawab
Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	- Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	13, 23	Dinas Sosial

Tabel 4.11

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

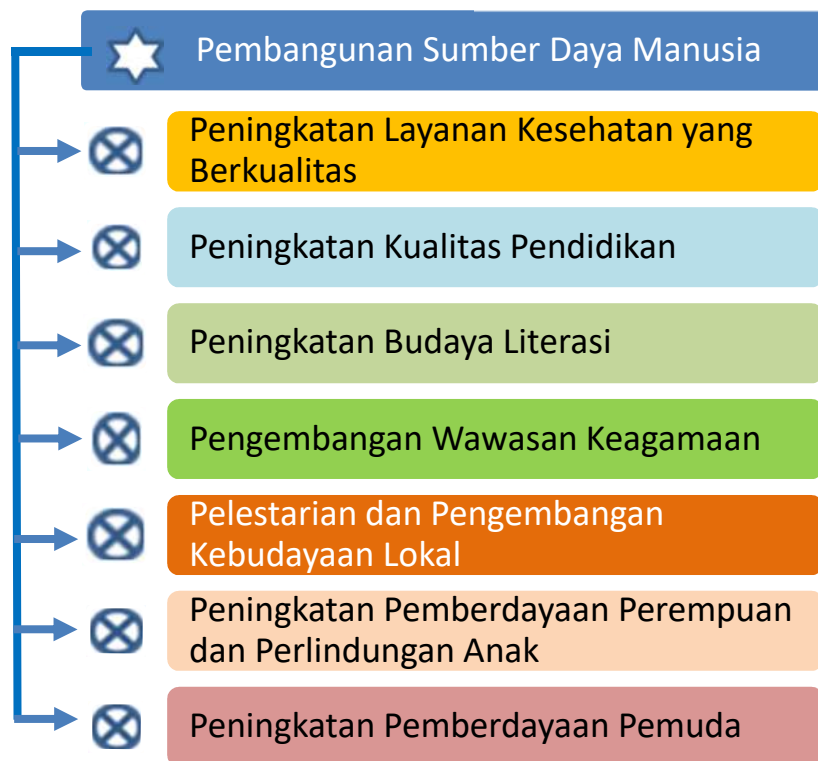
Prioritas Daerah : **Pengentasan Kemiskinan**

Program Prioritas : **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	OPD Penanggungjawab
Penguatan Perekonomian Perdesaan	Meningkatnya Perekonomian Perdesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	80 %	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

PRIORITAS DAERAH

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



KETERANGAN



: Prioritas RKPD



: Program Prioritas

Peningkatan Pemberdayaan Pemuda			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Peningkatan peran serta pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda		Dinas Pemuda dan Olahraga

Peningkatan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup (tahun)	70	Dinas Kesehatan

Peningkatan Kualitas Pendidikan			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,45 tahun	Dinas Pendidikan
	Harapan Lama Sekolah	12,30 tahun	Dinas Pendidikan

Peningkatan Budaya Literasi			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya budaya literasi	Indeks kegemaran membaca	50	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Pengembangan Wawasan Keagamaan			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Rasio Tempat Beribadah /1000 penduduk	65	Bag. Kesra Setda, Kecamatan

Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Berkembangnya kebudayaan lokal	Terpeliharanya kebudayaan Lokal	95%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Peningkatan peran serta perempuan	Indeks Paritas Gender	88	Dinas PPPA
Meningkatnya perlindungan anak	Rasio korban kekerasan terhadap anak	0,1 %	Dinas PPPA

Tabel 4.12
Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
Program Prioritas : **Peningkatan Layanan Kesehatan yang Berkualitas**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	OPD Penanggungjawab
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	- Angka Harapan Hidup (Th)	68,72	Dinas Kesehatan, , RS dr. Sobirin
		- Angka kematian bayi (1000/pddk)	8,70	
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tertanganinya Penyebaran Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Angka kematian Ibu melahirkan (1000/pddk)	97,00	
		- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	90,00	
		- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	90,00	

Tabel 4.13
Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
Program Prioritas : **Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Peningkatan Akses Pemerataan Layanan Pendidikan	Meningkatnya Akses Pemerataan Layanan Pendidikan	- APK SD/MI	131,00	Dinas Pendidikan
		- APM SD/MI	99,50	
		- APK SMP/MTS	110,00	
		- APM SMP/MTS	98,50	
Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran	- Persentase SD dan SMP terakreditasi A	35,00%	
		- Persentase Manajemen Layanan Pendidikan yang Akuntabel (%)	95,00%	

Tabel 4.14
Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
Program Prioritas : **Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Peningkatan Budaya Gemar Membaca	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan	- Rasio jumlah kunjungan ke perpustakaan	12,50%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		- Jumlah perpustakaan	317	

Tabel 4.15
Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Program Prioritas : **Pengembangan Wawasan Keagamaan**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Musi Rawas Bertilawah	Meningkatnya penerapan nilai-nilai religius	- Jumlah Anak Usia SD yang bisa baca tulis Al Quran - Jumlah Anak SD yang Hafidz Al Quran Juz 30	6526 Anak 1050 anak	Bag. Kesra Setda, Kecamatan, Dinas Pendidikan

Tabel 4.16
Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Program Prioritas : **Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Pengembangan pengelolaan keragaman dan nilai budaya daerah	Meningkatnya pengelolaan nilai budaya daerah	- Jumlah Festival Seni dan Budaya yang diselenggarakan	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 4.17
Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Program Prioritas : **Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Pemberdayaan perempuan dan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	- Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga - Skor Kabupaten Layak Anak (Nilai)	43% Madya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 4.18
Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Program Prioritas : **Peningkatan Pemberdayaan Pemuda**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Peningkatan kualitas pemuda	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan	- Jumlah organisasi pemuda yang dibina	18	Dinas Pemuda dan Olahraga

PRIORITAS DAERAH

PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DAN KETAHANAN EKONOMI

Pengembangan Pariwisata			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase peningkatan kunjungan wisata	7,4%	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Penciptaan Iklim Yang Kondusif yang Berinvestasi			
Sasaran	Indikator	Target 2020	Penanggung Jawab
Meningkatnya jumlah investasi	Realisasi Nilai Investasi	6 T	DPMPTSP



Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani	102,7	Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan

KETERANGAN

☆ : Prioritas RKPD
 ⊗ : Program Prioritas

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	9,91	Disperindag

Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM dan IKM			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas koperasi, UMKM dan IKM	Persentase Peningkatan Produksi UMKM	8,32%	Dinas Koperasi dan UKM, Disperindag, dan Bag. Ekonomi

Tabel 4.19

Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
 Prioritas Daerah : **Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi**

Program Prioritas : **Penciptaan Iklim yang Kondusif untuk Berinvestasi**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	OPD Penanggungjawab
Peningkatan Jumlah Penanaman Modal	Meningkatnya Jumlah PMA dan PMDN	- Persentase Peningkatan PMA	5%	DPMPPTSP
		- Persentase Peningkatan PMDN	5%	DPMPPTSP

Tabel 4.20

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
 Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi**

Program Prioritas : **Peningkatan Produksi, Nilai Tambah Hasil Pertanian, Perkebunan, Perternakan dan Perikanan**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan	- Jumlah Produksi Padi (Ton)	399.408	Dinas Pertanian dan Peternakan
		- Jumlah Produksi Jagung (Ton)	43.556	
		- Jumlah Produksi Daging Sapi (Ton)	3.194,61	
		- Jumlah produksi telur (Ton)	1.221,02	
Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	63.702,40	Dinas Perikanan
		- Jumlah Produksi Ikan Konsumsi (Ton)	64.083,12	
Peningkatan Produksi Perkebunan	Meningkatnya hasil Produksi Perkebunan	- Produksi Karet (ton)	154.082	Dinas Perkebunan
		- Produksi Kelapa Sawit (ton) TBS	69.217	

Tabel 4.21

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
 Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi**

Program Prioritas : **Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM dan IKM**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	OPD Penanggungjawab
Pemberdayaan Koperasi, UMKM, dan IKM	Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	- Persentase koperasi aktif	84%	Dinas Koperasi dan UKM
		- Persentase Usaha mikro dan kecil	95%	

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	OPD Penanggungjawab
	Meningkatnya peran industri kecil dan menengah	- Persentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah	85%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Tabel 4.22

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi**

Program Prioritas : **Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	OPD Penanggungjawab
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	- Persentase Sarana dan Prasarana Pasar Yang Layak (%)	85	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 4.23

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi**

Program Prioritas : **Pengembangan Pariwisata**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	OPD Penanggungjawab
Peningkatan Jumlah Penanaman Modal	Meningkatnya Jumlah PMA dan PMDN	- Persentase Peningkatan PMA	5%	DPMPPTSP
		- Persentase Peningkatan PMDN	5%	DPMPPTSP

PRIORITAS DAERAH

Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata serta Berwawasan Lingkungan

Peningkatan Pelayanan Kebencanaan			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya pelayanan kebencanaan	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana	63,86	BPBD, Satpol PP dan Damkar

KETERANGAN



: Prioritas RKP



: Program Prioritas

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	65,27	Disperindag



Peningkatan & Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Mantap	Persentase konektivitas antar wilayah	89%	Dinas PU Bina Marga
Meningkatnya infrastruktur keciptakarya dan pengairan	Indeks Infrastruktur Dasar	85%	Dinas PU CKTRP, Dinas Perkim

Peningkatan Pembangunan Sanitasi			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas sanitasi	Rasio rumah tangga bersanitasi	80 %	Dinas PU CK TRP, Dinas Perkim

Pembangunan Infrastruktur TIK			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya cakupan Infrastruktur TIK	Persentase penuntasan blank spot	85%	Dinas Kominfo dan Statistik

Peningkatan Infrastruktur Perhubungan			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	85%	Dinas Perhubungan

Tabel 4.24
Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata serta Berwawasan Lingkungan**

Program Prioritas : **Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	88%	Dinas PU Bina Marga
		- Persentase panjang jembatan dalam kondisi mantap (%)	95%	
Pembangunan sarana keciptakarya	Meningkatnya Pembangunan sarana keciptakarya	- Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	75	Dinas PU Cipta Karya, Tata ruang dan Pengairan
Pembangunan sarana pemukiman	Meningkatnya Pembangunan sarana pemukiman	- Rasio rumah layak huni (%)	76	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pembangunan dan Optimalisasi jaringan irigasi	Meningkatnya fungsi jaringan irigasi	- Rasio jaringan irigasi	10,05	Dinas PU Cipta Karya, Tata ruang dan Pengairan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi bangunan pengendalian banjir/ pengaman sungai	Tersedianya bangunan pengendali banjir dan pengaman sungai	- Panjang bangunan pengendali banjir dan pengaman sungai yang terbangun	300m	Dinas PU Cipta Karya, Tata ruang dan Pengairan

Tabel 4.25
Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata serta Berwawasan Lingkungan**

Program Prioritas : **Peningkatan Pembangunan Sanitasi**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Pembangunan prasarana penyediaan air minum dan air bersih	Meningkatnya penyediaan air minum dan air bersih	- Rasio rumah tangga pengguna air bersih per SPAM IKK	45%	Dinas PU Cipta Karya, Tata ruang dan Pengairan
Pembangunan sarana Sanitasi	Tersedianya sarana sanitasi yang layak	- Rasio rumah tangga bersanitasi	79%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 4.26

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata serta Berwawasan Lingkungan**

Program Prioritas : **Pembangunan Infrastruktur TIK**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Meningkatnya penggunaan aplikasi dalam kerangka e-government	- Persentase pemanfaatan dan pengembangan aplikasi	70%	Dinas Kominfo dan Statistik

Tabel 4.27

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata serta Berwawasan Lingkungan**

Program Prioritas : **Pembangunan Infrastruktur Perhubungan**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	- Persentase penurunan kejadian kecelakaan	0,43%	Dinas Kominfo dan Statistik

Tabel 4.28

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata serta Berwawasan Lingkungan**

Program Prioritas : **Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Pengendalian kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan	- Jumlah titik pantau kualitas air, udara ambien dan tanah	90 titik sampling	Dinas Lingkungan Hidup
Pelestarian Hutan Adat	Melestarikan hutan masyarakat adat Bulian	- Jumlah hutan adat bulian yang dipelihara	1 lokasi	Dinas Lingkungan Adat

Tabel 4.29

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata serta Berwawasan Lingkungan**

Program Prioritas : **Pelayanan Kebencanaan**

Kegiatan Prioritas	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Pembentukan desa tanggap bencana	Terbentuknya masyarakat tanggap bencana	- Jumlah desa tanggap bencana yang terbentuk	1 desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

PRIORITAS DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa dan Pelayanan Prima

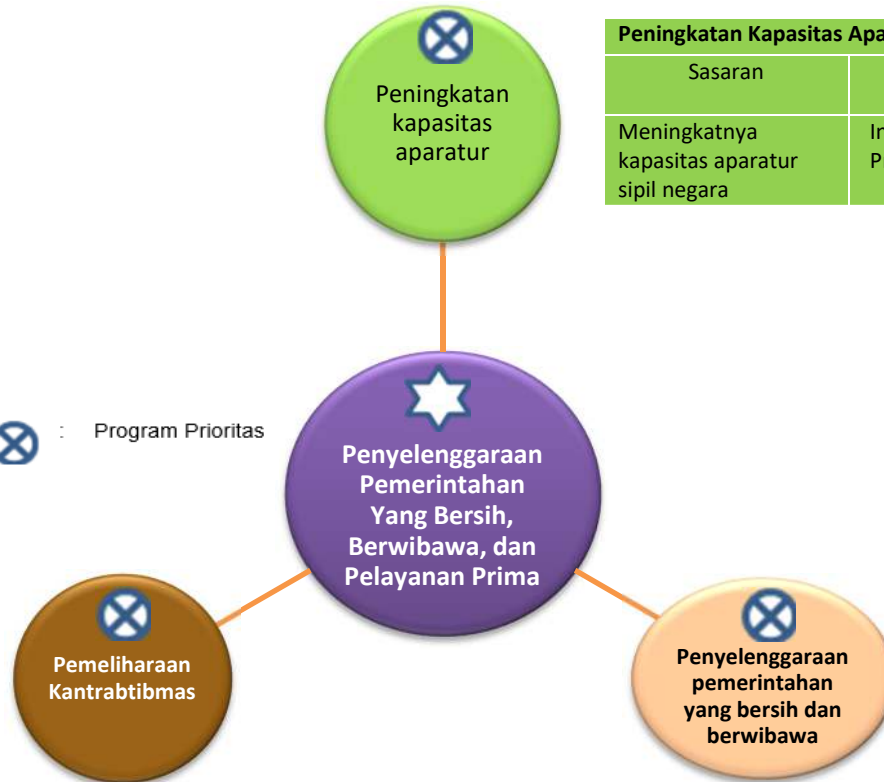
KETERANGAN



: Prioritas RKP



: Program Prioritas



Peningkatan Kapasitas Aparatur

Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya kapasitas aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas	60	BKPSDM

Pemeliharaan Kantrabtibmas			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	80%	Badan Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar, Bag. Tata Pemerintahan Setda

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih			
Sasaran	Indikator	Target 2021	Penanggung Jawab
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Indeks Capaian Kinerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Tinggi	Inspektorat Bappeda, BPKAD, Bag. Organisasi Setda, BKPSDM

Tabel 4.30

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih,
Berwibawa dan Pelayanan Prima**

Program Prioritas : **Peningkatan Kapasitas Aparatur**

Kegiatan Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Pelaksanaan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kapasitas/ kompetensi ASN	Meningkatnya kompetensi ASN	- Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan	75%	BKPSDM

Tabel 4.31

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih,
Berwibawa dan Pelayanan Prima**

Program Prioritas : **Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**

Kegiatan Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Instansi Pemerintah	- Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bag. Organisasi Setda, BKPSDM
		- Hasil Evaluasi LKJIP Kabupaten Musi Rawas	BB	
		- Hasil Evaluasi Implementasi Maturitas SPIP Pemkab Musi Rawas	Level 3	

Tabel 4.32

Kegiatan Prioritas dan Target Kegiatan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

Prioritas Daerah : **Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih,
Berwibawa dan Pelayanan Prima**

Program Prioritas : **Pemeliharaan Kantrabtimas**

Kegiatan Prioritas Daerah	Sasaran	Indikator	Target	OPD Penanggungjawab
Koordinasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	- Persentase Keamanan dan ketertiban masyarakat	90%	Badan Kesbangpol, Satpol PP dan Damkar, Bag. Tata Pemerintahan Setda

4.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas

Dari prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 tersebut di atas, maka keterkaitan antara Prioritas Kabupaten dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.33
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Musi Rawas
dengan Prioritas Daerah RKPd Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

RPJMD			RKPd	
Misi	Tujuan	Sasaran	Prioritas Daerah RKPd	Program Prioritas Daerah
Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	1. Peningkatan kapasitas kinerja aparatur 2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih
		Meningkatnya Kapabilitas birokrasi		
		Meningkatnya pelayanan publik		
Membangun sumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan 2. Peningkatan kualitas pembelajaran
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Peningkatan pemberdayaan pemuda
	Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal	Terwujudnya Ketertiban, keamanan, Ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Pemeliharaan Kantrabtibmas
		Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

		Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan local dan kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal
Pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)		
	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
		Meningkatnya penataan ruang	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	1. Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan 2. Peningkatan kualitas Koperasi dan UMKM
		Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi
		Menurunnya tingkat kemiskinan	Pengentasan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan

	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa	Menurunnya tingkat pengangguran Meningkatnya status desa	Pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat
			Pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat
			Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur

4.6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Dengan Prioritas Nasional Tahun 2021

Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 yang direncanakan pada sub bab kedepan ditujukan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2021. Sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas nasional disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.34

Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2021 dengan Prioritas Nasional 2021

No	Prioritas Nasional	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Tahun 2021	Sasaran Daerah Tahun 2021
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan Yang dan		Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Meningkatnya kontribusi pertanian dan perikanan terhadap perekonomian
				Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta lembaga ekonomi non pertanian
				Meningkatnya pengembangan IKM
				Meningkatnya jumlah penanaman modal di Kabupaten Musi Rawas
				Meningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian
	Pengentasan kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan		
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap
				Meningkatnya infrastruktur keciptakarya dan pengairan
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		Pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan
				Meningkatnya kualitas pendidikan
				Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
				Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pembangunan sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
				Penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap
				Meningkatnya infrastruktur keciptakarya dan pengairan

6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	→	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				Meningkatnya pelayanan kebencanaan
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	→	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Meningkatnya kinerja pemerintah daerah

Tabel 4.35
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PN 1							
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan							
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
1	Pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan energy baru dan terbarukan (EBT)	Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan PLTS 2. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 3. Pemasangan Instalasi Energi Alternatif 4. Pemasangan LPJU Tenaga Surya
2	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 2. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 3. Pengkajian dampak lingkungan 4. Pengembangan sekolah berwawasan Lingkungan 5. Penyelenggaraan pembinaan kampung hijau 6. Pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi 7. Penanganan pengaduan dan permasalahan lingkungan

		Pengelolaan hutan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	1. Pengembangan hutan masyarakat adat 2. Pengembangan hutan kota
		Penyediaan air untuk pertanian	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan lainnya	1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 2. Optimalisasi jaringan irigasi yang telah dibangun 3. Pembangunan/Perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi
		Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi
			Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pembangunan Embung dan bangunan penampung air lainnya
		Pemeliharaan, Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk revitalisasi Danau dan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Pemantauan sumber pencemaran institusi dan non institusi
						Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Pengembangan hutan kota
						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan ruang terbuka hijau

		Pengembangan Waduk Multiguna	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
3.	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi	Pengentasan Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	Penanganan Kemiskinan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Lumbung Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1. Pengembangan diversifikasi pangan 2. Pengembangan lembaga distribusi pangan yang efisien Pengembangan lumbung pangan desa dan pemerintah 1. Penanganan daerah rawan pangan 2. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Pertanian 3. Pengembangan cadangan pangan daerah 4. Pengembangan desa mandiri pangan 5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 6. Penyuluhan sumber pangan alternatif
		Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Program Peningkatan Produksi dan produktivitas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	1. Pengembangan Tanaman Hortikultura 2. Pelestarian Plasma Nutfah 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian 4. Penyediaan Sarana Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

							5. Penyediaan Sarana Perbenihan Tanaman Pangan dan Palawija
						Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi pertanian	1. Pengembangan dan pemasaran hasil perikanan 2. Pengadaan alat pemasaran hasil perikanan
		Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 2. Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani dan Pelatihan Agribisnis 3. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 4. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/ kelompok tani
					Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan	Program pengembangan budidaya perikanan	3. Pembangunan/Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan 4. Pengembangan bibit ikan unggul
		Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	1. Penerapan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan 2. Pengembangan teknologi terapan tanaman hortikultura
		Peningkatan tata kelola system pangan nasional	Peningkatan Penanaman Modal dan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian,	Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian,	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1. Pengembangan system informasi pasar 2. Penanganan pasca panen, pengolahan dan peningkatan

			Ketahanan Ekonomi	Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan		mutu hasil pertanian tanaman pangan 3. Penanganan pasca panen, pengolahan dan peningkatan mutu hasil pertanian hortikultura
						Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan/peternakan unggulan daerah
4.	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan wilayah perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	-	-	-	-	-
		Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	-	-	-	-	-
		Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan	Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya	1. Pengadaan sarana usaha kecil pembudidaya ikan 2. Peningkatan usaha kecil budidaya Perikanan 3. Pengembangan dan kerjasama usaha perikanan
						Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1. Pengembangan Kawasan Perikanan Minapolitan

							2. Pencegahan dan Pemeliharaan Kesehatan Ikan
		Peningkatan fasilitasi usaha pembiayaan dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan	Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya	1. Pengadaan sarana usaha kecil pembudidaya ikan 2. Peningkatan usaha kecil budidaya Perikanan 3. Pengembangan dan kerjasama usaha perikanan
		Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan serta database kelautan dan perikanan	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	5. Pengembangan dan sertifikasi CPIB dan CBIB 6. Kajian kawasan budidaya air tawar
						Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 2. Temu usaha kemitraan nelayan kecil
						Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya	1. Temu usaha kemitraan pembudidaya ikan kecil 2. Pengumpulan data perikanan budidaya
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Koperasi	Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah dan besar	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM dan IKM	Pemberdayaan Koperasi, UMKM dan IKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	1. Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah 2. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 3. Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Kecil Menengah

		Peningkatan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM dan IKM	Pemberdayaan Koperasi, UMKM dan IKM	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi 2. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 3. Penerapan kepatuhan koperasi 4. Pembentukan koperasi wanita di Kecamatan 5. Pemeriksaan kelembagaan koperasi 6. Penilaian kualitas dan kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi
		Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM dan IKM	Pemberdayaan Koperasi, UMKM dan IKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 2. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD 3. Pendataan UKM dan UKM Koperasi 4. Pelatihan manajemen perkreditan bagi KSP/USP 5. Pemberdayaan Koperasi dan UKM Pemula
		Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM dan IKM	Pemberdayaan Koperasi, UMKM dan IKM	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian,	Peningkatan Penanaman Modal dan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian,	Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian,	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

riil dan industrialisasi	kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Ketahanan Ekonomi	Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengadaan sarana agro industri karet 3. Penyediaan sarana agro industri serai 4. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 5. Pengembangan kelapa 6. Pengembangan plasma nutfah
	Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan plasma nutfah tanaman khas 2. Peningkatan Inovasi Beras Organik 3. Pengembangan Teknologi Terapan Tanaman Hortikultura 4. Uji Multilokasi Benih Batan
	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata termasuk wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Objek Wisata	<p>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</p> <p>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan objek pariwisata unggulan 2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 4. Penyusunan DED <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jaringan kerja sama promosi Pariwisata 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

							3. Pelatihan pemandu wisata terpadu 4. Pemilihan duta-duta wisata 5. Penyiapan materi promosi wisata
		Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Promosi investasi melalui media elektronik
		Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Pengembangan sistem informasi penanaman modal 2. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah 3. Kajian kebijakan penanaman modal 4. Sosialisasi perizinan 5. Profil investasi daerah 6. Perencanaan koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan CSR 7. Kajian produk unggulan 8. Penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan 9. Intensifikasi dan ekstensifikasi perizinan
		Pengembangan industri halal	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah	Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha usaha kecil menengah
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan	Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya	Peningkatan Penanaman Modal dan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Peningkatan daya saing produk-produk Industri Kecil Menengah

penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	saing produk ekspor dan jasa	Ketahanan Ekonomi				
	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Promosi produk industry kecil dan menengah
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Expose potensi kewirausahaan dan keunggulan kompetitif daerah
	Pengelolaan Impor	-	-	-	-	-
	Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan pemerintah yang efektif	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Pelayanan Pengadaan	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa
	Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	-	-	-	-	-
	Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding dan produk kreatif	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Pengembangan Pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1. Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata 2. Koordinasi sektor pendukung pariwisata 3. Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri
		Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK)

		Peningkatan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi	-	-	-	-	-
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Peningkatan pendalaman sektor keuangan	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 2. Penyusunan regulasi keuangan daerah 3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah 4. Updating dan objek pajak dan NJOP
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan Industri 4.0	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Forum pengembangan ekonomi kreatif
		Peningkatan system logistic dan stabilitas harga	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
			Pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian masyarakat	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat 2. Operasi pasar sembako
Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Pengendalian inflasi daerah			

		Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Pengembangan pariwisata	Pengembangan pemasaran pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata 2. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 3. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri
		Reformasi fiscal	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Koordinasi penanggulangan dampak regulasi kebijakan nasional
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan perternakan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Pengembangan Sistem Informasi Pasar
			Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan data informasi statistik daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update data perindustrian, perdagangan dan pasar 2. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistic tanaman pangan 3. Penyusunan dan Pengumpulan data statistic hortikultura

Tabel 4.37
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Pemerataan

PN 2							
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Pemerataan							
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
1	Pembangunan wilayah sumatera	Pengembangan sektor unggulan	Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	Peningkatan produksi, dan nilai tambah pertanian, perkebunan perternakan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	7. Pengembangan intensifikasi tanaman padi /palawija 8. Penanganan pasca panen, pengolahan, dan peningkatan mutu hasil pertanian tanaman pangan 9. Penanganan pasca panen, pengolahan, dan peningkatan mutu hasil pertanian hortikultura 10. Pengembangan komoditi perkebunan 11. Perluasan areal perkebunan kelapa sawit rakyat 12. Revitalisasi perkebunan
						Program peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1. Peningkatan inovasi beras organic 2. Pengembangan teknologi terapan tanaman hortikultura 3. Penerapan teknologi budidaya tanaman pangan
						Program Peningkatan produksi (pertanian/perkebunan)	1. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 2. Peremajaan tanaman karet

					Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 2. Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan 3. Pengembangan kawasan minapolitan
						Program pengembangan perikanan tangkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana perikanan tangkap 2. Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap
				Pengembangan pariwisata	Pengembangan objek wisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan objek pariwisata unggulan 2. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
		Pengembangan Kawasan perkotaan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika	Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama smart city
				Peningkatan pembangunan sanitasi	Pembangunan prasarana penyediaan air minum dan air bersih	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan system distribusi air minum 2. Pelayanan BLUD SPAM 3. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah domestic dikawasan perumahan dan pemukiman 4. Pembangunan sumur bor di pemukiman
				Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Program pengembangan lingkungan sehat	Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan

				Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana pemukiman	Program pengembangan perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan rusun dan rusunawa 2. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 3. Peningkatan kualitas perumahan swadaya 4. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
	Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi	Pengentasan Kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian pedesaan		Program pengembangan wilayah transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pokja kawasan perkotaan baru 2. Pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan						<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kelembagaan desa 2. Penataan dan penguatan institusi kelembagaan desa 	
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan						<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan dan pembinaan badan usaha milik desa 2. Pendampingan kawasan pedesaan 	
	Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah		Program penataan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah 2. Penyusunan profil kelembagaan perangkat daerah 3. Penyusunan kajian akademis penataan organisasi perangkat daerah
						Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan analisa standar belanja 2. Penyusunan system informasi keuangan daerah

							3. Peningkatan anggaran berbasis elektronik 4. Penyusunan regulasi keuangan daerah
--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 4.38
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

PN 3							
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing							
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	Percepatan cakupan administrasi kependudukan	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penataan Administrasi Kependudukan.	1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu. 2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 3. Pengembangan database kependudukan
		Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan terpadu 2. Pembentukan dan penataan system koneksi NIK
		Pendampingan dan layanan terpadu	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Sosialisasi kebijakan kependudukan 2. Penerapan system manajemen mutu berstandar internasional

		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Kependudukan 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 3. Peningkatan kapasitas lembaga kependudukan 	
2.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Sistem jaminan sosial nasional	Pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat kesejahteraan social (Puskesos)	
			Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin 2. Jasa pelayanan rujukan masyarakat miskin 	
		Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
							Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai
		Perlindungan sosial adaptif	Pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 4. Perlindungan sosial korban bencana 	
							Pembinaan Anak Terlantar	Pemberdayaan anak terlantar

		Kesejahteraan sosial	Pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan Lanjut Usia	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial. Pelayanan dan rehabilitasi lanjut usia
3.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi 2. Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
		Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 2. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekeurangan Gizi Mikro Lainnya 3. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 4. Surveillance Gizi
		Peningkatan pengendalian penyakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Penyemprotan/ Fogging sarang nyamuk 2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3. Peningkatan imunisasi

							<ul style="list-style-type: none"> 4. Peningkatan surveillance dan Epidemiologi dan penanggulangan wabah 5. Pendataan program dan kegiatan P2P 6. Sosialisasi Program P2P
		Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 2. Pemberdayaan Masyarakat UKBM dan UKS
		Penguatan system kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pengawasan Obat dan Makanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 1. Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum dibidang obat dan makanan 2. Fasilitasi UPTD Instalasi Farmasi
4.	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 2. Survey IKM di lingkungan Dinas Pendidikan 3. Tim manajemen BOP PAUD 4. Peningkatan tata kelola ujian sekolah 5. Manajemen tata kelola 6. Tim manajemen BOS
		Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan	Program Pendidikan Usia Dini	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penambahan ruang kelas sekolah 2. Pengadaan Buku PAUD/TK 3. Pengadaan Perlengkapan sekolah 4. Rehabilitas sedang/berat bangunan sekolah

							<ul style="list-style-type: none"> 5. Persiapan akreditasi PAUD 6. Penyelenggaraan minat baca, bakat, kreatifitas siswa PAUD 7. Penyelenggaraan parenting siswa PAUD 8. Penyelenggaraan lomba lembaga PAUD 9. Pengadaan kurikulum k13 10. Penyelenggaraan bantuan operasional PAUD (TK negeri)
		Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga pendidik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Penjaminan mutu pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 2. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 3. Pemberian Bantuan Operasional Guru 4. Pelaksanaan Uji Kompetensi TKSGT dan Guru Bantu Daerah 5. Seleksi Guru Kepala Sekolah, Pengawas, Tenaga Administrasi Berprestasi dan berdedikasi 6. Pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah
		Peningkatan tata kelola kependidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib pendidikan dasar sembilan tahun	1. Peningkatan Kapasitas Penerapan SPM Pendidikan Dasar

							2. Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 2. Penguatan Validasi Data Gender dan Anak 3. Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) 4. Penguatan Forum Anak
		Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha 2. Kemitraan Organisasi Dharma Wanita dalam Pemberdayaan Perempuan 3. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Kepala Keluarga 4. Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
		Kualitas Pemuda	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Pemberdayaan Pemuda	Peningkatan kualitas pemuda	<p>Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda</p> <p>Peningkatan peran serta kepemudaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pendataan Potensi kepemudaan 1. Pembinaan organisasi kepemudaan 2. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 3. Penyelenggaraan pembinaan kepemudaan
6.	Pengentasan Kemiskinan	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Pengentasan Kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian pedesaan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penanggulangan Masalah Kemiskinan

						Penyandang Masalah Kesehateraan Sosial	2. Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	
						Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan	Pendampingan Kemitraan Swasta dan UMKM/BUMDES di pedesaan	
		Keperantaraan usaha dan dampak sosial	Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa dan Pelayanan Prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengembangan kapasitas masyarakat hukum adat	
		Reforma Agraria	Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa dan Pelayanan Prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
		Perhutanan Sosial	Pengentasan Kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian pedesaan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Pengembangan Hutan Masyarakat Adat	
7.	Peningkatan produktivitas dan daya saing	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Program Pendidikan Non Formal	Penyenggaraan Pendidikan Informal Terintegrasi	
				Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	
		Penguatan pendidikan tinggi berkualitas	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi	Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih,	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan	Program Pengembangan Inovasi Daerah	1. Inovasi Produk Unggulan Daerah 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah	

			Berwibawa dan Pelayanan Prima		keuangan instansi pemerintah	Program Pendayagunaan Iptek	1. Penerapan / pemanfaatan hasil litbang 2. Penguatan pusat inovasi daerah
		Prestasi Olahraga	Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah	Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 1. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 2. Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah 3. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi 4. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 5. Pemberian Penghargaan bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi 6. Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat

Tabel 4.39
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PN 4							
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan							
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
1	Revolusi mental dan pembinaan ideology pancasila	Revolusi mental dalam system pendidikan untuk	Pengembangan sumber daya manusia	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pengembangan dan pengelolaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

<p>untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa maju, modern dan berkualitas</p>	<p>memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti</p>			<p>keragaman dan nilai budaya</p>		<p>2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat</p>
	<p>Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive</p>	<p>Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima</p>	<p>Peningkatan kapasitas aparatur</p>	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/ kompetensi ASN</p>	<p>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</p>	<p>1. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas bagi PNS daerah 2. Pendidikan dan pelatihan non formal</p>
					<p>Program pembinaan dan Pengembangan Aparatur</p>	<p>1. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 2. Penataan PNS dalam jabatan dan mutasi PNS 3. Evaluasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja 4. Monitoring kinerja dan disiplin aparatur</p>
	<p>Revolusi mental dalam system sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter</p>	<p>Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima</p>	<p>Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih</p>	<p>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah</p>	<p>Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga</p>	<p>Pengembangan bina keluarga</p>
					<p>Program peningkatan perlindungan anak</p>	<p>1. Pembentukan dan pembinaan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) 2. Pembentukan perlindungan anak berbasis masyarakat (PATBM) di kecamatan</p>
	<p>Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental</p>	<p>Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima</p>	<p>Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih</p>	<p>Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah</p>	<p>Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan</p>	<p>Pusat pendidikan wawasan kebangsaan</p>
					<p>Program pengembangan wawasan kebangsaan</p>	<p>Pemberdayaan dan pembentukan gugus tugas</p>

							gerakan nasional revolusi mental
		Pembangunan dan pembudayaan system ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila	Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	Peningkatan kualitas koperasi, UMKM dan IKM	Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 2. Pelatihan manajemen koperasi/KUD 3. Pemberdayaan koperasi dan UKM pemula 4. Pelatihan manajemen perkreditan bagi KSP dan USP
						Program peningkatan kualitas koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 2. Pembentukan koperasi wanita di kecamatan 3. Peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan koperasi dan usaha koperasi
		Pembinaan ideology pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela Negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air bagi pemuda dan pelajar 2. Pusat Pendidikan wawasan kebangsaan
2.	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan local	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan nilai budaya	Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

untuk memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan bangsa	Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya bangsa untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Pelestarian seni budaya dan kearifan local daerah berwawasan kebangsaan
	Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan nilai budaya	1. Pembinaan dan dukungan kepada lembaga adat 2. Dukungan kepada seni dan budaya
	Pengembangan diplomasi kebudayaan untuk memperkuat Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Pelestarian seni budaya dan kearifan local daerah berwawasan kebangsaan
	Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan kebudayaan	1. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan 2. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan

3.	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	1. Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama 2. Forum kerukunan umat beragama
		Penyelarasan Relasi agama dan budaya	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Pelestarian seni budaya dan kearifan local daerah berwawasan kebangsaan
		Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pengembangan wawasan keagamaan	Penyelenggaraan musi rawas bertilawah	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
		Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	Pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
4.	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi	Peningkatan budaya literasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan budaya literasi	Peningkatan budaya gemar membaca	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Pemasarakan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter						<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca 3. Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah 4. Penyediaan Layanan Perpustakaan Keliling
	Pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib belajar sembilan tahun	Pengembangan pendidikan keaksaraan
			Pelestarian dan pengembangan budaya lokal	Pengembangan pengelolaan keragaman dan nilai budaya daerah	Program pengelolaan keragaman budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 2. Penyelenggaraan festival budaya
	Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib belajar sembilan tahun	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
					Program penelitian dan pengembangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan 2. Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan 3. Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan 4. Pengembangan inovasi dan teknologi
Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan budaya literasi	Peningkatan budaya gemar membaca	Program pembinaan perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota 	

							2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 4.40
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Layanan Dasar

PN 5							
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Layanan Dasar							
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
1.	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan terjangkau	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana pemukiman	Program pengembangan perumahan	1. Pembangunan rusun dan rusunawa 2. Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 3. Peningkatan kualitas perumahan swadaya 4. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
					Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Pembangunan sarana peribadatan kawasan pemukiman 2. Pembangunan ruang public terpadu ramah lingkungan pemukiman
						Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
					Program pembangunan jalan dan jembatan	1. Pembangunan jalan non status	

					Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan		2. Pembangunan jembatan non status
						Program peningkatan jalan dan jembatan	1. Peningkatan jalan ruas jalan non status 2. Peningkatan jalan dalam kecamatan 3. Peningkatan jalan ruas jalan kabupaten
	Sanitasi layak dan aman	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan Pembangunan sanitasi	Pembangunan sarana sanitasi		Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1. Pembangunan desa sanitasi 2. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah
						Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 2. Peningkatan dan pengembangan jaringan layanan air bersih
		Pembangunan Sumber daya manusia	Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular		Program pengembangan lingkungan sehat	Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan
	Pengelolaan air tanah dan air baku	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan Pembangunan sanitasi	Pembangunan sarana penyediaan air minum dan air bersih		Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	1. Pengembangan system distribusi air minum 2. Pelayanan BLUD SPAM 3. Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity
						Program pembangunan infrastruktur perdesaan	1. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 2. Peningkatan dan pengembangan jaringan layanan air bersih

	Keselamatan dan keamanan transportasi	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2. Pengadaan marka jalan 3. Pengadaan pagar pengaman jalan 4. Pembinaan keselamatan transportasi
					Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Pelaksanaan uji petik kendaraan
	Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan pengendalian banjir/pengamanan sungai	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Perencanaan normalisasi saluran sungai 2. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
					Program pengendalian banjir dan pengamanan sungai	Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
					Program pembangunan turap/talud/bronjong	Pembangunan turap/talud/bronjong
	Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1. Perencanaan dan pembangunan jaringan irigasi 2. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 3. Pembangunan/perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi
					Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
	Konektivitas kereta api	-	-	-	-	-
	Konektivitas laut	-	-	-	-	-

		Konektivitas udara	-	-	-	-	-
3.	Infrastruktur Perkotaan	Transportasi Perkotaan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
						Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
		Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika	Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama smart city
		Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan pembangunan sanitasi	Pembangunan prasarana penyediaan air minum dan air bersih	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	5. Pengembangan system distribusi air minum
							6. Pelayanan BLUD SPAM
			Pembangunan Sumber daya manusia	Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Program pengembangan lingkungan sehat	7. Perluasan SPAM Perpipaan melalui pemanfaatan idle capacity
	Penyediaan akses perumahan dan	Pembangunan infrastruktur yang	Peningkatan dan pemerataan	Pembangunan sarana pemukiman	8. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah domestic dikawasan perumahan dan pemukiman		
					9. Pembangunan sumur bor di pemukiman		
					Percepatan pembangunan sanitasi perkotaan		
					5. Pembangunan rusun dan rusunawa		

		pemukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	pembangunan infrastruktur dasar			6. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 7. Peningkatan kualitas perumahan swadaya 8. Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
					Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1. Pembangunan sarana peribadatan kawasan pemukiman 2. Pembangunan ruang public terpadu ramah lingkungan pemukiman
					Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program peningkatan jalan dan jembatan	1. Peningkatan jalan ruas jalan non status 2. Peningkatan jalan dalam kecamatan 3. Peningkatan jalan ruas jalan kabupaten
4.	Energi dan Ketenagalistrikan	Keberlanjutan penyediaan energy dan ketenagalistrikan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan energy alternatif	1. Pemeliharaan PLTS tersebar (Solar home system) 2. Pemeliharaan penerangan jalan umum tenaga surya
		Akses dan keterjangkauan energy dan ketenagalistrikan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan energy alternatif	Pemasangan instalasi energy alternatif
		Kecukupan penyediaan energy dan tenaga listrik	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan	Peningkatan dan pemerataan	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan	1. Pemeliharaan Rutin jaringan listrik dan LPJU

			merata serta berwawasan lingkungan	pembangunan infrastruktur dasar			2. Pemasangan jaringan listrik dan LPJU
5.	Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika	Layanan akses internet, intranet dan komunikasi intra pemerintah daerah
		Pemanfaatan infrastruktur TIK	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika	1. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi 2. Pelayanan website lembaga pelayanan public dan kegiatan pemerintah daerah
		Fasilitas Pendukung transformasi digital	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika	1. Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama smart city 2. Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan nama domain dan e-government

Tabel 4.41
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim							
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Koordinasi penilaian Kota Sehat/ Adipura 2. Pemantauan kualitas lingkungan 3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 4. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 5. Pengkajian dampak lingkungan
		Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penanganan pengaduan dan permasalahan lingkungan
		Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
						Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Pemantauan kualitas lingkungan hidup 2. Pengkajian dampak lingkungan
		Penguatan kelembagaan dan pecegahan hukum	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pengembangan kapasitas masyarakat hukum adat (MHA)

		di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	merata serta berwawasan lingkungan			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Pengembangan data dan informasi lingkungan 2. Kampanye lingkungan 3. Penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup
2.	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	Penanggulangan bencana	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan	Pelayanan Kebencanaan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan Pasca Bencana
						Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bencana 2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana 3. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran
						Program Pembinaan Masyarakat	Pembentukan desa tangguh bencana
						Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana
		Peningkatan ketahanan iklim	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2. Pengembangan kapasitas masyarakat hukum adat
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Kampanye Lingkungan 2. Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	1. Pengembangan Hutan Masyarakat Adat 2. Pengembangan Hutan Kota						

						Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau		
3.	Pembangunan rendah karbon	Pembangunan energy berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Berkelanjutan	1. Pemeliharaan PLTS 2. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya 3. Pemasangan Instalasi Energi Alternatif 4. Pemasangan LPJU Tenaga Surya		
		Pemulihan Lahan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan	1. Kampanye lingkungan 2. Penyusunan kebijakan bidang lingkungan hidup	
								Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan
		Pengelolaan limbah	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Pengelolaan B3 dan limbah B3 2. Pemantauan kualitas lingkungan 3. Penanganan pengaduan dan permasalahan lingkungan
									Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
								Pembangunan sumber daya manusia	Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas

	Pengembangan industri hijau	Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	Penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi	Peningkatan penanaman modal	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
					Program Pengembangan Sentra-sentra industry potensial	Penyusunan rencana pengembangan industri kabupaten (RPIK)
		Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Pengembangan Inovasi Daerah	1. Inovasi Produk Unggulan Daerah 2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
	Program Pendayagunaan Iptek				1. Penerapan / pemanfaatan hasil litbang 2. Penguatan pusat inovasi daerah	
Rendah karbon pesisir dan laut	-	-	-	-	-	

Tabel 4.42
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)
Memperkuat Stabilitas, Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

PN 7							
Memperkuat Stabilitas, Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik							
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
1	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan kapasitas lembaga demokrasi	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota daerah 2. Pokja Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik

							3. Pokja verifikasi pergantian antar waktu anggota DPRD
		Penguatan kesetaraan dan kebebasan	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pendidikan politik masyarakat	1. Pendidikan politik dan etika budaya politik bagi generasi muda, pelajar dan elemen masyarakat 2. Pembinaan Ormas LSM 3. Pengawasan dan validasi data Ormas LSM
		Peningkatan kualitas komunikasi public	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1. Pelaksanaan informasi public dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi public 2. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas 3. Penyebarluasan informasi public melalui media
						Program Pengelolaan aplikasi informatika	1. Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi 2. Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah
2.	Optimalisasi kebijakan luar negeri	Penguatan integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	-	-	-	-	-
		Penguatan kerjasama pembangunan internasional	-	-	-	-	-
		Peningkatan citra positif di Dunia Internasional	-	-	-	-	-

		Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global	-	-	-	-	-
3.	Penegakan Hukum Nasional	Penataan Regulasi	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penataan peraturan perundang-undangan	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan
		Perbaikan system hukum pidana dan perdata	-	-	-	-	-
		Penguatan system anti korupsi	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Pelaksanaan pengawasan secara internal 2. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
		Peningkatan akses terhadap keadilan	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penataan peraturan perundang-undangan	1. Advokasi aparatur pemerintah 2. Advokasi masyarakat tidak mampu 3. Peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat
4.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Penguatan implementasi manajemen ASN	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Penyusunan analisis beban kerja 2. Penyusunan standar kompetensi jabatan
		Transformasi pelayanan public	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian	1. Pembinaan dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan public

			berwibawa, dan pelayanan prima		keuangan instansi pemerintah	pelaksanaan kebijakan KDH	2. Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public 3. Fasilitasi persiapan penilaian ISO pelayanan publik	
		Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penataan peraturan perundang-undangan	4. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah 5. Penyusunan profil kelembagaan perangkat daerah 6. Penyusunan kajian akademis penataan organisasi perangkat daerah	
		Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi 2. Evaluasi Laporan akuntabilitas (SAKIP) perangkat daerah	
5.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan keamanan dalam negeri	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Pemasyarakatan kantibmas	Pemeliharaan Kantrabtimas	Program pemeliharaan kantrabtimas dan pencegahan tindak criminal Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 1. Forum kewaspadaan dini masyarakat 2. Pengawasan orang asing	
		Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi CBM	-	-	-	-	-	
		Penguatan keamanan laut	-	-	-	-	-	-
		Penguatan keamanan dan	Penyelenggaraan pemerintahan	Pemasyarakatan kantibmas	Pemeliharaan Kantrabtimas	Program pemeliharaan kantrabtimas dan	1. Tim terpadu penanganan gangguan kantrabtimas	

		ketertiban masyarakat	yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima			pencegahan tindak criminal	2. Tim terpadu pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial
						Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Pemantauan aksi unjuk rasa
		Penguatan Ketahanan dan Keamanan siber	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah	1. Penerapan system manajemen pengamanan informasi 2. Pengamanan informasi dan sterilisasi pengindraan dan rumah pejabat

4.7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Kabupaten Musi Rawas secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 yang direncanakan pada sub bab didepan juga ditujukan untuk mendukung pencapaian Prioritas Provinsi Sumatera Selatan pada RKPD Sumatera Selatan Tahun 2021. Sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas Provinsi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.43
Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2021 dengan Prioritas Provinsi 2021

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021	Program Prioritas Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021			
1.	Percepatan Penurunan Kemiskinan, Pembangunan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia		Pengentasan Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan			
				Peningkatan Perlindungan Sosial			
				Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			
			Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas			
				Peningkatan Kualitas Pendidikan			
				Peningkatan Budaya Literasi			
				Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
				Peningkatan Pemberdayaan Pemuda			
			2.	Pemulihan Ekonomi yang Inklusif didukung oleh Kualitas Infrastruktur, UMKM, Investasi, Industri, Kebudayaan dan Pariwisata		Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi
							Peningkatan Kualitas Koperasi, UMKM, dan IKM
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdagangan						
	Pengembangan Pariwisata						
Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Lokal						
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat						
	Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar						
	Peningkatan Pembangunan Sanitasi						
	Pembangunan Infrastruktur TIK						
	Peningkatan Infrastruktur Perhubungan						

3.	Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana		Peningkatan Penanaman Modal dan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian, Perkebunan, Perternakan dan Perikanan
			Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata serta Berwawasan Lingkungan	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan, dan Kehidupan Beragama		Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa dan Pelayanan Prima	Peningkatan Kapasitas Aparatur
				Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
				Pemeliharaan Kantrabtibmas
			Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Wawasan Keagamaan

4.8 Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan

4.8.1. Strategi Untuk Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19

Penyebaran kasus Corona virus Disease 2019 (covid-19) sudah mulai terdapat di Kabupaten Musi Rawas sejak bulan April 2020. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui berbagai strategi pencegahan dan penanganan pandemic covid 19 yaitu:

1. Strategi Tata Kelola

Tata kelola pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Musi Rawas dipayungi dengan diterbitkannya SK Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Kabupaten Musi Rawas. Satuan tugas ini bertugas untuk pengendalian dan penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease (Covid- 19) di Kabupaten Musi Rawas. Secara kelembagaan, untuk setiap desa dan kecamatan dibentuk Posko Siaga Penanggulangan Covid-19 di 199 Desa/Kelurahan dan 14 Kecamatan.

2. Strategi Penanganan Kesehatan

Penanganan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Di sektor hilir, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan kebijakan kebijakan pendukung untuk diterapkan di Musi Rawas seperti mengkampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat termasuk perilaku rajin cuci tangan, serta sosialisasi physical distancing dan mengurangi kerumunan dan keramaian.

Di sektor hilir dilakukan penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat, edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid tes atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri, dan isolasi Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit.

3. Strategi Penyediaan Jaminan Sosial

Penyediaan jaminan sosial dilaksanakan berupa pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat terdampak pandemic covid 19. Bentuk bantuan sosial yang diberikan berupa pemberian beras, ikan segar, ayam, telur dan paket sembako. Barang yang diberikan kepada masyarakat dibeli dari masyarakat petani di Kabupaten Musi Rawas, sehingga selain penyediaan jaminan sosial juga secara tidak langsung berkaitan dengan penanganan dampak ekonomi masyarakat. Adapun kriteria masyarakat penerima bantuan terdiri dari :

- Masyarakat yang sudah terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Masyarakat miskin baru akibat pandemi covid-
- Masyarakat terdampak karena profesi (pekerja seni dan pelaku wisata)
- Masyarakat lain yg dipandang perlu untuk dibantu sesuai usulan pemerintah desa/kelurahan

4. Strategi Penanganan Dampak Ekonomi

Penanganan dampak ekonomi dilakukan dengan berbagai bantuan alat produksi kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Kriteria penerima bantuan ini berdasarkan usulan dari pemerintah desa dan kecamatan.

4.8.2. Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals) atau yang lebih dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah kesepakatan global baru yang dibuat oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sebagai bentuk dari tindak lanjut kesepakatan global yang telah dibuat sebelumnya yakni MDGs (Millennium Development Goals). SDGs juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan tujuan pembangunan baru yang dapat mendorong pembangunan ke arah yang lebih lanjut didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan manusia dengan tujuan mendorong pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan sebagainya. SDGs juga dilaksanakan dengan prinsip universal dan memiliki motto yaitu *"No One Left Behind"* yang memiliki arti tidak ada satu pun yang tertinggal.

SDGs (Sustainable Development Goals) sendiri memiliki 17 tujuan yang diadopsi, diperbaharui serta dimodifikasi dari MDGs (Millennium Development Goals) itu sendiri, yakni sebagai berikut :

3. Tanpa adanya kemiskinan.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu segala bentuk kemiskinan di berbagai tempat harus diminimalisirkan, entah itu dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan ataupun hal semacamnya.
4. Tanpa adanya kelaparan.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu untuk mengakhiri kelaparan yang ada, mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi yang dicakup, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan ke depannya.
5. Kehidupan sehat dan sejahtera.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua jenjang usia.
6. Pendidikan berkualitas.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan setiap pendidikan yang diterima berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang di dunia.
7. Kesetaraan gender.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mencapai kesetaraan gender sekaligus mengurangi kesenjangan antar gender dan memberdayakan semua perempuan sebagaimana mestinya.
8. Air bersih dan sanitasi layak.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
9. Energi bersih dan terjangkau.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan akses untuk energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua kalangan.
10. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua sebagai salah satu contohnya.

11. Industri, inovasi dan infrastruktur.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
12. Berkurangnya kesenjangan.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
13. Kota dan komunitas berkelanjutan.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membuat wilayah perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
14. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
15. Penanganan perubahan iklim.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Contohnya mengurangi pemakaian Air Conditioner yang dapat merusak lingkungan,
16. Ekosistem laut.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
17. Ekosistem daratan.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu ekosistem yang ada di darat contohnya seperti hutan harus dikelola secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
18. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
19. Kemitraan untuk mencapai tujuan.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

17 tujuan di atas telah disetujui oleh 197 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Agustus tahun 2015 lalu. SDGs (Sustainable Development Goals) ini sendiri akan dijadikan sebagai tujuan pembangunan global selama 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Dengan adanya SDGs (Sustainable Development Goals) ini, diharapkan pembangunan yang ada di dunia menjadi lebih baik dan terarah ke depannya seiring perubahan zaman.

Berikut ini tabel 4.21 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan *SDGs*.

Tabel 4.44
Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021
Dalam Merespon Program *SDGs*

No	Tujuan Pembangunan <i>SDGs</i>	Prioritas Pembangunan RKPД Kabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPД Kabupaten Musi Rawas
1	Tanpa adanya kemiskinan	Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan angka kemiskinan • Pemberdayaan ekonomi masyarakat
		Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas koperasi, UMKM, dan IKM
2	Tanpa adanya kelaparan	Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Pembangunan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas
4	Pendidikan berkualitas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pendidikan • Peningkatan budaya literasi
5	Kesetaraan gender.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
6	Air bersih dan sanitasi layak	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pembangunan sanitasi
7	Energi bersih dan terjangkau	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi
		Pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan ekonomi pedesaan
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas koperasi, UMKM dan IKM
		Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar • Pembangunan infrastruktur TIK

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur perhubungan
10	Berkurangnya kesenjangan	Pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Penurunan angka kemiskinan • Pemberdayaan ekonomi pedesaan
11	Kota dan komunitas berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar • Pembangunan infrastruktur TIK • Peningkatan infrastruktur perhubungan
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
13	Penanganan perubahan iklim	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
14	Ekosistem laut.	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
15	Ekosistem daratan	Peningkatan penanaman modal dan ketahanan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
		Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih • Pemeliharaan kantrabtibmas
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

4.8.3. Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan

keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Pelaksanaan PUG dalam masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas yang dijalankan oleh OPD dengan didukung Tim Penggerak PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap kaum perempuan dan anak-anak antara lain :

- Sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender (KKG)
- Pencanaan Musi Rawas sebagai Kabupaten layak anak,
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan,
- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan kader PKK, posyandu, puskesmas dan RS dalam upaya mengurangi/ meminimalisir kematian Ibu dan bayi.
- Kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka program terpadu pemberdayaan masyarakat berbasis gender, serta
- Koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi masyarakat perempuan di Musi Rawas meliputi PKK, DWP, dan GOW.

Tabel 4.45
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarusutamaan Gender

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Penguatan Validasi Data Gender dan Anak 4. Penguatan Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) 5. Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) 6. Penguatan Forum Anak
		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran kemitraan Organisasi PKK dalam pembangunan 2. Pemberdayaan peran wanita perdesaan dalam penguatan institusi

4.8.4. Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM

SPM merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sementara itu, pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk memenuhinya merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Dengan demikian maka penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka percepatan pencapaian SPM di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020, telah dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi

- 1) Penataan kelembagaan pemerintah yang sesuai kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran
- 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
- 3) Pemanfaatan teknologi bagi aparatur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
- 4) Pemberian kemudahan akses infrastruktur dan akses modal bagi masyarakat

b. Arah Kebijakan

- 1) Mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) Peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021

5.1 Perubahan Rencana Pendanaan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada perubahan RKPD Tahun 2021 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1

Rencana Perubahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada
Perubahan RKPD Tahun 2021

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Bertambah/ Berkurang
	PENDAPATAN DAERAH	1.768.123.357.201,00	1.971.768.388.598,00	203.645.031.397,00
1	Pendapatan Asli Daerah	199.070.974.521,00	293.236.514.261,00	94.165.539.740,00
1.1	Pajak Daerah	86.173.894.375,00	180.373.894.375,00	94.200.000.000,00
1.2	Retribusi Daerah	4.315.733.125,00	4.315.733.125,00	-
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.000.000.000,00	8.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	102.581.347.021,00	100.546.886.761,00	(2.034.460.260,00)
2	Pendapatan Transfer	1.503.612.785.930,00	1.610.165.719.987,00	106.552.934.057,00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.434.813.691.000,00	1.484.997.193.047,00	50.183.502.047,00
	a. Dan Perimbangan	1.193.105.812.000,00	1.243.289.314.047,00	50.183.502.047,00
	b. Dana Insentif Daerah	52.341.267.000,00	52.341.267.000,00	-
	c. Dana Otonomi Khusus	-	-	-
	d. Dana Keistimewaan	-	-	-
	e. Dana Desa	189.366.612.000,00	189.366.612.000,00	-
2.2	Transfer Antar Daerah	68.799.094.930,00	125.168.526.940,00	56.369.432.010,00
	a. Pendapatan bagi hasil	68.799.094.930,00	76.168.526.940,00	7.369.432.010,00
	b. Bantuan Keuangan	-	49.000.000.000,00	49.000.000.000,00
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	65.439.596.750,00	68.366.154.350,00	2.926.557.600,00
3.1	Hibah	65.439.596.750,00	68.366.154.350,00	2.926.557.600,00
3.2	Dana Darurat	-	-	-
3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
	BELANJA DAERAH	1.832.421.446.761,00	2.096.055.292.303,00	263.633.845.542,00
1.	Belanja Operasi	1.124.024.055.578,00	1.279.224.035.049,00	157.661.783.186,00
a.	Belanja Pegawai	590.784.028.714,00	686.638.909.129,00	127.657.483.753,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	522.503.252.364,00	578.941.254.912,00	27.097.202.925,00
c.	Belanja Bunga	-	-	-
d.	Belanja Subsidi	-	-	-
e.	Belanja Hibah	10.736.774.500,00	13.643.871.008,00	2.907.096.508,00
f.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
2.	Belanja Modal	460.310.327.833,00	506.583.991.300,00	43.811.859.752,00
3.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	13.480.174.720,00	3.480.174.720,00
4.	Belanja Transfer	238.087.063.350,00	296.767.091.234,00	58.680.027.884,00
a.	Belanja Bagi Hasil	-	9.048.962.750,00	9.048.962.750,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	238.087.063.350,00	287.718.128.484,00	49.631.065.134,00
	JUMLAH BELANJA	1.832.421.446.761,00	2.096.055.292.303,00	263.633.845.542,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(64.298.089.560,00)	(124.286.903.705,00)	(59.988.814.145,00)
	PEMBIAYAAN DAERAH	64.298.089.560,00	124.286.903.705,00	59.988.814.145,00
1.	Penerimaan pembiayaan	74.298.089.560,00	134.286.903.705,00	59.988.814.145,00

No	Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021	Proyeksi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021	Bertambah/ Berkurang
a.	SilPA	74.298,089.560,00	134.286.903.705,00	59.988.814.145,00
b.	Penerimaan Piutang daerah	-	-	-
2.	Pengeluaran pembiayaan	10,000,000,000,00	10,000,000,000,00	-
a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,000,000,000,00	10,000,000,000,00	-
b.	pembayaran pokok utang	-	-	-
	Pembiayaan Netto	64.298.089.560,00	124.286.903.705,00	59.988.814.145,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	-	-	-

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui berbagai strategi pencegahan dan penanganan pandemic covid 19 yaitu: 1). Strategi Tata Kelola, 2) Strategi Penangan Kesehatan 3) Strategi Penyediaan Jaminan Sosial, dan 4) Strategi Penanganan Dampak Ekonomi. Strategi – strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam Perubahan RKPD 2021 dialokasikan sebesar 12,65% dari Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas atau Rp. 265.129.910.812, dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 52

Rencana Alokasi Pendanaan untuk penangan *Covid-19*
Perubahan RKPD Tahun 2021

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
Pemulihan Ekonomi				40.264.975.110	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	11.800.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	38.116.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem	46.052.750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Informasi Perdagangan		
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	172.176.900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional	141.498.295	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pameran Dagang Lokal	40.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Standardisasi Dan Erlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang	132.309.800.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pengawasan/Pen yuluhan Metrologi Legal	75.000.000.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi. Sinkro nisi. dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan. Penyebaran dan Perwilayahan Industri	100.380.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	25.000.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan	Pengawasan Kekuatan. Kesehatan. Kemandirian.	62.500.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Ketangguhan. serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan- Undang- Undang Kewenangan Kabupaten/Kota	62.500.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
			Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	61.299.900	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	465.304.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.949.700	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	55.001.500	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	51.802.400	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
			Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	58.046.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	220.000.000	Dinas Koperasi .Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	173.029.500	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	44.719.300	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	117.720.950	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	316.701.450	Dinas Pertanian dan Peternakan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	321.476.500	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	233.190.150	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1.978.938.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.965.778.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	384.241.000	
			Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.538.292.500	
			Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	260.086.500	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	277.160.200	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	206.820.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	86.649.800	Dinas Pertanian dan Peternakan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	100.088.650	Dinas Pertanian dan Peternakan
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	143.500.000	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	278.500.400	
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2.859.843.900	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1.097.406.800	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	227.786.500	Dinas Perkebunan
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.056.908.065	Dinas Perkebunan
			Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	500.000.000	Dinas Perkebunan
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pencegahan. Penanganan Kebakaran Lahan. dan Gangguan Usaha Tanaman pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	117.892.200	Dinas Perkebunan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	106.534.000	Dinas Perkebunan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	41.331.200	Dinas Perkebunan
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	23.976.150	Dinas Perkebunan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	40.000.000	Dinas Perikanan
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan	103.000.000	Dinas Perikanan
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	40.000.000	Dinas Perikanan
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan. Bantuan Pembiayaan. Kemitraan Usaha	40.000.000	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya. Lokasi. dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana. Semi Intensif. dan Intensif. serta tidak	40.000.000	Dinas Perikanan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1.272.134.000	Dinas Perikanan
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	153.247.000	Dinas Perikanan
			Pemberian Pendampingan. Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	Dinas Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000.00	Dinas Perikanan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	767.403.000	Dinas Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	Dinas Perikanan
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.999.900	Dinas Perikanan
			Perencanaan. Pengembangan. Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	29.999.850	Dinas Perikanan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	Dinas Perikanan
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	30.000.000	Dinas Perikanan
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	901.149.000	Dinas Perikanan
	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	82.629.500	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Kebudayaan	188.170.100	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	279.121.900	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Tradisional	92.704.100	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia. Lembaga. dan Pranata Adat	1.013.017.600	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	93.121.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	344.676.800	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	55.840.200	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.034.220.000	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	63.838.300	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	45.629.100	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	136.190.200	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	173.794.400	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
			Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Baik Dalam dan Luar Negeri	65.888.900	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
Bidang Kesehatan				213.904.781.152	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	30.642.045.000	Dinas Kesehatan
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	360.000.000	Dinas Kesehatan
			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1.574.500.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100.000.000	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	650.000.000.00	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.203.926.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	26.629.352.460	Dinas Kesehatan
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	59.460.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Obat. Vaksin	3.540.954.000	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.831.924.000	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85.000.000	

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Distribusi Alat Kesehatan. Obat. Vaksin. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	129.692.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.722.452.350	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19.404.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	165.615.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.450.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	67.900.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	10.000.000.00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	15.000.000.00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.000.000.00	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	15.000.000.00	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	22.500.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	22.500.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	759.692.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	14.897.205.350	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.218.477.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26.250.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	139.179.600	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	333.664.800	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupunktur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	26.250.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100.000.000	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	202.107.820	Dinas Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	406.026.250	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.435.487.262	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	40.000.000.00	Dinas Kesehatan
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.032.100.000	
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	380.000.000	
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	314.434.000	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	11.250.000	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	838.782.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20.000.000.00	Dinas Kesehatan
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	7.092.751.720	Dinas Kesehatan
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	334.700.000	Dinas Kesehatan

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	95.607.000	Dinas Kesehatan
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh ustri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	101.377.000	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan. Advokasi. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	124.650.000	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	23.735.000	Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	52.250.000.000	Rs. dr. Sobirin
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang	6.262.260.540	Rs. dr. Sobirin
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	4.480.000.000	Rs. dr. Sobirin

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan\ Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	11.067.119.000	Rs. dr. Sobirin
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2.700.000.000	Rs. dr. Sobirin
Bidang Perlindungan Sosial				10.960.154.550	
	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	67.724.300	Dinas Sosial
			Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	37.952.600	Dinas Sosial
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72.000.000	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	129.795.600	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	229.232.900	Dinas Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	23.249.750	Dinas Sosial

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanaan	76.437.100	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	37.500.100	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	150.214.000	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	55.305.800	Dinas Sosial
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	57.000.000	Dinas Sosial
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	472.915.800	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	56.341.900	Dinas Sosial
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	266.250.000	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.669.400.000	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	377.499.450	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	1.572.220.500	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	48.267.600	Dinas Sosial
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi. Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	205.875.000	Dinas Sosial

Bidang/ Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	OPD Penanggungjawab
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	47.599.900	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja. dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.599.950	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	38.299.700	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Kesempatan Kerja	1.000.000.000.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	58.664.600	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	43.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	64.314.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	54.994.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah				265.129.910.812	

5.2. Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 pada dasarnya menggambarkan pergeseran/perubahan alokasi anggaran program/kegiatan tahun 2021. Adapun pergeseran/perubahan pengalokasian anggaran program/kegiatan dilakukan dalam rangka akselerasi pencapaian target-target pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan tetap memperhatikan beberapa hal penting, antara lain sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir dalam APBD Induk 2021 dan urgensi kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran.

Dalam pelaksanaannya, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 tetap mengacu pada Prioritas pembangunan daerah. Selengkapnya mengenai matrik Pagu Indikatif berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Rencana Perubahan Pagu Indikatif Untuk Tiap Prioritas Pembangunan
Tahun 2021

NO	PRIORITAS	FOKUS	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD TA. 2021 (Rp)	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2021 (Rp)
1.	Pengentasan Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none">meningkatnya kontribusi pertanian dan perikanan terhadap perekonomianMeningkatnya kemandirian panganMeningkatnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomianMeningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM serta Lembaga Ekonomi non pertanian	<ol style="list-style-type: none">Dinas Pertanian dan PeternakanDinas Ketahanan PanganDinas PerkebunanDinas PerikananDinas Koperasi UKMDinas Perindustrian dan PerdaganganDPMPTSPDinas Pemberdayaan Masyarakat DesaDinas Sosial	179.186.587.866	275.582.732.866

NO	PRIORITAS	FOKUS	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD TA. 2021 (Rp)	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RPKD 2021 (Rp)
			10. Dinas kebudayaan dan Pariwisata		
2.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Menurunnya 2. Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Dinas Kesehatan 2. RS. dr. Sobirin 3. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	489.132.152.733	519.423.063.747
3.	Peningkatan Penanaman Modal	1. Meningkatnya jumlah penanaman modal 2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	1. DPMPSTP 2. Dinas Perkebunan 3. Dinas Perikanan 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. DPUCKTRP 6. Dinas kebudayaan dan Pariwisata 7. Dinas Pendapatan, Pajak Retribusi Daerah 8. Dinas Lingkungan Hidup Daerah 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 6. 14 (Empat Belas) Kecamatan	223.442.273.645	283.442.273.645

NO	PRIORITAS	FOKUS	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD TA. 2021 (Rp)	PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RKPD 2021 (Rp)
4.	Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya Panjang Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap Meningkatnya infrastruktur keciptakaryaan dan pengairan 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas PU BM Dinas PU CK TR dan Pengairan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perhubungan Dinas Kominfo dan Statistik 	460.047.889.257	516.974.669.175
5.	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> Inspektorat BPKAD Sekretariat Daerah BAPPEDA BKPSDM Diskominfo Dinas Perpustakaan dan Kearsipan BPPRD BALITBANG DISTANAK Dinas Perikanan DISDUKCAPIL Dispora Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Disnakertrans Satpol PP dan Damkar Badan Kesbangpol Set. DPRD Kecamatan (14) 	480.612.543.260	500.632.552.870,39
Jumlah				1.832.421.446.761	2.096.055.292.303

Dari usulan program dan kegiatan pada Belanja Langsung dan Tidak Langsung perangkat daerah yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.096.055.292.303 berikut rekap perubahan belanja per Perangkat Daerah.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Perubahan Belanja per Perangkat Daerah
Tahun 2021

Perangkat Daerah	RKPD 2021	RKPD 2021 Perubahan
Dinas Pendidikan	394.356.415.262	420.293.923.144
Dinas Kesehatan	193.131.522.749	262.153.419.128
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Sobirin	96.477.572.119	119.790.446.969
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	113.501.326.218	138.451.519.395
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	184.894.214.610	240.932.465.489
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	60.331.203.264	63.693.234.292
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.294.736.236	12.243.142.303
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.847.292.962	2.916.199.226
Dinas Sosial	9.116.158.916	15.083.490.224
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.742.731.620	6.831.015.230
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.288.067.144	4.036.058.196
Dinas Ketahanan Pangan	6.875.495.664	6.685.509.815
Dinas Lingkungan hidup	12.527.674.939	12.188.091.568
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.456.276.084	7.088.403.306
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.549.636.925	9.691.766.566
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.941.275.454	12.183.078.029
Dinas Perhubungan	7.057.563.690	6.889.323.133
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	10.567.111.156	9.526.546.948
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.727.865.586	6.714.552.534
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.028.345.217	10.980.731.364
Dinas Pemuda dan Olahraga	17.044.852.778	17.470.566.324
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10.916.145.856	7.158.569.182
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.559.314.776	14.528.735.645
Dinas Perikanan	9.074.309.102	8.915.240.940
Dinas Pertanian dan Peternakan	38.774.443.944	36.646.711.909
Dinas Perkebunan	12.863.587.565	13.232.823.423
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.653.439.492	20.861.139.145

Perangkat Daerah	RKPD 2021	RKPD 2021 Perubahan
Sekretariat Daerah	60.788.136.799	62.632.111.785
Sekretariat DPRD	104.695.751.884	96.215.138.178
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.487.263.510	8.170.286.045
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	275.201.936.156	344.245.870.614
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	11.930.743.058	11.513.176.734
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.198.205.638	12.721.683.577
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.051.036.362	4.836.071.459
Inspektorat	18.962.346.132	17.170.684.965
Kecamatan BTS ULU	3.577.644.676	3.566.840.358
Kecamatan Muara Kelingi	3.505.634.666	3.497.982.334
Kecamatan Muara Lakitan	3.513.458.544	3.429.111.492
Kecamatan Jayaloka	3.398.959.438	3.410.995.821
Kecamatan Megang Sakti	4.932.948.662	4.784.233.739
Kecamatan Sukakarya	2.033.540.837	1.801.189.567
Kecamatan Tuah Negeri	1.896.837.502	1.846.482.413
Kecamatan Tugumulyo	3.641.799.766	3.748.717.057
Kecamatan Purwodadi	4.369.217.460	4.441.580.802
Kecamatan STL ULU Terawas	3.014.730.668	2.979.571.422
Kecamatan Sumber Harta	2.546.868.429	2.429.373.283
Kecamatan Muara Beliti	3.210.160.462	3.127.270.176
Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	2.035.152.976	2.006.225.361
Kecamatan Selangit	3.003.228.629	3.041.368.163
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.336.401.479	7.252.623.531
JUMLAH	1.832.421.446.761	2.096.055.292.303

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Berangkat dari kebutuhan yang terangkum dari hasil pengendalian dan evaluasi berjalannya program/kegiatan dan kerangka pendanaan, melalui perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 akan membantu dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan Musi Rawas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

Dalam implementasi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021, diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh OPD serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.

Muara Beliti, 07 September 2021

BUPATI MUSI RAWAS,



Ratna Machmud
RATNA MACHMUD